



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar



**BPSPL
DENPASAR**
#BijakMengelolaLaut

KATA PENGANTAR

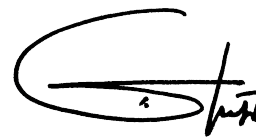
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan nikmat dan rahmatNya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk terus mengabdikan kepadaNya dan berkhidmat kepada Negara dan Bangsa yang kita cintai, Indonesia. Salah satu bentuk khidmat kita kepada Negara ini, adalah diterbitkannya Laporan Kinerja (LKj) BPSPL Denpasar Tahun 2023 yang mendokumentasikan secara singkat mengenai gerak langkah dan kontribusi BPSPL Denpasar selama Tahun Anggaran 2023.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian program dan kegiatan BPSPL Denpasar selama Tahun 2023 melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Harapan kami laporan ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan BPSPL Denpasar dan sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Direktorat Jenderal PRL.

Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya, maka saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan Ditjen PRL diucapkan terima kasih.

Gianyar, 15 Januari 2024

Kepala BPSPL Denpasar



Getreda Melsina Hehanussa

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj Interim) dan tahunan (LKj Tahunan). Penyusunan laporan kinerja meliputi pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai terhadap hasil capaian target kinerja. Pelaporan kinerja dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Hasil capaian kinerja yang dituangkan pada Laporan Kinerja (LKj) tahun 2023 ini telah mendukung pelaksanaan rencana strategis DJPRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja BPSPL Denpasar tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan kesatu dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023. Pada pelaporan LKj tahun 2023, data capaian dan target BPSPL Denpasar telah disampaikan secara lengkap dan disertai dokumen data dukung yang tersimpan di dalam folder bit.ly/SAKIPDjPRL2023 serta sesuai dengan format Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen KP No. 68/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan/atau Indikator Kinerja (IK) yang dapat diukur pada tahun 2023 adalah IKU 1 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Dokumen) dengan target 3 dokumen dan capaian 3 dokumen; IKU 2 Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Daerah) dengan target 1 daerah dan capaian 1 daerah; IKU 3 Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat

Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kelompok) dengan target 2 Kelompok dan capaian 2 Kelompok; IKU 4 Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis) dengan target 6 jenis dan capaian 9 jenis; IKU 5 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis) dengan target 5 jenis dan capaian 7 jenis; IKU 6 Nilai PNPB BPSPL Denpasar (Rp.000) dengan target 850.000 dan capaian 3.037.033,914; IK 7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai) dengan target 93,75 dan capaian 89,95; IK 8 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai) dengan target 82 dan capaian 87,39; IK 9 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai) dengan target 75 dan capaian 87,57; IK 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks) dengan target 85 dan capaian 90,43; IK 11 Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai) dengan target 75 dan capaian 84,2; IK 12 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen) dengan target 4 dokumen dan capaian 4 dokumen; IK 13 Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Denpasar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%) dengan target 92 dan capaian 133,30; IK 14 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Denpasar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%) dengan target 75 dan capaian 100; IK 15 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%) dengan target 100 dan capaian 100; IK 16 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Denpasar (%) dengan target 77,5 dan capaian 93,33.

Total PAGU PAGU anggaran BPSPL Denpasar tahun 2023 saat ini adalah adalah Rp14.073.397.000,00 dengan blokir sejumlah Rp375.000.000,00 yang berasal dari blokir Kode 2 (*Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait*) sehingga PAGU bersih yang dapat digunakan adalah sebesar Rp13.698.397.000,00, dengan total realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 adalah Rp13.678.925.611,00 (99,86%).

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Denpasar dilakukan dengan cara

membandingkan antara target capaian dengan realisasi indikator kinerja utama atau indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan yang tercantum pada perjanjian kerja. Hasil Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) IKU+IKM BPSPL Denpasar Tahun 2023 adalah 109,95% yang berkategori baik dengan ditandai warja hijau pada aplikasi kinerja (kinerjaku.kkp.go.id).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi.....	2
1.4 Organisasi.....	4
1.5 Kepegawaian.....	5
1.6 Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan ..	8
1.7 Dasar Hukum dan Sistematika Penyajian.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 Rencana Strategis 2020-2024.....	17
2.2 Ikhtisar Perjanjian Kinerja.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	29
IKU 1. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Dokumen).....	32
IKU 2. Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Daerah).....	43
IKU 3. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kelompok).....	46
IKU 4. Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	49
IKU 5. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis).....	68
IKU 6. Nilai PNBSP BPSPL Denpasar (Rp.000).....	75

IK 7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai).....	77
IK 8. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	80
IK 9. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai) 83	
IK 10. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)	85
IK 11. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	88
IK 12. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	92
IK 13. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Denpasar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	93
IK 14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Denpasar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	95
IK 15. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)	97
IK 16. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Denpasar (%)	99
3.2 Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Lain	101
3.3 Realisasi Anggaran	103
BAB IV PENUTUP	106
4.1 Kesimpulan.....	106
4.2 Rekomendasi.....	107
LAMPIRAN	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nama Satker dan Wilayah Kerja.....	5
Tabel 2. Luasan Terumbu Karang di Indonesia	9
Tabel 3. Luasan Mangrove di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar.....	9
Tabel 4. Potensi Perikanan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	10
Tabel 5. KKP3K di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	11
Tabel 6. Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Denpasar 2020-2024.....	20
Tabel 7. Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar Tahun 2023	27
Tabel 8. Target dan Realisasi BPSPL Denpasar Tahun 2023.....	30
Tabel 9. Capaian IKU 1 BPSPL Denpasar TW IV.....	32
Tabel 10. sosialisasi dan Coaching Clinic Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar Tahun 2023.....	34
Tabel 11. Rekapitulasi Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar Tahun 2023	35
Tabel 12. Kegiatan Pendukung IKU 1.....	41
Tabel 13. Realisasi Anggaran IKU 1	43
Tabel 14. Capaian IKU 2 BPSPL Denpasar TW IV	43
Tabel 15. Kegiatan Pendukung IKU 2.....	45
Tabel 16. Realisasi Anggaran IKU 2	45
Tabel 17. Capaian IKU 3 BPSPL Denpasar TW IV	46
Tabel 18. Kegiatan Pendukung IKU 2.....	48
Tabel 19. Realisasi Anggaran IKU 3	49
Tabel 20. Capaian IKU 4 BPSPL Denpasar TW IV	50
Tabel 21. Musim Peneluran Penyus.....	58
Tabel 22. Rekap kejadian respon cepat BPSPL Denpasar hingga Triwulan IV	64
Tabel 23. Kegiatan Pendukung IKU 4.....	64
Tabel 24. Realisasi Anggaran IKU 4	67
Tabel 25. Capaian IKU 5 BPSPL Denpasar TW IV.....	69
Tabel 26. Kegiatan Pendukung IKU 5.....	74
Tabel 27. Realisasi Anggaran IKU 5	74
Tabel 28. Capaian IKU 6 BPSPL Denpasar TW IV.....	75
Tabel 29. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	77
Tabel 30. Capaian IK 7 BPSPL Denpasar TW IV.....	78
Tabel 31. Capaian IK 8 BPSPL Denpasar TW IV.....	80
Tabel 32. Capaian IK 9 BPSPL Denpasar TW IV.....	83
Tabel 33. Capaian IK 10 BPSPL Denpasar TW IV	85
Tabel 34. Realisasi Anggaran IK 10.....	87
Tabel 35. Kategori nilai PM SAKIP.....	88
Tabel 36. Capaian IK 11 BPSPL Denpasar TW IV	90
Tabel 37. Capaian IK 12 BPSPL Denpasar TW IV	92
Tabel 38. Capaian IK 13 BPSPL Denpasar TW IV	93
Tabel 39. Capaian IK 14 BPSPL Denpasar TW IV.....	95

Tabel 40. Capaian IK 15 BPSPL Denpasar TW IV	97
Tabel 41. Capaian IK 16 BPSPL Denpasar TW IV	100
Tabel 42. Target dan Realisasi BPSPL Denpasar Tahun 2023	101
Tabel 43. Realisasi Anggaran BPSPL Denpasar Triwulan IV Tahun 2023 .	104

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perbandingan Status Pegawai BPSPL Denpasar TA 2023	6
Grafik 2. Perincian Tenaga Kontrak (PPNPN) BPSPL Denpasar TA 2023	6
Grafik 3. Klasifikasi Berdasarkan Golongan PNS BPSPL Denpasar TA 20237	
Grafik 4. Tingkat Pendidikan PNS BPSPL Denpasar TA 2023	7
Grafik 5. Distribusi SDM BPSPL Denpasar TA 2023	8
Grafik 6. Dominasi Jenis Pemanfaatan Ruang Laut Jawa Timur.....	35
Grafik 7. Dominasi Jenis Pemanfaatan Ruang Laut Provinsi Bali	36
Grafik 8. Dominasi Jenis Pemanfaatan Ruang Laut Provinsi NTB.....	36
Grafik 9. Dominasi Jenis Pemanfaatan Ruang Laut Provinsi NTT	37
Grafik 10. Persentase Jenis Kegiatan yang Memohonkan KKPRL di Provinsi Bali TA. 2023.....	38
Grafik 11. Persentase Jenis Kegiatan yang Memohonkan KKPRL di Provinsi Jawa Timur TA. 2023	39
Grafik 12. Persentase Jenis Kegiatan yang Memohonkan KKPRL di Provinsi NTB TA. 2023	40
Grafik 13. Persentase Jenis Kegiatan yang Memohonkan KKPRL di Provinsi NTT TA. 2023.....	41
Grafik 14. Komposisi Spesies Hiu di Brondong.....	52
Grafik 15. Komposisi Spesies Pari di Brondong	53
Grafik 16. Komposisi Spesies Hiu di Muncar.....	54
Grafik 17. Komposisi Spesies Pari di Muncar	54
Grafik 18. Komposisi Spesies Hiu di Benoa.....	55
Grafik 19. Komposisi Spesies Pari di Benoa.....	55
Grafik 20. Komposisi Spesies Hiu di Tj. Luar	56
Grafik 21. Komposisi Spesies Pari di Tj. Luar	57
Grafik 22. Komposisi Spesies Hiu di Kupang.....	57
Grafik 23. Komposisi Spesies Pari di Kupang.....	58
Grafik 24. Grafik Frekuensi Kemunculan Hiu Paus Tahun 2023 di Probolinggo.....	60
Grafik 25. Diagram frekuensi kemunculan Hiu Paus per periode waktu di Probolinggo.....	60
Grafik 26. Grafik Frekuensi Kemunculan Hiu Paus Tahun 2023 di Situbondo	61
Grafik 27. Diagram frekuensi kemunculan Hiu Paus per periode waktu di Situbondo	62
Grafik 28. Grafik Populasi Belida di Titik Inlet Waduk Bening	63
Grafik 29. Grafik Hubungan Panjang dan Berat Ikan Belida	63
Grafik 30. Jumlah Rekomendasi Hiu dan Pari Bulanan hingga Triwulan IV	71
Grafik 31. Jumlah SAJI DN Hiu dan Pari Bulanan hingga Triwulan IV.....	71
Grafik 32. Jumlah SAJI DN Arwana Bulanan hingga Triwulan IV.....	72

Grafik 33. Jumlah Rekomendasi Karang Hias Bulanan hingga Triwulan IV	73
Grafik 34. Jumlah Rekomendasi Teripang Bulanan hingga Triwulan IV....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPSPL Denpasar.....	4
Gambar 2. Dinamika Komposisi Pagu Anggaran BPSPL Denpasar 2023	26
Gambar 3. NPSS BPSPL Denpasar	29
Gambar 4. Peta Sebaran Penyu yang ditemukan bersama mitra.....	58
Gambar 5. Peta prediksi sebaran kemunculan Hiu Paus Tahun 2023 di Probolinggo.....	59
Gambar 6. Peta prediksi sebaran kemunculan Hiu Paus Tahun 2023 di Situbondo	61
Gambar 7. Nilai NKA dari aplikasi SMART	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan data kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan evaluasi kinerja.

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk mendukung pelaksanaan SAKIP tersebut, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar telah menunjuk Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Tahun 2023.

Laporan Kinerja merupakan salah satu upaya dalam implementasi SAKIP dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan. Laporan Kinerja ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Tahun 2023.

1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar adalah unit pelaksana teknis di bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Fokus pada program pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut tanggal 17 November 2008. Secara khusus UPT ini adalah mengawal UU No 31 tahun 2004 Jo UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan beserta turunannya dan UU No. 27 tahun 2007 Jo UU No 01 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil beserta turunannya. Sehingga BPSPL Denpasar mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan meliputi antara lain perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugasnya BPSPL Denpasar menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program dan evaluasi di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 2) Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 3) Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 4) Pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetika ikan;
- 5) Pelaksanaan pengawasan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

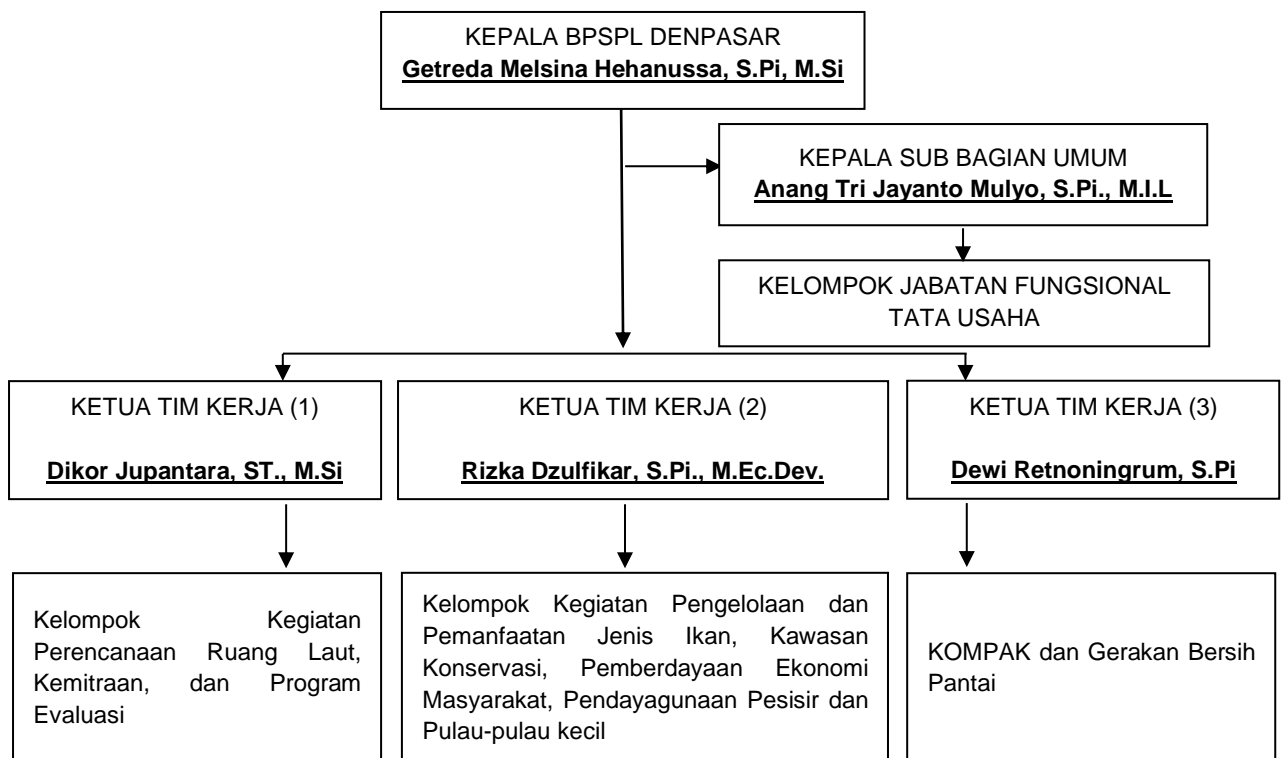
Disamping itu, bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPSPL Denpasar secara umum memiliki beberapa alasan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara ekosistemnya di daerah, antara lain sebagai berikut:

- 1) Percepatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya secara terpadu dan berkelanjutan;
- 2) Pengelolaan konservasi jenis dan genetika ikan dengan karakteristik tertentu yang dalam pelaksanaannya tidak dapat didelegasikan ke daerah;
- 3) Monitoring ekosistem dan jenis ikan langka/terancam punah; Monitoring habitat dan populasi dan jenis-jenis spesifik; Koleksi dan breeding; Mempunyai nilai dan kepentingan konservasi nasional dan/atau internasional; Secara ekologi bersifat lintas Negara; Mencakup habitat dan daerah ruaya jenis migrasi; Potensi sebagai warisan alam, dunia dan/atau warisan wilayah nasional.
- 4) Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindak-lanjuti ratifikasi konvensi dan perjanjian Internasional di bidang konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti CBD (Convention on Biological Diversity), Ramsar Convention on Wetlands of Internasional Importance, WHS (World Heritage Site), dan CITES (Convention on International Trade in Endangered Species); yang pelaksanaannya tidak bisa didelegasikan/dimandatkan kepada daerah (kewenangan pusat); serta menangani fungsi-fungsi Direktorat Jenderal PRL di daerah, termasuk kerja sama regional seperti Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF);
- 5) Pelaksanaan sebagian fungsi Ditjen PRL dalam memfasilitasi daerah untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, dan memberikan bimbingan secara langsung kepada stakeholder yang ada di daerah terkait dengan fungsi pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
- 6) Pembinaan dan fasilitasi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat pesisir;

- 7) Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindaklanjuti pencapaian tujuan SDG (*Sustainable Development Goals*), antar lain; menghapus tingkat kemiskinan dan kelaparan, menjamin kelestarian lingkungan hidup; dan pelaksanaan tugas pemerintah pusat dalam pemberdayaan dan peran serta masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir.

1.4 Organisasi

Struktur Organisasi BPSPL Denpasar berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/KEPMEN/KP/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 108/KEPMEN/KP/2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi BPSPL Denpasar

Dalam struktur organisasi BPSPL Denpasar, terdapat 3 bagian utama, yaitu:

- 1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan pelaporan BPSPL.
- 2) Ketua Tim Kerja (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang termasuk dalam Kelompok Kegiatan Perencanaan Ruang Laut, Kemitraan, dan Program Evaluasi.
- 3) Ketua Tim Kerja (2) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang termasuk dalam Kelompok Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Jenis Ikan, Kawasan Konservasi, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau kecil.
- 4) Ketua Tim Kerja (3) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang termasuk dalam Kelompok Kegiatan KOMPAK dan Gerakan Bersih Pantai

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BPSPL Denpasar dibantu 3 Satuan Kerja (Satker) yang mana pembentukannya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2011 yaitu Satker Surabaya, Satker Mataram dan Satker Kupang.

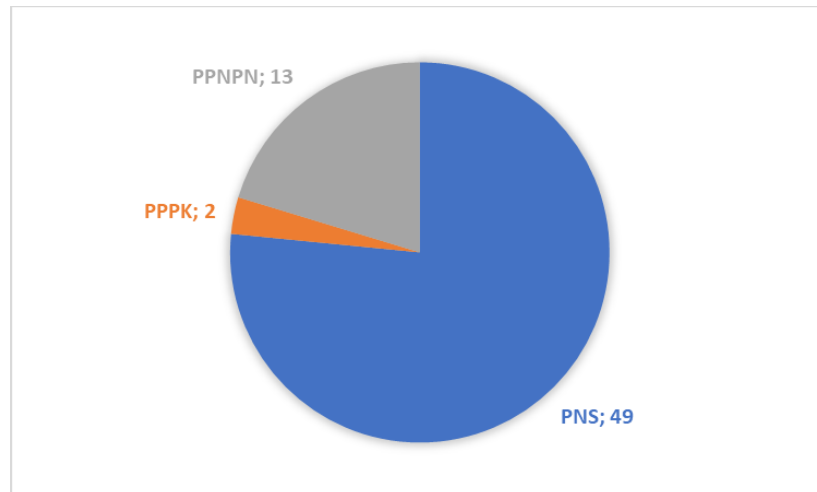
Tabel 1. Nama Satker dan Wilayah Kerja

No	Nama Satker	Koordinator	Wilayah Kerja
1.	Satker Surabaya	Suwardi, S.T., M.Si	Provinsi Jatim
2.	Satker Mataram	Muhammad Barmawi, M.Sc	Provinsi NTB
3.	Satker Kupang	Sri Pratiwi Saraswati Dewi, S.Pi	Provinsi NTT
4.	Pos Pelayanan Banyuwangi	Dewi Retnoningrum, S.Pi	Provinsi Jatim

1.5 Kepegawaian

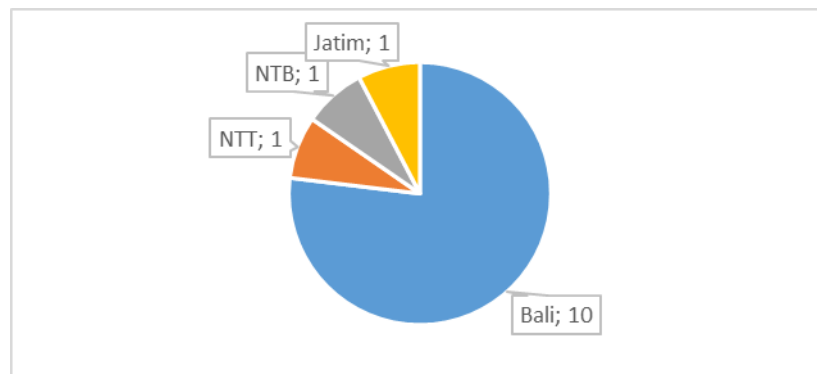
Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan organisasi. Jumlah pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Tenaga Kontrak pada tahun 2023 sebanyak 64 orang terdiri dari 49 PNS, 2 PPPK, dan 13 PPNP. Komposisi pegawai berdasarkan status pegawai ditampilkan sebagai berikut:

Grafik 1. Perbandingan Status Pegawai BPSPL Denpasar TA 2023



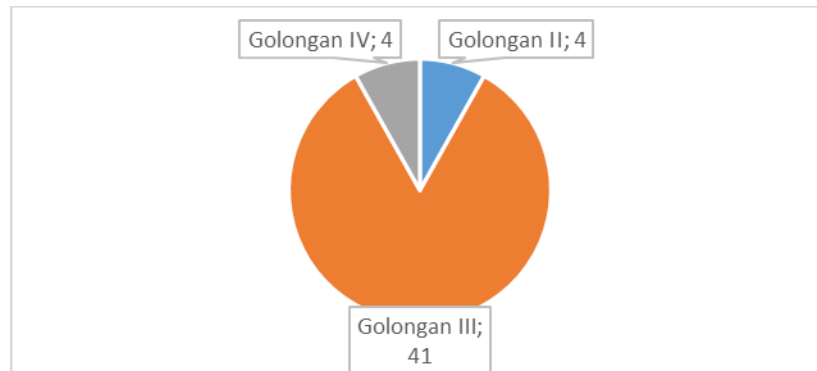
Adapun perincian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 2 orang yang kesemuanya berada di Wilker Bali. Sedangkan perincian tenaga kontrak atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) kesemuanya berjumlah 13 orang yang tersebar di Wilker Jatim 1 orang, Wilker NTB 1 orang, Wilker NTT 1 orang dan Wilker Bali 10 orang. Secara rinci ditampilkan dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 2. Perincian Tenaga Kontrak (PPNPN) BPSPL Denpasar TA 2023



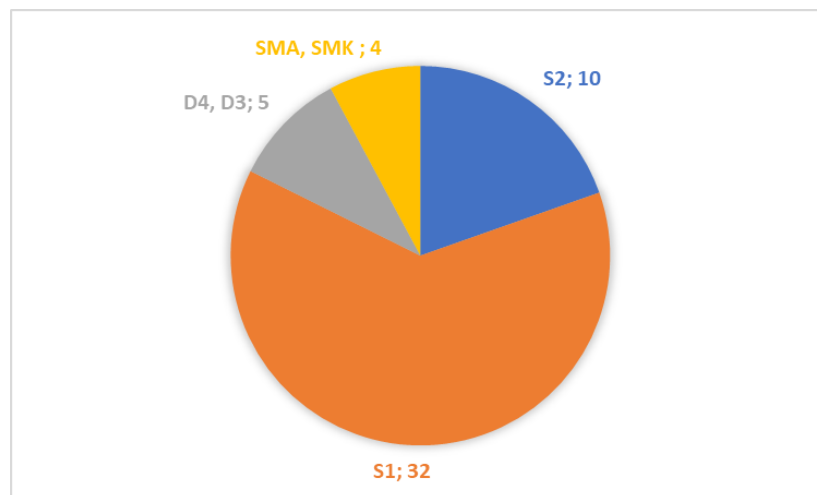
Sedangkan komposisi PNS berdasarkan golongan dan ruang ditampilkan pada grafik sebagai berikut.

Grafik 3. Klasifikasi Berdasarkan Golongan PNS BPSPL Denpasar TA 2023



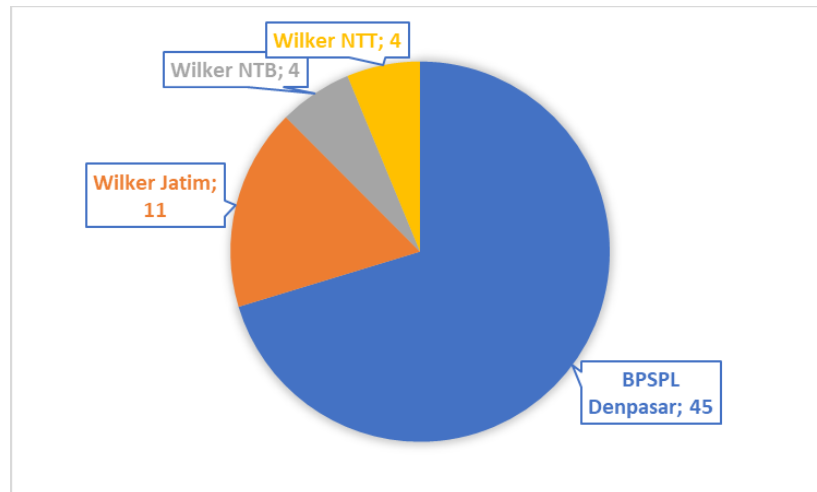
Tingkat pendidikan pegawai BPSPL Denpasar merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam menunjang capaian kinerja BPSPL Denpasar. Untuk komposisi PNS berdasarkan tingkat pendidikan ditampilkan pada grafik 4 sebagai berikut.

Grafik 4. Tingkat Pendidikan PNS BPSPL Denpasar TA 2023



Selain tingkat pendidikan, penempatan SDM merupakan faktor yang penting dalam mencapai sasaran strategis BPSPL Denpasar yang telah ditetapkan, mengingat BPSPL Denpasar memiliki 4 kantor satker di Surabaya, Mataram dan Kupang. Berikut distribusi PNS, PPPK, dan tenaga kontrak BPSPL Denpasar.

Grafik 5. Distribusi SDM BPSPL Denpasar TA 2023



1.6 Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

A. Potensi

Indonesia merupakan Negara yang memiliki berbagai keunggulan secara geopolitik dan geografis. Secara geografis posisi Indonesia sangat strategis yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya kelautan dan perikanan karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah 8,3 juta km² dengan jumlah pulau mencapai 17.504 pulau dimana 16.671 pulau sudah dibakukan dan dilaporkan ke PBB. Luas perairan Indonesia adalah 6,4 juta km² yang terdiri atas laut teritorial seluas 0,29 juta km², perairan pedalaman dan perairan kepulauan seluas 3,11 juta km², dan ZEE Indonesia mencapai 3,00 juta km². Selain itu Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 juta km², luas landas kontinen 2,8 juta km² dan panjang garis pantai 108.000 km (Ditjen PRL, 2020).

Keberadaannya yang strategis menjadikan Indonesia salah satu perlintasan alur pelayaran internasional dan perdagangan lintas samudera dan benua. Lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini diatur melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi-Selat Makassar-Lautan Flores-Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda). Keberadaan tiga alur tersebut telah membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN hingga lebih maju dan produktif bagi Indonesia.

Ekosistem pesisir dan keanekaragaman hayati laut, termasuk pulau-pulau kecilnya menyimpan banyak potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan nasional untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya potensi secara individual komponen pembentuk ekosistem, seperti mangrove, lamun, terumbu karang dan ikan karang, namun secara kesatuan mereka membentuk potensi “services” yang dapat dimanfaatkan untuk menambah perputaran ekonomi masyarakat pesisir, yaitu dengan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Terumbu Karang merupakan ekosistem yang memiliki keanekaragaman yang tinggi serta memiliki nilai ekologis, ekonomis, dan estetika yang tinggi, total luasan Terumbu Karang di Indonesia berdasarkan data dari LIPI 2.517.818 HA dengan keanekaragaman yang sangat beragam hingga ratusan lebih jenis karang. Sedangkan Padang lamun menyediakan perlindungan dan makanan bagi beberapa jenis ikan dan kerang-kerangan ekonomis penting. Total luasan Padang Lamun di Indonesia mencapai 1.507 Km² Dengan keanekaragaman jenis. Selain itu terdapat potensi mangrove kritis dan non kritis, ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang mempunyai fungsi dan manfaat yang beraneka ragam bagi manusia serta makhluk hidup lainnya.

Tabel 2. Luasan Terumbu Karang di Indonesia

No	Regional	Luas (Ha
1	Sulawesi	862.627
2	Sumatera	478,587
3	Maluku	439,110
4	Nusa Tenggara	272,123
5	Papua	269,402
6	Kalimantan	119,304
7	Jawa	67,869
8	Bali	8,837
Total		2,517,858

Sumber: Pusat Penelitian Oseanografi LIPI

Tabel 3. Luasan Mangrove di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar

NO	PROVINSI	Kritis	Non Kritis
		LUAS (HA)	LUAS HA
1	JAWA TIMUR	6166.809	1340.974
2	BALI	126.193	32.16374
3	NTB	3526.509	3322.79
4	NTT	1859.784	4440.741

Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut. Wilayah Perairan di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara selain memiliki potensi sumber daya ikan baik perikanan budidaya maupun tangkap, juga memiliki potensi biota lainnya baik endemik, langka, dan dilindungi dari kelompok cetacean, crustacean, Bivalvia, testudinata (penyu), maupun kelas pisces.

Tabel 4. Potensi Perikanan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar

No.	Provinsi	Potensi Perikanan	
		Budidaya (Ha)	Tangkap (ton/tahun)
1	Bali	12.679.041	95.014
2	Jawa Timur	856.487.585	481.499
3	NTB	392.344.829	220.732
4	NTT	92.773.720	123.652

Di wilayah kerja BPSPL Denpasar juga terdapat beranekaragam biota laut dilindungi yang dapat dilakukan pendataan dan monitoring. Biota tersebut dapat ditemukan di beberapa lokasi antara lain:

- Jawa Timur: Hiu Paus (Probolinggo), Hiu dan Pari Appendiks (Muncar-Banyuwangi, Brondong-Lamongan, Prigi-Trenggalek), Penyu (Banyuwangi, Trenggalek), Terumbu Karang (Banyuwangi, Kangean)
- Bali: Penyu (Gianyar, Klungkung, Denpasar, Badung, Jembrana, Buleleng), Hiu Appendiks (Benoa, Karangasem), Lumba-lumba (Lovina, TNBB), Terumbu Karang (Buleleng, Denpasar, Badung, Nusa Penida), Pari Manta (Nusa Penida-Klungkung)
- NTB: Penyu (Mataram, Kab. Sumbawa), Hiu Pari Appendiks (Tj. Luar, Sumbawa), Terumbu Karang (Lombok Utara, Sumbawa), Hiu Paus (Teluk Saleh-Sumbawa)
- NTT: Dugong (Alor), Lumba-lumba (Alor), Penyu (Lembata, Pulau Solor - Flores Timur), Terumbu Karang (Alor, Sikka, Ende), Teripang (Rote, Riung), Paus (Lembata), Pari Manta (Labuan Bajo), Hiu Pari Appendiks (Namosain-Kupang, Papela-Rote)

Untuk mendukung kegiatan tersebut, BPSPL Denpasar melakukan kerjasama dengan kelompok masyarakat dengan memberikan bantuan

KOMPAK berupa alat monitoring. Selain itu, BPSPL Denpasar juga menjalin kerjasama dengan instansi melalui kesepakatan perjanjian kerjasama di seluruh wilayah kerja.

Pada sektor pemanfaatan jasa kelautan, wilayah kerja BPSPL Denpasar menyimpan potensi garam (Kab Tuban, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Pasuruan), biofarmakologi, dan desa wisata bahari. Potensi tersebut tersebar di seluruh wilayah BPSPL Denpasar dan perlu dilakukan identifikasi agar dapat dimanfaatkan dengan baik.

Di wilayah kerja BPSPL Denpasar, terdapat banyak Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil baik yang telah ditetapkan maupun yang sedang dalam proses penetapannya. Adapun status penetapan dan peraturan yang mengatur tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 5. KKP3K di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar

NO	NAMA KAWASAN (KKP3K)	PROVINSI	KABUPATEN	LUAS (HA)	STATUS PENETAPAN	SK PENCADANGAN / PENETAPAN
1	KKPD Nusa Penida	Bali	Klungkung	20,057.00	PENETAPAN MKP	KEPMENKP No.90/KEPMEN-KP/2018 mengganti KEPMENKP No. 24/KEPMEN-KP/2014
2	KKPD Buleleng	Bali	Buleleng	14,041.13	PENCADANGAN	KEPBUP Buleleng No. 523/630/HK/2011
3	KKPD Jembrana	Bali	Jembrana	3,532.52	PENCADANGAN	KEPBUP Jembrana No. 778/DKPK/2013 tanggal 30 Desember 2013
4	KKPD Karangasem	Bali	Karangasem	5,856.31	PENCADANGAN	KEPGUB BALI 375/03-L/HK/2017 tanggal 19 Januari 2017
5	KKM Teluk Benoa	Bali	Badung dan Denpasar	1,243.41	PENETAPAN MKP	KEPMENKP No. 46/KEPMEN-KP/2019
6	KKPD di Kabupaten Sidoarjo	Jawa Timur	Sidoarjo	72.32	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
7	KKPD di Kabupaten Probolinggo	Jawa Timur	Probolinggo	374.07	Sudah ditetapkan MKP	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/KEPMEN-KP/2020 tanggal 10 Juni 2020
8	KKPD di Kabupaten Pasuruan	Jawa Timur	Pasuruan	4073.74	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
9	KKPD di Kabupaten Situbondo	Jawa Timur	Situbondo	123.181	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
10	KKPD di Kabupaten Tulungagung	Jawa Timur	Tulungagung	217	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
11	KKPD di Kabupaten Sumenep	Jawa Timur	Sumenep	72026.14	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
12	KKPD di Kabupaten Banyuwangi	Jawa Timur	Banyuwangi	412.68	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
13	TWP Gili Sulat dan Gili Lawang	N T B	Kab. Lombok Timur	10000	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 92/KEPMEN-KP/2018
14	TWP Gili Tangkong, Nanggu dan Sudak	N T B	Kab. Lombok Barat	21132.82	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 93/KEPMEN-KP/2018
15	TWP Pulau Liang dan Ngali	N T B	Kab. Sumbawa	32644.43	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 20/KEPMEN-KP/2020
16	TWP Gili Banta	N T B	Kab. Bima	40276.54	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 21/KEPMEN-KP/2020

17	SAP Teluk Cempi	N T B	Kab. Dompu	22257.45	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 22/KEPMEN-KP/2020
18	TWP Teluk Bumbang	N T B	Kab. Lombok Tengah	6310	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
19	TPK Gili Balu	N T B	Kab. Sumbawa Barat	6005.2	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
20	TPK Pulau Kramat, Bedil dan Temudong	N T B	Kab. Sumbawa	2000	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
21	TP Penyutatar Sepang-Lunyuk	N T B	Kab. Sumbawa dan Kab. Sumbawa Barat	72415.29	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
22	SAP Pulau Lipan dan Pulau Rakit	N T B	Kab. Sumbawa	26640.81	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
23	KKP3K Pulau Panjang	N T B	Kab. Sumbawa	22138.47	Dalam Dokumen RZWP3K	Peraturan Daerah Provinsi NTB: Nomor 12/2017
24	KKP Pulau Medang	N T B	Kab. Sumbawa	11339.56	Dalam Dokumen RZWP3K	Peraturan Daerah Provinsi NTB: Nomor 12/2017
25	KKP3K Pulau Kelapa	N T B	Kab. Bima	6947.28	Dalam Dokumen RZWP3K	Peraturan Daerah Provinsi NTB: Nomor 12/2017
26	KKP3K Pulau Sangiang	N T B	Kab. Bima	48610.01	Dalam Dokumen RZWP3K	Peraturan Daerah Provinsi NTB: Nomor 12/2017
27	KKPD Flores Timur	NTT	Flores Timur	150,000.00	Dicadangkan	Kep Gubernur No 308/KEP/HK/2017
28	KKPD Sikka	NTT	Sikka	207,062.92	Dicadangkan	Kep Gubernur No 107A/KEP/HK/2018
29	KKPD Lembata	NTT	Lembata	76,722.06	Dicadangkan	KepGub NTT nomor 192/Kep/HK/2019
30	KKPD SAP Selat Pantar	NTT	Alor	276,693.38	Ditetapkan	Kepmen KP Nomor 35/KEPMEN-KP/2015

PPKT adalah pulau dengan luas areal kurang atau sama dengan 2.000 km² yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Kawasan pulau-pulau kecil memiliki potensi pembangunan yang cukup besar karena didukung oleh letaknya yang strategis dari aspek ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan serta adanya ekosistem khas tropis dengan produktivitas hayati tinggi yaitu terumbu karang (coral reef), padang lamun (seagrass), dan hutan bakau (mangrove). Wilayah kerja BPSPL Denpasar memiliki 12 pulau-pulau kecil terluar dengan rincian:

- a. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT): Pulau Alor, Pulau Batek, Pulau Rote, Pulau Ndana, Pulau Sabu, Pulau Dana, dan Pulau Mangudu
- b. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB): Gili Sepatang (Pulau Sophialouisa)
- c. Provinsi Bali: Pulau Nusa Penida
- d. Provinsi Jawa Timur: Pulau Nusabarong (Pulau Barong), Pulau Ngekel (Pulau Sekel), dan Pulau Panikan

Selain menyimpan potensi yang besar, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga menyimpan potensi bahaya yang dapat membawa bencana apabila kita kurang bijak dalam mengelolanya. Bencana ini tidak hanya yang terjadi secara alami, seperti gempa bumi dan tsunami, namun juga akibat ulah

manusia dalam melakukan pembangunan seperti reklamasi atau alih fungsi lahan pesisir yang tidak ramah lingkungan.

B. Permasalahan

BPSPL Denpasar memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

1. Permasalahan dalam penetapan Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kendala ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dokumen pendukung. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap KKPD yang telah ditetapkan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan KKPD. Selain itu adanya permasalahan tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang, pemanfaatan yang melebihi daya dukung, dan pencemaran. Keadaan seperti ini dapat diatasi dengan pengaturan pemanfaatan ruang pesisir dalam Rencana Zonasi
2. Monitoring pemanfaatan ruang laut untuk mengecek kesesuaian pemanfaatan ruang laut eksisting dengan rencana tata ruang /zonasi. Diperlukan juga perizinan untuk pengendalian pemanfaatan ruang laut yang diwujudkan dengan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL)
3. Pemanfaatan jenis ikan khususnya Hiu dan Pari masih tinggi dan merupakan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Wilayah kerja BPSPL Denpasar merupakan pintu ekspor Hiu dan Pari dengan jumlah dokumen sebanyak 2.412 dokumen sejak tahun 2017 – 2019 baik domestik maupun ekspor. Dalam hal ini BPSPL Denpasar terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan meningkatkan kapasitas SDM, sarana prasarana pelayanan, serta pemenuhan kebutuhan data dan informasi terkait pemanfaatan jenis ikan. Selain itu perlu adanya regulasi yang mengatur PNBP.
4. Belum adanya keseragaman data series keanekaragaman hayati laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar. Perlu adanya metode dan standard yang dibuat untuk pendataan.

5. Ancaman abrasi akibat kerusakan ekosistem mangrove, pemanfaatan kayu mangrove sebagai bahan baku arang serta maraknya alih fungsi lahan pesisir terutama mangrove menjadi tambak, pelabuhan/terminal khusus, pemukiman, industri, dan perkebunan yang mengarah pada tekanan dan penurunan luasan vegetasi mangrove. Perlunya identifikasi lahan mangrove untuk direhabilitasi kembali.
6. Permasalahan terkait terumbu karang yaitu ditemukannya kelompok kapal penangkapan ikan yang melabuhkan jangkarnya di sekitar terumbu karang yang dapat menyebabkan kerusakan pada terumbu karang. Terjadinya kasus penyakit pada terumbu karang yaitu pemutihan karang di Buleleng, Sanur, munculnya hama/predator. Perlu dilakukan monitoring dan sosialisasi secara berkala untuk menanggulangi dan mencegah semakin banyaknya kerusakan karang.
7. Aktivitas nelayan yang menambatkan kapal di sekitar padang lamun menyebabkan lamun dapat tergerus lunas kapal, selain itu ancaman tumpahan minyak hasil buangan kapal serta banyaknya suplai sedimen atau lumpur yang berasal dari daratan atau sungai yang bermuara ke laut yang dapat menyebabkan penempelan pada lamun yang dikhawatirkan mempengaruhi proses fotosintesis dimana dampaknya pada tingkat produktivitas primer yang mempengaruhi kelangsungan hidup organisme.
8. Aktivitas destructive fishing yang masih terjadi di beberapa perairan di Wilayah kerja BPSPL Denpasar. Kegiatan ini juga dapat menyebabkan kerugian yang besar terutama terhadap kelestarian ekosistem perairan yang ada.
9. Pengelolaan sektor garam yang masih terus digalakkan dengan permasalahan rendahnya kualitas garam konsumsi melalui program Peningkatan kualitas garam konsumsi, Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), penyediaan sarana prasarana, dan peningkatan lahan integrasi pegaraman dan sistem tunnel garam. Perlu dilakukan identifikasi terhadap kelompok masyarakat yang dapat mengelola dan memanfaatkan usaha garam.
10. Sebaran potensi, dan kelompok masyarakat pengelola jasa kelautan belum teridentifikasi sepenuhnya. Selain itu, pendampingan terhadap keberlanjutan bantuan pemanfaatan jasa kelautan masih belum optimal.

11. Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik. Perlu adanya peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan, dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem untuk penguatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem.

1.7 Dasar Hukum dan Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPSPL Denpasar Tahun 2023 disusun dengan dasar hukum :

- a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini bertujuan menginformasikan **Capaian Kinerja Pada Tahun Anggaran 2023**. Capaian Kinerja (*Performance Results*) pada Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif,

Pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capain kinerja dan kendala selama tahun 2023.

2. Bab I Pendahuluan,

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

3. Bab II Perencanaan Kinerja,

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja,

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

5. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Adapun Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025, dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (Sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan; (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; (6) Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Fungsi pembangunan kelautan dan perikanan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, diarahkan untuk mengoptimalkan segenap potensi yang ada. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional tersebut, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) menuangkan visi misi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam visi misi Ditjen PRL. Kemudian BPSPL Denpasar di bawah Ditjen PRL menyusun pula visi misi yang sinergis untuk mewujudkan Pembangunan Kelautan dan Perikanan.

Rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra KKP) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi KKP, yang disusun dengan berpedoman kepada RPJMN dan dapat

direviu sesuai aturan yang berlaku. Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan di antaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil perikanan kelautan, dan petambak garam, dan para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya. Sebagai tindak lanjut dari visi dan arahan Presiden, maka disusun Renstra KKP 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020. Adapun visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari Sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden meliputi (1) “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”; (2) “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”; (3) “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan (4) “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Untuk mendukung Renstra KKP 2020-2024, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menyusun Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 01 Tahun 2021. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka visi Ditjen PRL 2020-2024 adalah “Pengelolaan Ruang Laut yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya visi KKP”. Adapun misi DJPRL meliputi (1) Peningkatan kontribusi ekonomi sub sektor kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil; (2) Peningkatan kelestarian sumber daya kelautan, pesisir dan pulaupulau kecil; dan (3)

Peningkatan tata Kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen PRL. Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai oleh Dtjen PRL sebagai suatu hasil atau dampak dari beberapa program yang dilaksanakan dari pelaksanaan program pengelolaan ruang laut dan program dukungan manajemen. Sasaran Ditjen PRL 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
 - a. Sasaran “Kesejahteraan petambak garam meningkat”
 - b. Sasaran “Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan meningkat”
 - c. Sasaran “Meningkatnya lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan”
 - d. Sasaran “Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat”
 - e. Sasaran “Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT”
 - f. Sasaran program “Masyarakat hukum adat, masyarakat tradisioal, dan masyarakat local di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan diKatkan kelembagaannya”
 - g. Sasaran “Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat”
2. Program Kualitas Lingkungan Hidup
 - a. Sasaran “Pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan”
 - b. Sasaran “Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan”
 - c. Sasaran “Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali”
 - d. Sasaran “Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat”.
3. Program Dukungan Manajemen
 - a. Sasaran “Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PRL”.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJPRL, BPSPL Denpasar memiliki tugas untuk mendukung sasaran strategis DJPRL. Visi Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar adalah “Pengelolaan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar menuju terwujudnya Visi Ditjen PRL“, sedangkan penjabaran misi dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar adalah: (1)

Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar; (2) Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar; (3) Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar; (4) Perencanaan Ruang Laut di Wilayah BPSPL Denpasar; (5) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan di lingkup BPSPL Denpasar.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Adapun tujuan pengelolaan ruang laut adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 2) Meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 3) Menata dan memanfaatkan jasa-jasa kelautan;
- 4) Meningkatkan pengelolaan sumber daya hayati, non hayati dan buatan;
- 5) Melestarikan kawasan konservasi dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman haya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Upaya Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024, yang dilaksanakan melalui Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, maka BPSPL Denpasar telah menyusun Program beserta sasaran dan indikator kinerja yang mendukung Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerja BPSPL Denpasar 2020 – 2024 dapat dilihat pada matriks dibawah ini:

Tabel 6. Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Denpasar 2020-2024

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP								
1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Denpasar	1	Luas kawasan konservasi yang diusulkan penetapannya di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Ha)	6.379,27	20.767,11	20.767,11	20.767,11	20.767,11
2	Meningkatnya pengelolaan	2	Jenis ikan terancam punah	5	5	5	5	5

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
	keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Denpasar		yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Jenis)					
3	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Denpasar	3	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	5	6	6	6	6
4	Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	4	Kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kelompok)	1	4	4	4	4
		5	Kesepakatan Jejaring, Kemitraan /Kerjasama dan Konvensi dalam mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kesepakatan)	1	1	1	1	1
5	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar	6	Kawasan penanaman mangrove yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (kawasan)	10	10	10	10	10
		7	Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kawasan)	10	10	10	10	10
		8	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kawasan)	0	0	0	1	1

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
6	Meningkatnya Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi penanggulangan pencemarannya di wilayah kerja Denpasar	9	kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diidentifikasi dan /atau fasilitasi dalam rangka pengendalian pencemaran di wilayah kerja BPSPL Denpasar (kawasan)	1	0	1	1	1
7	Meningkatnya ketangguhan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah kerja BPSPL Denpasar	10	kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diidentifikasi kerentanannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah kerja BPSPL Denpasar (kawasan)	0	0	0	1	1
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN								
8	Meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar	11	Laporan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut, Penyelenggaraan KKPRL/Insentif Pemanfaatan Ruang Laut BPSPL Denpasar (dokumen)	0	0	1	1	1
9	Terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk peningkatan kualitas garam di wilayah kerja BPSPL Denpasar	12	Sarana dan/atau prasarana di Kawasan garam terpadu yang dibangun di wilayah kerja BPSPL Denpasar (unit)	4	0	1	1	1
10	Terkelolanya Biofarmakologi di wilayah kerja BPSPL Denpasar	13	Laporan Identifikasi potensi biota laut non komersil yang dapat dimanfaatkan untuk Biofarmakologi dan desa pangan laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar (dokumen)	0	0	1	1	1
11	Terkelolanya kawasan wisata bahari di wilayah kerja BPSPL Denpasar	14	Kawasan pengembangan wisata bahari yang diidentifikasi di wilayah kerja	0	0	0	1	1

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
		BPSPL Denpasar (Kawasan)					
12	Meningkatnya Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil/Terluar yang difasilitasi sarana dan prasarana di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	15 Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang difasilitasi sarana dan prasarananya di Wilayah kerja BPSPL Denpasar (lokasi)	0	0	0	1	1
13	Meningkatnya Pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Denpasar	16 Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Denpasar (pulau)	0	0	0	1	1
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
14	Tatakelola pemerintahan yang baik di BPSPL Denpasar	17 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Denpasar (%)	0	72,5	72,5	72,5	72,5
		18 Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Denpasar (indeks)	72	73	74	75	76
		19 Nilai WBK BPSPL Denpasar (Nilai)	72	76	76	78	78
		20 Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPSPL Denpasar (%)	90	91	91	92	92
		21 Persentase unit kerja BPSPL Denpasar yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90
		22 Rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Denpasar yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	60	65	70	75	80
		23 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPL Denpasar (Nilai)	88	89	89	90	90
		24 Nilai Kinerja Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	85	86	87	88	89
		25 Persentase penyelesaian temuan LHP BPK	100	100	100	100	100

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
		BPSPL Denpasar (%)					

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD), swasta, perbankan dan nonperbankan, dan masyarakat. Pendanaan APBN hanya bersifat stimulus dan difokuskan pada beberapa kegiatan pokok yang menjadi kewenangan pusat.

Indikator kinerja dan indikasi pendanaan BPSPL Denpasar 2020-2024 disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024, dan belum memperhitungkan dampak pandemik global covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 dan dinamika kebijakan lainnya yang dapat muncul atau berubah pada kurun waktu 2020-2024.

2.2 Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Dalam upaya mendukung visi, misi, dan *grand strategy* KKP dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL), BPSPL Denpasar menguraikan penjabaran visi misi yang dituangkan dalam kegiatan dan Indikator Kinerja (IK). Oleh karena itu, pelaksanaan Tugas dan kegiatan yang menjadi kewenangan BPSPL Denpasar berpedoman pada sasaran kegiatan yang di turunkan pada IK sebagai target yang akan dicapai selama periode tahun anggaran. Dalam perkembangannya, perjanjian kinerja BPSPL Denpasar mengalami penyesuaian sebanyak dua kali. Perjanjian Kinerja awal disahkan pada tanggal 9 Januari 2023, kemudian perubahan perubahan pertamanya disahkan pada tanggal 2 Agustus 2023 yang dilakukan karena pergantian Kepala Balai BPSPL Denpasar. Lebih lanjut, terdapat perubahan kedua atau terakhir pada 30 November 2023 dengan adanya penghapusan Indikator Kinerja Utama yang anggarannya diblokir dan/atau dihapus yaitu IKU 4 Kelompok masyarakat di kawasan konservasi daerah pada wilayah kerja BPSPL Denpasar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok) dan IKU 7 Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di wilayah kerja BPSPL Denpasar (kawasan) serta peningkatan target IK 9 Nilai Indikator

Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai) dari target semula 89 menjadi 93,75; hingga akhirnya pada triwulan IV 2023 terdapat tujuh (7) sasaran kegiatan dan enam belas (16) indikator kinerja yang dimandatkan kepada BPSPL Denpasar.

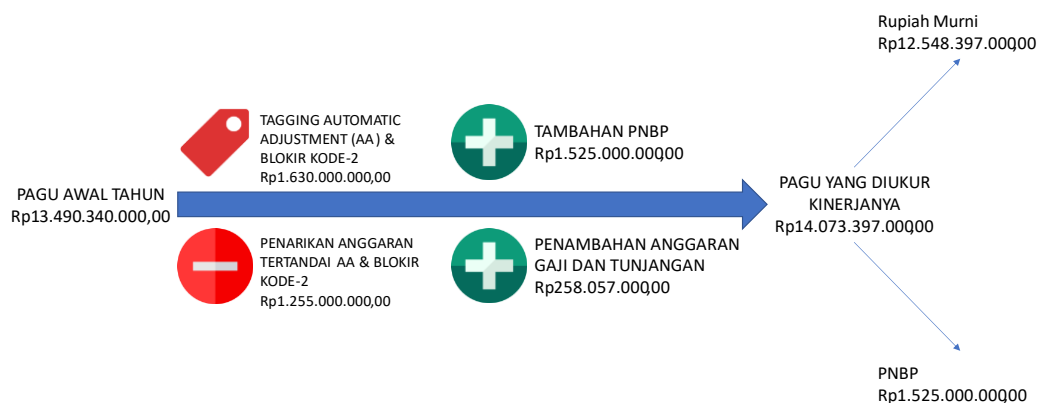
Pagu anggaran BPSPL Denpasar pada awal tahun 2023 adalah Rp13.490.340.000,00. Dalam perkembangannya, terdapat arahan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 perihal penambahan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023, yang menginstruksikan Kementerian/Lembaga untuk menyisihkan anggaran. *Automatic Adjustment* dilakukan karena mempertimbangkan kondisi geopolitik global. Menindaklanjuti hal tersebut, BPSPL Denpasar melakukan penyisihan anggaran sebesar Rp 1.200.000.000,00. Selain itu dilakukan pula blokir anggaran pada kegiatan yang dokumen pendukungnya belum dipenuhi yaitu pada kegiatan Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan Secara Berkelanjutan sebesar Rp 375.000.000,00 dan Prasarana/Infrastruktur di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar sebesar Rp 55.000.000,00 Adapun penyisihan tersebut tidak mempengaruhi pagu anggaran.

Lebih lanjut, Menteri Keuangan Republik Indonesia menyampaikan Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-687/MK.02/2022 tanggal 15 Agustus 2022. Di lingkup DJPRL, dana PNBP yang dapat digunakan adalah 71% dari target DJPRL untuk tahun 2023, 16% dari target DJPRL untuk tahun 2024, dan 10% dari target DJPRL untuk 2025. Atas hal tersebut, pada tahun 2023 ini terdapat penambahan pagu anggaran BPSPL Denpasar yang bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1.525.000.000,00 yang mana merupakan hasil pembagian dari PNBP DJPRL yang disetujui untuk digunakan tahun ini. Adanya dinamika komposisi anggaran tersebut tidak mengubah rincian target dan perjanjian kinerja BPSPL Denpasar tahun anggaran 2023.

Kemudian, mengacu pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-371/MK.2/2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Relaksasi Non Belanja Pegawai dari *Automatic Adjustment*

Belanja K/L TA 2023, terdapat realokasi anggaran Kementerian/Lembaga TA 2023 yang terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Adapun realokasi tersebut akan mengurangi pagu Kementerian/Lembaga terkait dan tidak diperhitungkan dalam kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2023. Bersamaan dengan itu terdapat penambahan anggaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp258.057.000,00. Sehubungan hal tersebut, total pagu anggaran BPSPL Denpasar yang diperhitungkan kinerja pengelolaannya pada tahun 2023 adalah Rp14.073.397.000,00 yang bersumber dari rupiah murni sejumlah Rp12.548.397.000,00 dan PNPB sejumlah Rp1.525.000.000,00.

Gambar 2. Dinamika Komposisi Pagu Anggaran BPSPL Denpasar 2023



Adanya perubahan komposisi anggaran tersebut juga berimplikasi pada dilakukannya perubahan Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar kedua tahun 2023. Dengan ditariknya anggaran tertandai AA & blokir kode-2 mengakibatkan terjadi perubahan pada indikator kinerja dan targetnya pada perubahan kedua yaitu dihapusnya IKU 4 Kelompok masyarakat di kawasan konservasi daerah pada wilayah kerja BPSPL Denpasar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok) dan IKU 7 Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di wilayah kerja BPSPL Denpasar (kawasan). Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar perubahan kedua menjadi Perjanjian Kinerja yang diperhitungkan dalam pengukuran kinerja tahun 2023. Perjanjian Kinerja tersebut disajikan secara lengkap pada Tabel 7.

Tabel 7. Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar Tahun 2023

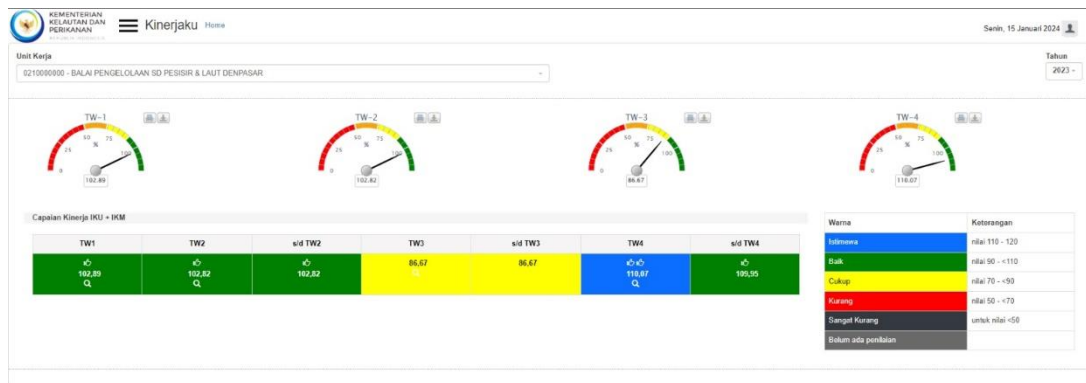
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	1. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	3
2.	Terwujudnya Kawasan Konservasi yang Ditetapkan di Tingkat Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	2. Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Daerah)	1
3.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	3. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kelompok)	2
4.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	4. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	6
5.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	5. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	5
6.	Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Denpasar	6. Nilai PNBP BPSPL Denpasar (Rp.000)	850.000
7.		7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	93,75

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar	Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	
	8. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	82
	9. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai)	75
	10. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)	85
	11. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	75
	12. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	4
	13. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Denpasar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92
	14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Denpasar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
	15. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)	100
	16. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Denpasar (%)	77,5

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Denpasar BPSPL Denpasar dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja BPSPL Denpasar terdiri dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja (IK). Pada Tahun 2023 Nilai Perolehan Sasaran Strategis (NPSS) IKU+IKM diperoleh nilai 109,95 (baik).



Gambar 3. NPSS BPSPL Denpasar

Tabel 8. Target dan Realisasi BPSPL Denpasar Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	FREKUENSI	TARGET	Tahun 2023		
				TARGET	REALISASI	%KINERJAKU
IKU 1	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	Tahunan	3	3	3	100
IKU 2	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Daerah)	Tahunan	1	1	1	100
IKU 3	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kelompok)	Triwulan	2	2	2	100
IKU 4	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	Tahunan	6	6	9	120
IKU 5	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	Tahunan	5	5	7	120
IKU 6	Nilai PNPB BPSPL Denpasar (Rp.000)	Tahunan	850.000	850.000	3.037.033,914	120
IK 07	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	Semester	93,75	93,75	89,95	95,95
IK 08	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	Semester	82	82	87,39	106,57
IK 09	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai)	Tahunan	75	75	87,57	116,76
IK 10	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)	Semester	85	85	90,43	106,39
IK 11	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	Tahunan	75	75	84,2	112,27

NO	INDIKATOR KINERJA	FREKUENSI	TARGET	Tahun 2023		
				TARGET	REALISASI	%KINERJAKU
IK 12	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	Triwulan	4	4	4	100,00
IK 13	Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Denpasar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	Triwulan	92	92	133,33	120
IK 14	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Denpasar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	Triwulan	75	75	100	120,00
IK 15	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)	Tahunan	100	100	100	100
IK 16	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Denpasar (%)	Tahunan	77,5	77,5	93,33	120

IKU 1. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya kegiatan pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang dilakukan melalui kegiatan identifikasi/verifikasi, sosialisasi dan monitoring pemanfaatan ruang laut.

Terdapat 3 kegiatan pendukung untuk pemenuhan IKU 1 BPSPL Denpasar yaitu kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut, dan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang terdiri dokumen identifikasi/verifikasi, sosialisasi dan monitoring pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 9. Capaian IKU 1 BPSPL Denpasar TW IV

SK 1	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar							
IKU 1	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)							
Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023						Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2022 (%)	Target PK 2023	% Realisasi Thd PK	Target 2023	% Capaian Thd Renstra
-	3	3	100	-	3	100	-	-

A. Capaian IKU Triwulan IV Tahun 2023

Pada triwulan IV, target IKU telah tercapai sesuai target yaitu 100%, dari target 3 dokumen telah tercapai 3 dokumen berupa 1 dokumen yang mencakup kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, 1 dokumen yang mencakup kegiatan Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut, dan 1 dokumen yang mencakup kegiatan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV 2022 dan Triwulan IV 2023

Tidak terdapat Target IKU 1 pada Triwulan IV 2022 sehingga capaian tidak dapat dibandingkan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV dengan Renstra BPSPL Denpasar

Tidak terdapat Target IKU 1 dalam Renstra 2020-2024 sehingga capaian tidak dapat dibandingkan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator ini adalah secara bertahap telah dilakukan beberapa hal. Kegiatan tersebut yaitu sosialisasi pemanfaatan ruang laut yang meliputi Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Coaching Clinic Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut; monitoring pemanfaatan ruang laut yang meliputi monitoring dan identifikasi pemanfaatan ruang laut Triwulan I, II, III, dan IV; dan verifikasi permohonan izin pemanfaatan ruang laut di Provinsi Bali, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

b. Analisis Kegagalan

Terdapat faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini ataupun dalam pelaksanaan penyelenggaraan perizinan pemanfaatan ruang laut, yaitu :

- Masih banyak Pelaku Usaha yang belum terdata di Dinas setempat sehingga pelaksanaan Sosialisasi memerlukan tahap tambahan yaitu pengumpulan data pengusaha
- Tidak terdapat persamaan persepsi dalam teknis kegiatan monitoring pemanfaatan ruang laut
- Permasalahan *error* di dalam OSS yang mengakibatkan terhambatnya pengurusan PKKPRL melalui OSS oleh pelaku usaha.

c. Solusi

Solusi yang dapat diberikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah :

- Melakukan pendataan pelaku usaha secara terus menerus
- Mengusulkan SOP monitoring pemanfaatan ruang laut agar terstrukturnya teknis pengendalian pemanfaatan ruang laut

- Koordinasi dengan Ditjen PRL terkait permasalahan OSS dan coaching clinic terhadap pengusaha mengenai teknis pengurusan izin PKKPR.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya meliputi penggunaan anggaran dan pelibatan Dinas terkait, NGO, tenaga ahli, dan masyarakat untuk mendukung kegiatan pada lokasi yang ditentukan

F. Kegiatan Pendukung

Dalam pencapaian indikator kinerja hingga Triwulan IV tahun 2023 ini, kegiatan yang telah dilakukan adalah :

1. Sosialisasi pemanfaatan ruang laut yaitu sosialisasi dan Coaching Clinic Pemanfaatan Ruang Laut di Bali sebanyak satu kali, Jawa Timur sebanyak 2 kali, NTT sebanyak 1 kali, dan NTB sebanyak 1 kali. Berikut rincian pelaksanaan sosialisasi tersebut:

Tabel 10. sosialisasi dan Coaching Clinic Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar Tahun 2023

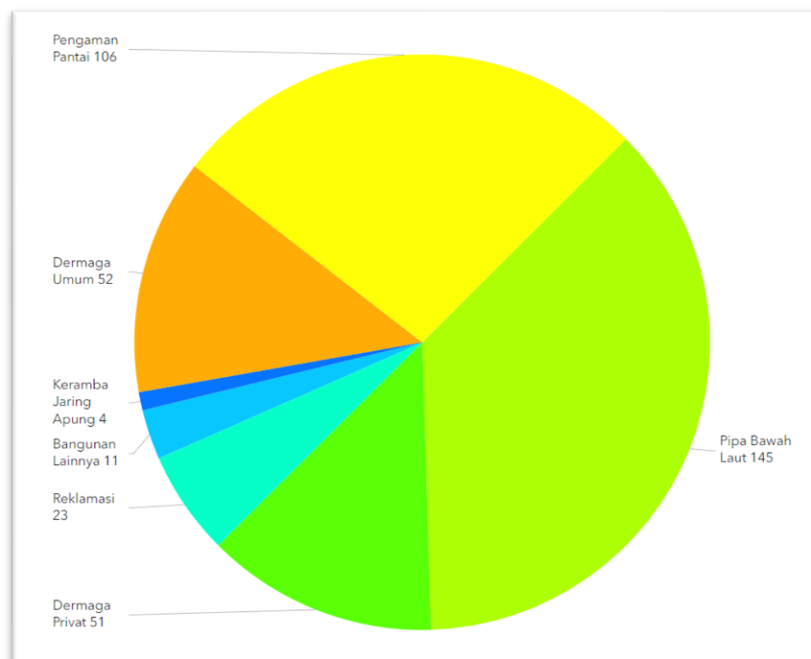
No.	Provinsi	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi
1	Bali	Selasa, 14 Maret 2023	Grand Palace Hotel, Denpasar
2	Jawa Timur	Kamis, 8 Juni 2023	Shangri-La Hotel, Surabaya
3	Jawa Timur	Selasa, 19 September 2023	Illira Hotel, Banyuwangi
4	Nusa Tenggara Barat	Selasa, 17 Oktober 2023	Lombok Astoria Hotel, Mataram
5	Nusa Tenggara Timur	Rabu, 08 November 2023	Luwansa Beach Resort, Manggarai Barat

2. Monitoring pemanfaatan ruang laut yaitu monitoring dan identifikasi pemanfaatan ruang laut yang dilaksanakan pada Bulan Februari - Desember 2023 dengan sasaran seluruh pelaku usaha yang terdapat di wilayah kerja BPSPL Denpasar yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi, NTB, dan Provinsi NTT dengan pembuatan dashboard pemanfaatan ruang laut pada rincian berikut:

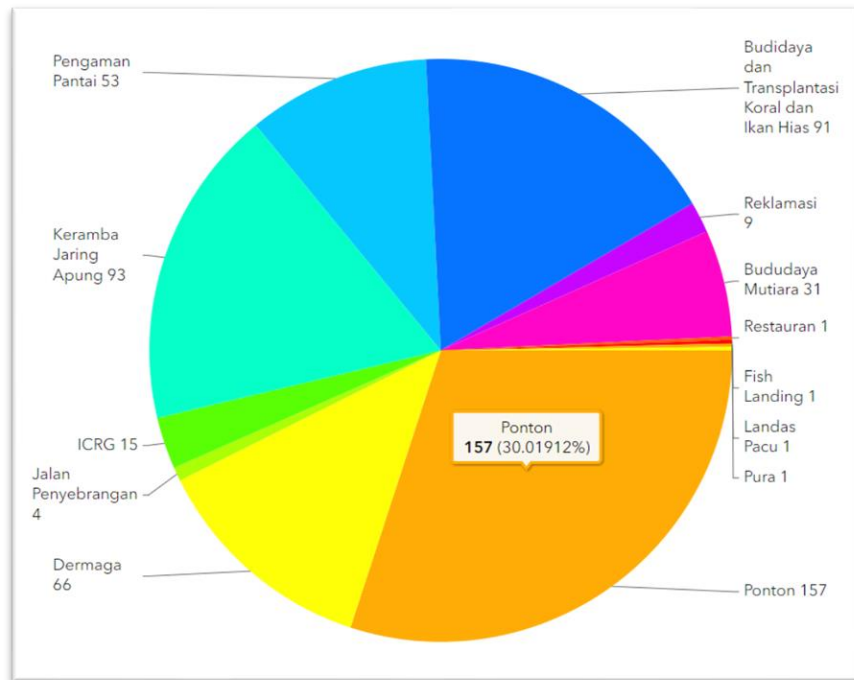
Tabel 11. Rekapitulasi Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar Tahun 2023

NO	Provinsi	Jumlah Pemanfaatan Ruang Laut	Izin Lokasi	PKKPRL Terbit	KKPRL Terbit	Tautan
1	Jawa Timur	392	8	68	8	bit.ly/DASHBOARDKKPRLJATIM
2	Bali	532	0	81	6	bit.ly/DASHBOARDKKPRLBALI
3	Nusa Tenggara Barat	269	3	94	13	bit.ly/DASHBOARDKKPRLNTB
4	Nusa Tenggara Timur	321	3	18	0	bit.ly/DASHBOARDKKPRLNTT
TOTAL		1.514	14	261	27	

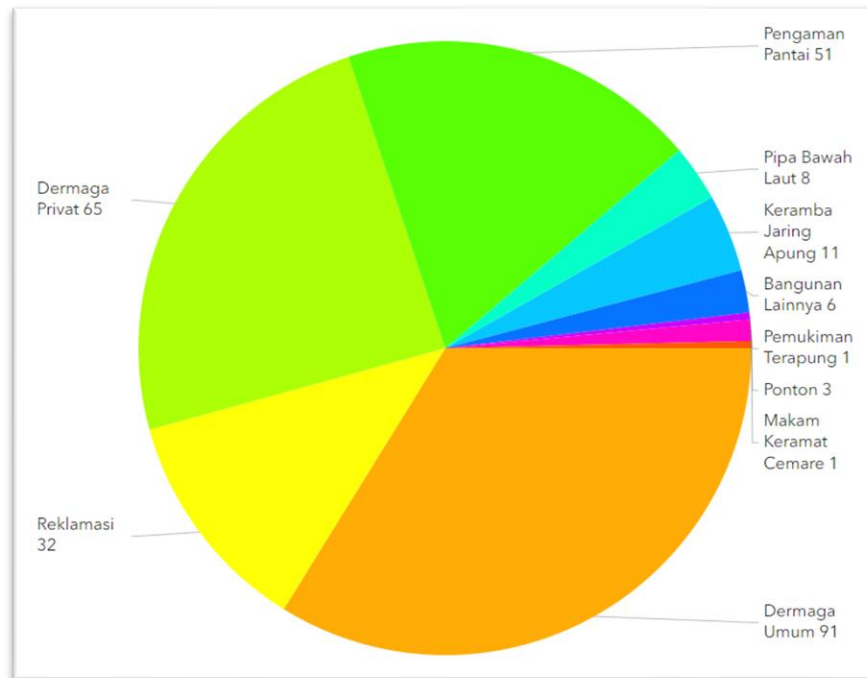
Grafik 6. Dominasi Jenis Pemanfaatan Ruang Laut Jawa Timur



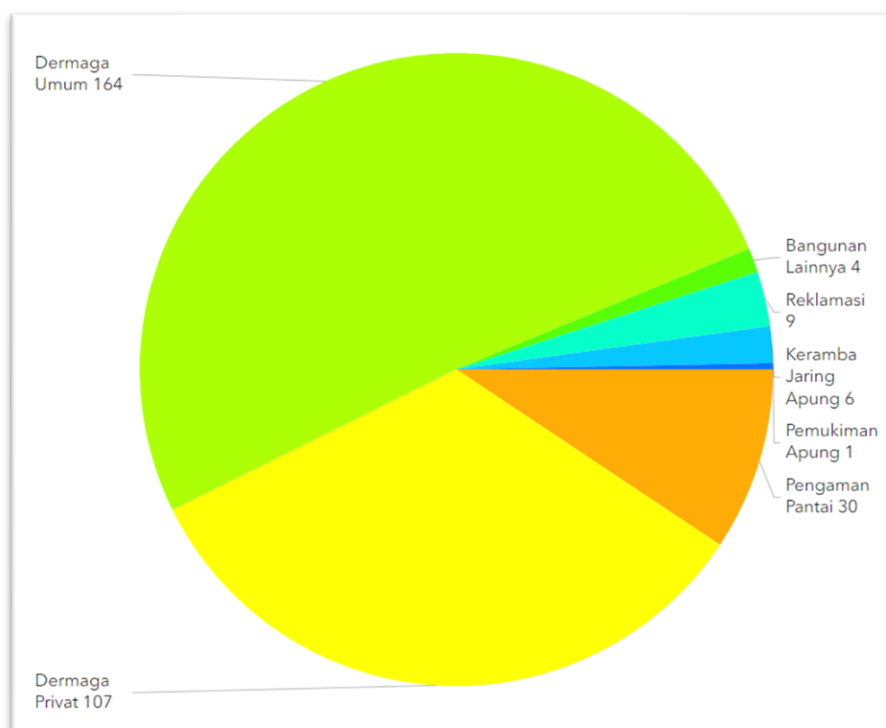
Grafik 7. Dominasi Jenis Pemanfaatan Ruang Laut Provinsi Bali



Grafik 8. Dominasi Jenis Pemanfaatan Ruang Laut Provinsi NTB



Grafik 9. Dominasi Jenis Pemanfaatan Ruang Laut Provinsi NTT

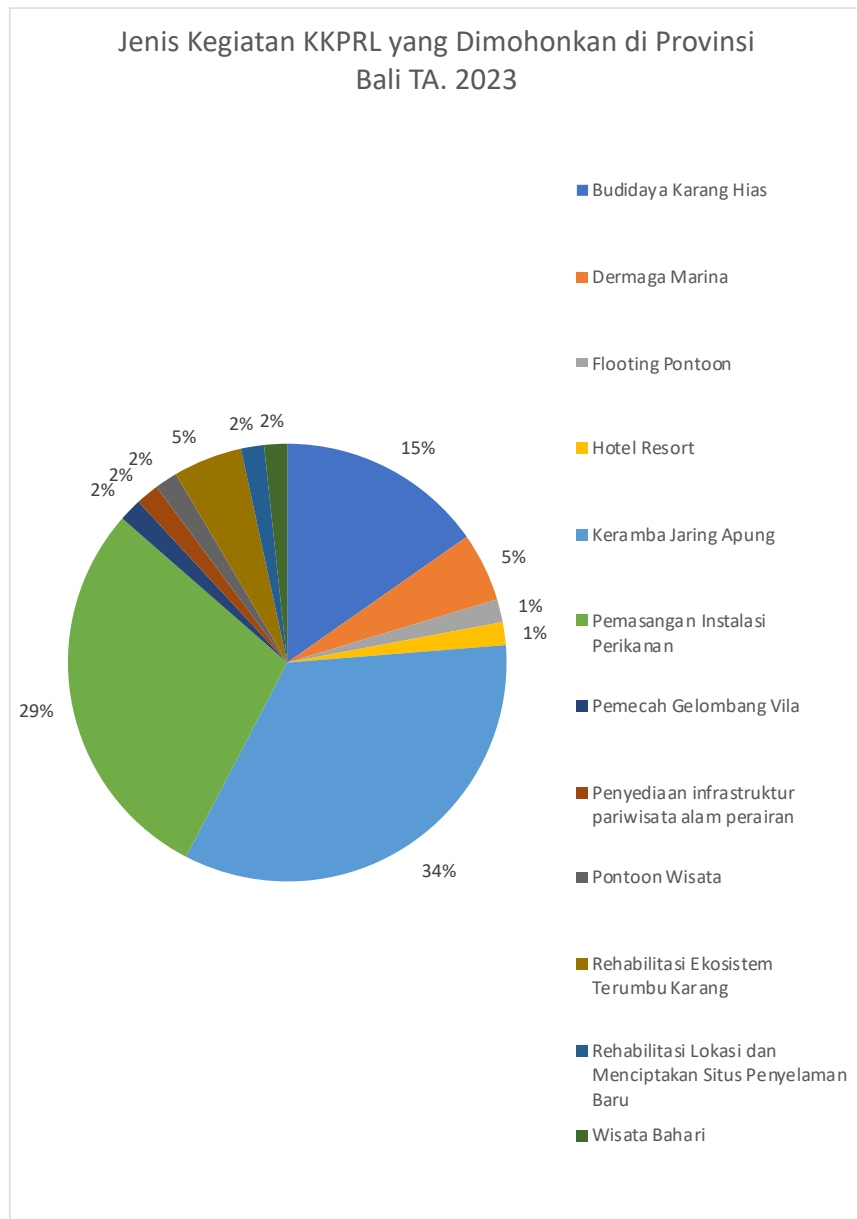


3. Verifikasi permohonan izin pemanfaatan ruang laut di Provinsi Bali, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan rincian pelaksanaan verifikasi tersebut sebagai berikut:

- Verifikasi permohonan izin pemanfaatan ruang laut di Provinsi Bali

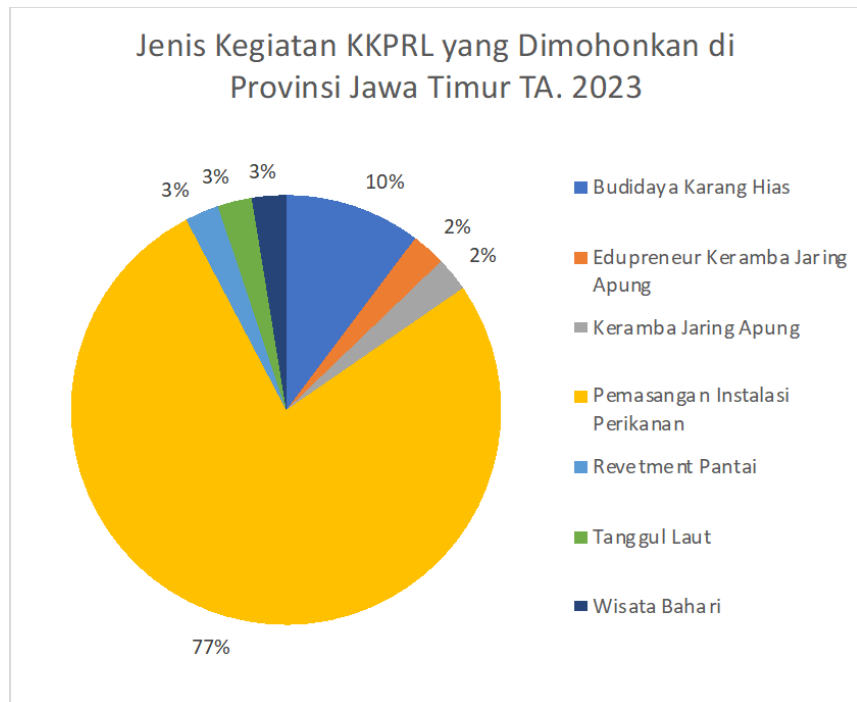
Permohonan KKPRL yang diajukan selama tahun 2023 di Provinsi Bali didominasi oleh beberapa kegiatan yaitu keramba jaring apung 20 permohonan, pemasangan instalasi perikanan 17 permohonan, budidaya karang hias 9 permohonan, dermaga marina 3 permohonan, rehabilitasi ekosistem terumbu karang 3 permohonan, floating pontoon 1 permohonan, hotel resort 1 permohonan, pemecah gelombang vila 1 permohonan, penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan 1 permohonan, pontoon wisata, rehabilitasi lokasi dan menciptakan situs penyelaman baru 1 permohonan, dan wisata bahari 1 permohonan.

Grafik 10. Persentase Jenis Kegiatan yang Memohonkan KKPRL di Provinsi Bali TA. 2023



- Verifikasi permohonan izin pemanfaatan ruang laut di Provinsi Jawa Timur
 Permohonan KKPRL yang diajukan selama tahun 2023 di Provinsi Jawa Timur didominasi oleh beberapa kegiatan yaitu pemasangan instalasi perikanan 30 permohonan, budidaya karang hias 4 permohonan, edupreneur keramba jaring apung 1 permohonan, keramba jaring apung 1 permohonan, revetment pantai 1 permohonan, tanggul laut 1 permohonan, dan wisata bahari 1 permohonan

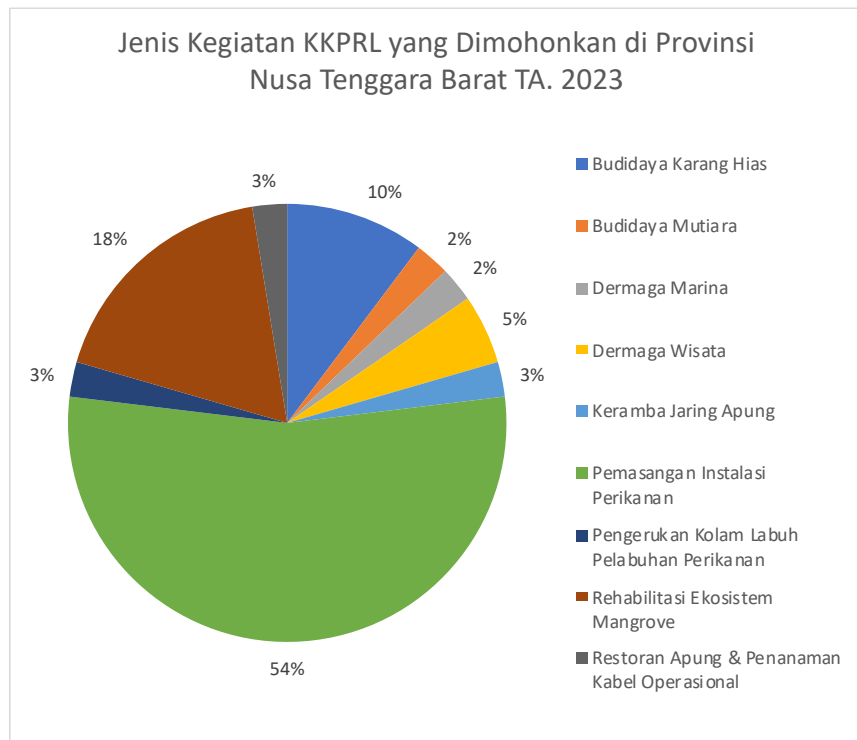
Grafik 11. Persentase Jenis Kegiatan yang Memohonkan KKPRL di Provinsi Jawa Timur TA. 2023



- Verifikasi permohonan izin pemanfaatan ruang laut di Provinsi NTB

Permohonan KKPRL yang diajukan selama tahun 2023 di Provinsi Nusa Tenggara Barat didominasi oleh beberapa kegiatan yaitu pemasangan instalasi perikanan 21 permohonan, rehabilitasi ekosistem mangrove 7 permohonan, budidaya karang hias 4 permohonan, dermaga wisata 2 permohonan, budidaya mutiara 1 permohonan, dermaga marina 1 permohonan, keramba jaring apung 1 permohonan, pengerukan kolam labuh pelabuhan perikanan 1 permohonan, dan restoran apung & penanaman kabel operasional 1 permohonan. baru 1 permohonan, dan wisata bahari 1 permohonan.

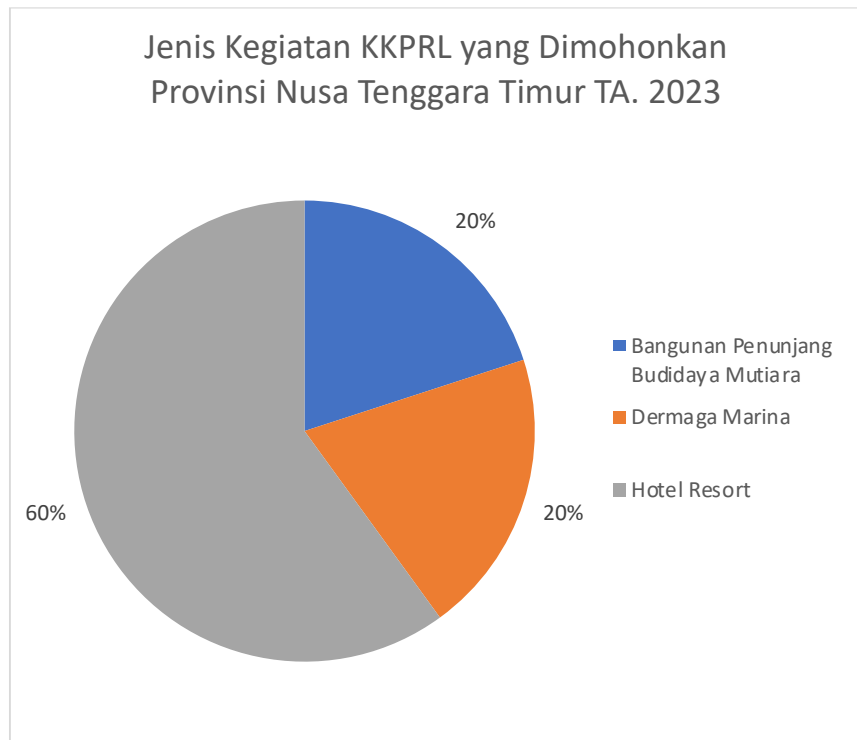
Grafik 12. Persentase Jenis Kegiatan yang Memohonkan KKPRL di Provinsi NTB TA. 2023



- Verifikasi permohonan izin pemanfaatan ruang laut di Provinsi NTT

Permohonan KKPRL yang diajukan selama tahun 2023 di Provinsi Nusa Tenggara Timur didominasi oleh beberapa kegiatan yaitu hotel resort 3 permohonan, dermaga marina 1 permohonan, dan bangunan penunjang budidaya mutiara 1 permohonan

Grafik 13. Persentase Jenis Kegiatan yang Memohonkan KKPRL di Provinsi NTT TA. 2023



Tabel 12. Kegiatan Pendukung IKU 1

No.	Kegiatan	Dokumentasi
1.	Sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang laut	

2.	Monitoring pemanfaatan ruang laut	<p>18 Des 2023 12.37.20 226° SW Jalan Tol Bali Mandara Kabupaten Badung Bali Altitude: 34.5m Speed: 0.0km/h Index number: 41</p>
3.	Verifikasi permohonan izin pemanfaatan ruang laut	

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Adapun tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pendukung IKU 1 di tahun berikut adalah :

- Melakukan pendataan pelaku usaha secara terus menerus
- Melakukan pendataan pelaku usaha secara terus menerus
- Mengusulkan SOP monitoring pemanfaatan ruang laut agar terstruktur teknis pengendalian pemanfaatan ruang laut
- Koordinasi dengan Ditjen PRL terkait permasalahan OSS.

H. Realisasi Anggaran

Tabel 13. Realisasi Anggaran IKU 1

No.	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	1.550.000.000	1.544.847.394	99,67

IKU 2. Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Daerah)

Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil adalah provinsi yang didampingi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi dapat melalui pendampingan penyusunan rencana zonasi, pendampingan penyusunan rencana pengelolaan atau pendampingan lain yang sesuai dengan kondisi kawasan konservasi.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan daerah di wilayah kerja BPSPL Denpasar yang didampingi dalam proses percepatan usulan penetapan Kawasan Konservasi-nya.

Tabel 14. Capaian IKU 2 BPSPL Denpasar TW IV

SK 2	Terwujudnya Kawasan Konservasi yang Ditetapkan di Tingkat Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar							
IKU 2	Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Daerah)							
Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023						Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2022 (%)	Target PK 2023	% Realisasi Thd PK	Target 2023	% Capaian Thd Renstra
2	1	1	100	100	1	100	-	-

A. Capaian IKU Triwulan IV Tahun 2023

Terdapat 1 pencapaian target pendampingan daerah pada akhir tahun 2023 (tercapai 100%). Pendampingan daerah yang diselesaikan tahun 2023 berupa dukungan kepada Pemda Provinsi untuk mengakselerasi proses penetapan Kawasan Konservasi Daerah (KKD) yang menjadi target, yaitu Kawasan Konservasi Pulau Ende dan sekitarnya di Provinsi NTT.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV 2022 dan Triwulan IV 2023

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, capaian tahun 2022 lebih unggul 100% karena pada tahun 2022 tercapai melebihi target (dari 1 target tercapai 2) sedangkan pada tahun 2023 capaian tidak melebihi target. Capaian tahun 2022 lebih tinggi karena pada tahun 2022 terdapat permintaan pendampingan di luar target.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV dengan Renstra BPSPL Denpasar

Pada Renstra BPSPL Denpasar target tertuang dalam satuan luasan (20.767,11 Ha) sedangkan pada IKU 2 target tertuang dalam satuan jumlah daerah (1 daerah) sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator ini adalah secara keseluruhan selama tahun 2023 telah berhasil dilakukan pendampingan kepada Pemda Provinsi untuk mengakselerasi proses penetapan Kawasan Konservasi Daerah (KKD) yang menjadi target, yaitu Kawasan Konservasi Pulau Ende dan sekitarnya di Provinsi NTT dengan 1) Inisiasi Rapat awal persiapan penyusunan dokumen awal RZ KK Pulau Ende dan sekitarnya dan 2) Survei biofisik di Perairan Selatan Ende dan pemetaan partisipatif lokasi penting biota laut dilindungi dan perikanan gurita.

b. Analisis Kegagalan

Terdapat faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini ataupun dalam pelaksanaan penetapan KKP3K yaitu anggaran yang tersisa pasca pelaksanaan Survei Biofisik di Ende cukup minim, sedangkan tim penetapan KKP3K sering mendapatkan penugasan terkait kawasan konservasi di luar target outputnya.

c. Solusi

Solusi yang dapat diberikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah :

- Memilih-milih kegiatan yang diikuti oleh tim Penetapan KKP3K yang mendukung pencapaian output sesuai ketersediaan anggaran.

- Berkonsultasi dengan pimpinan terkait penggunaan anggaran ketika mendapatkan disposisi/penugasan di luar target output utamanya.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya meliputi penggunaan anggaran dan pelibatan Dinas terkait, NGO, dan masyarakat untuk mendukung kegiatan pada lokasi yang ditentukan.

F. Kegiatan Pendukung

Dalam pencapaian indikator kinerja hingga Triwulan IV tahun 2023 ini, kegiatan yang telah dilakukan adalah :

1. Inisiasi Rapat awal persiapan penyusunan dokumen awal RZ KK Pulau Ende dan sekitarnya
2. Survei biofisik di Perairan Selatan Ende dan pemetaan partisipatif lokasi penting biota laut dilindungi dan perikanan gurita

Tabel 15. Kegiatan Pendukung IKU 2

No.	Kegiatan	Dokumentasi
1	Inisiasi Rapat awal persiapan penyusunan dokumen awal RZ KK Pulau Ende dan sekitarnya	
2	Survei biofisik di Perairan Selatan Ende dan pemetaan partisipatif lokasi penting biota laut dilindungi dan perikanan gurita	

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Adapun tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pendukung IKU 2 adalah melanjutkan kegiatan pendampingan proses penetapan Kawasan Konservasi Daerah yang diamanatkan oleh pusat.

H. Realisasi Anggaran

Tabel 16. Realisasi Anggaran IKU 2

No.	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
-----	-----	-----------	----------------	---------------

2	Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Daerah)	100.000.000	99.999.399	100,00
---	--	-------------	------------	--------

IKU 3. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kelompok)

Bantuan Pemerintah merupakan bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah. Bantuan Konservasi merupakan bantuan penyediaan sarana dan prasarana konservasi yang bertujuan untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi, diberikan pada kelompok masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan, pengawasan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati laut secara berkelanjutan. Tata cara pemberian bantuan mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan kelompok masyarakat yang diberikan bantuan konservasi sesuai tahapan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut no. 49 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi tahun 2023.

Tabel 17. Capaian IKU 3 BPSPL Denpasar TW IV

SK 3	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar							
IKU 3	Bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kelompok)							
Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023						Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2022 (%)	Target PK 2023	% Realisasi Thd PK	Target 2023	% Capaian Thd Renstra
3	2	2	100	-33,33	2	100	4	175

A. Capaian IKU Triwulan IV Tahun 2023

Hingga triwulan IV, target IKU telah tercapai 100%. Hingga Triwulan IV ditargetkan sebanyak 2 Kelompok menerima bantuan dengan realisasi sebanyak 2 kelompok menerima bantuan. Pemberian bantuan kompak tahun 2023 diserahkan kepada Kelompok Konservasi Penyu Segoro Lestari Blitar dan POKMASWAS Penimbangan Lestari Buleleng.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV 2022 dan Triwulan IV 2023

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, capaian tahun 2022 lebih unggul 33,33% karena pada tahun 2022 IKU memiliki target yang lebih tinggi daripada target IKU pada tahun 2023 meskipun capaian IKU tersebut sama-sama 100%. Capaian tahun 2022 lebih tinggi karena pada tahun 2022 anggaran yang disediakan berbanding lurus dengan target yang harus di capai. Pada tahun 2022 untuk IKU dianggarkan Rp. 382.470.000,- untuk mencapai target 3 kelompok, sedangkan pada tahun 2023 untuk IKU dianggarkan Rp. 200.000.000,- untuk mencapai target 3 kelompok (anggaran dan target lebih rendah).

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV dengan Renstra BPSPL Denpasar

Target kelompok yang diberikan bantuan tahun 2023 pada renstra 2020-2024 adalah 4 kelompok. Pada tahun 2023 akhir Triwulan IV telah tercapai penyerahan bantuan kepada 2 kelompok, jika ditambah penyerahan bantuan yang terlaksana pada tahun 2021 (tercapai penyerahan bantuan kepada 2 kelompok) dan tahun 2022 (tercapai penyerahan bantuan kepada 3 kelompok) maka pada tahun 2023 ini IKU 3 pada renstra 2020-2024 telah tercapai 175%.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator ini adalah telah berhasil dilakukan rangkaian kegiatan serah terima bantuan KOMPAK kepada Kelompok Konservasi Penyu Segoro Lestari (Blitar, Jawa Timur) dan POKMASWAS Penimbangan Lestari (Buleleng, Bali).

b. Analisis Kegagalan

Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti dan kegiatan berjalan secara lancar.

d. Solusi

Tidak ada permasalahan yang perlu diselesaikan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya meliputi penggunaan anggaran dan pelibatan Dinas terkait, Universitas, dan masyarakat untuk menjalin kerjasama, jejaring, dan kemitraan di lokasi yang telah ditentukan.

F. Kegiatan Pendukung

Dalam pencapaian indikator kinerja hingga Triwulan IV tahun 2023 ini, kegiatan yang telah dilakukan adalah:

1. Rangkaian kegiatan serah terima bantuan KOMPAK kepada Kelompok Konservasi Penyu Segoro Lestari Blitar. Adapun total bantuan yang diberikan adalah: Rp. 95.927.547,- dengan Nomor BAST 2434/BPSPL.4/PRL.440/VI/2023 dan Nomor BAP 2435/BPSPL.4/PRL.440/VI/2023 tertanggal 27 Juni 2023
2. Rangkaian kegiatan serah terima bantuan KOMPAK kepada POKMASWAS Penimbangan Lestari di Kabupaten Buleleng, Bali. Adapun total bantuan yang diberikan adalah: Rp. 102.480.000,- dengan Nomor BAST BA.1701/BPSPL.4/PL.450/IX/2023 dan Nomor BAP BA.17000/BPSPL.4/PL.450/IX/2023 tertanggal 15 September 2023.

Tabel 18. Kegiatan Pendukung IKU 2

No.	Kegiatan	Dokumentasi
1	Rangkaian kegiatan serah terima bantuan KOMPAK kepada Kelompok Konservasi Penyu Segoro Lestari (Blitar, Jawa Timur)	

2	Rangkaian kegiatan serah terima bantuan KOMPAK kepada POKMASWAS Penimbangan Lestari (Buleleng, Bali)	
---	--	--

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Adapun tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pendukung IKU 3 adalah melanjutkan rangkaian kegiatan serah terima bantuan KOMPAK yang akan dilakukan pada tahun berikut.

H. Realisasi Anggaran

Tabel 19. Realisasi Anggaran IKU 3

No.	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
3	Bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kelompok)	282.760.000	281.106.014	99,42

IKU 4. Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Jenis)

Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota laut dilindungi adalah jenis ikan ikan yang diintervensi perlindungan/pelestariannya melalui pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan atau pemulihan dilindungi guna menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan keanekaragaman hayati perairan serta respon cepat penanganan bioa laut dilindungi. Jumlah target jenis tersebut adalah Hiu CITES, Penyu, BCF, Pari CITES, Hiu Paus, dan Karang. Upaya perlindungan dan/atau pelestarian dilakukan melalui:

- a. Monitoring hiu dan pari appendix CITES, penyu, hiu paus, dan BCF
- b. Rehabilitasi karang.

c. Respon cepat penanganan biota laut dilindungi/terancam punah

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara Menginventarisasi dan menjumlahkan jenis ikan yang dilakukan pendataan, penyadartahuan perbaikan habitat/ pemulihan populasi atau penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

Tabel 20. Capaian IKU 4 BPSPL Denpasar TW IV

SK 4	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar							
IKU 4	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan dan Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi Di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)							
Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023						Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022 (%)	Target PK 2023	% Realisasi Thd PK	Target 2023	% Capaian Thd Renstra
6	6	9	150 atau 120 (kinerjaku)	50	6	150	5	140

A. Capaian IKU Triwulan IV Tahun 2023

Pada triwulan IV, target IKU 6 jenis telah tercapai 150% yaitu Hiu Apendiks, Pari Apendix, Penyu, Hiu Paus, Karang, BCF, Belida, Lumba-lumba, dan dugong.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV 2022 dan Triwulan IV 2023

Capaian tahun 2022 adalah 6 sedangkan tahun 2023 adalah 9 sehingga terdapat kenaikan sebesar 50% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan capaian IKU terjadi karena jenis / spesies yang dilakukan pendataan oleh UPT BPSPL Denpasar juga bertambah.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV dengan Renstra BPSPL Denpasar

Target jenis ikan tahun 2023 pada renstra 2020-2024 adalah 5 jenis atau tercapai 180%.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator ini adalah secara bertahap telah dilakukan beberapa hal, yaitu:

- Pada kegiatan Monitoring Hiu dan Pari Appendix CITES telah berhasil dilakukan enumerasi pendaratan hiu dan pari (Brondong, Muncar, Benoa, Tj Luar, dan Kupang) oleh enumerator selama tahun 2023.

- Pada kegiatan Pendataan Sebaran Penyu telah berhasil dilakukan pendataan sebaran penyu di Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT selama tahun 2023 dengan Kelompok Masyarakat yang dijadikan mitra.
- Pada kegiatan monitoring populasi hiu paus telah berhasil dilakukan monitoring Hiu Paus selama tahun 2023 di perairan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.
- Pada kegiatan monitoring populasi BCF telah berhasil dilakukan survei BCF Tahap I di Kendari & Perairan Gilimanuk pada Triwulan I dan tahap II yang dilaksanakan di Perairan Bali Utara pada Triwulan II.
- Pada kegiatan monitoring populasi belida telah berhasil dilakukan monitoring populasi Belida di Waduk Bening, Widas, Kabupaten Madiun, Jawa Timur.
- Pada kegiatan Rehabilitasi Habitat Kritis Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah di Sekotong telah dilakukan Rehabilitasi karang transplantasi di Pantai Elak-Elak TWP Gita Nada dengan tahapan : Perencanaan dan Studi media transplantasi, koordinasi dengan pihak terkait dalam instalasi media transplantasi, Pengadaan Media Transplantasi Karang, Penurunan Media Transplantasi dan Penataannya di Bawah Laut, serta Perawatannya. Selain itu juga dilakukan pemenuhan Dokumen Persetujuan Lingkungan terkait keberadaan media transplantasi tersebut.
- Pada kegiatan respon cepat telah dilakukan piket rutin bulanan Respon Cepat Penanganan Biota dilindungi / terancam punah di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

b. Analisis Kegagalan

Terdapat faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini ataupun dalam Pendataan, Penyadartahuan dan Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi salah satunya dalam pelaksanaan pendataan sebaran penyu berupa pengumpulan data oleh kelompok masyarakat bersifat sukarela sehingga tidak semua kelompok memenuhi kebutuhan data secara ideal.

c. Solusi

Solusi yang dapat diberikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah membimbing kelompok masyarakat dalam pengumpulan data secara aktif agar tercapai kebutuhan data secara ideal.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya meliputi penggunaan anggaran dan pelibatan Dinas terkait, enumerator, NGO, nelayan dan masyarakat untuk mendukung kegiatan di lokasi yang telah ditentukan.

F. Kegiatan Pendukung

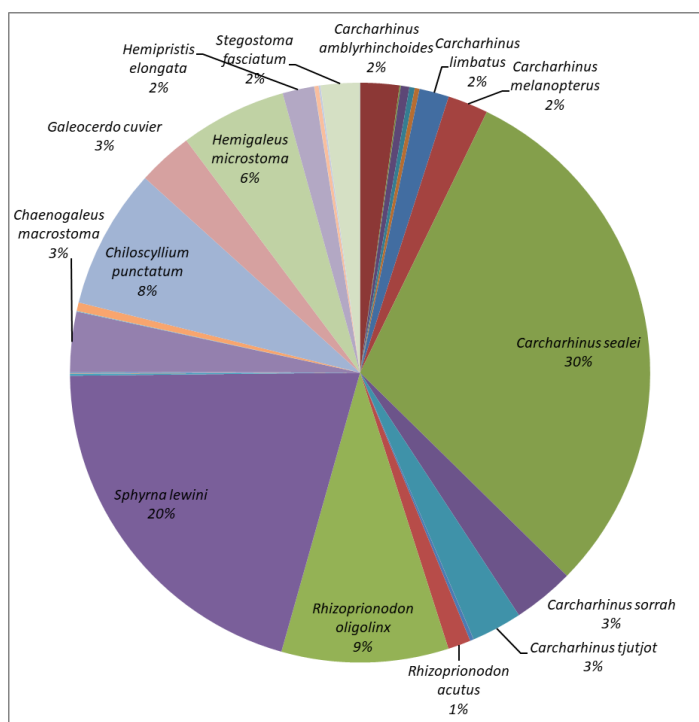
Dalam pencapaian indikator kinerja hingga Triwulan IV tahun 2023 ini, kegiatan yang telah dilakukan adalah :

1. Monitoring pendaratan Hiu dan Pari Appendix CITES yaitu Enumerasi pendaratan hiu dan pari (Brondong, Muncar, Bena, Tj Luar, dan Kupang) oleh enumerator selama tahun 2023 dengan sebagian data hasil enumerasi sebagai berikut:

- Komposisi Spesies Hiu dan Pari di Brondong

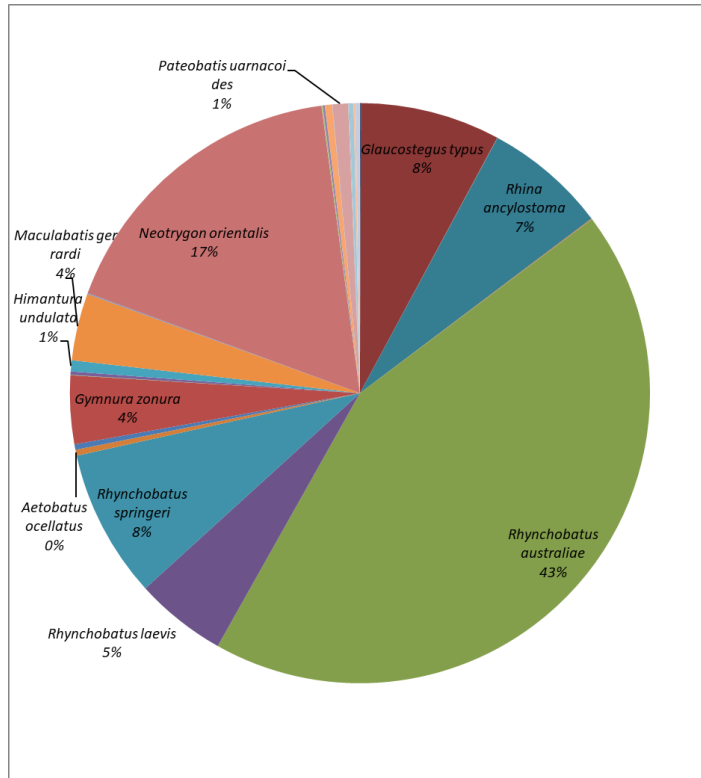
Pendataan yang dilakukan dari bulan Februari – Desember 2023 diperoleh 32.986 individu yang terdiri dari 18.256 individu hiu dan 14.730 individu pari. Jenis hiu yang didaratkan di Brondong terdiri dari 13.680 atau 74,93% hiu Apendiks CITES dan 4.576 atau 25,07% hiu Non Apendiks CITES seperti yang disajikan dalam grafik.

Grafik 14. Komposisi Spesies Hiu di Brondong



Jenis pari yang didaratkan di Brondong terdiri dari 10.538 atau 71,54% pari Apendiks CITES dan 4.192 atau 28,46% pari Non Apendiks CITES seperti yang disajikan dalam grafik.

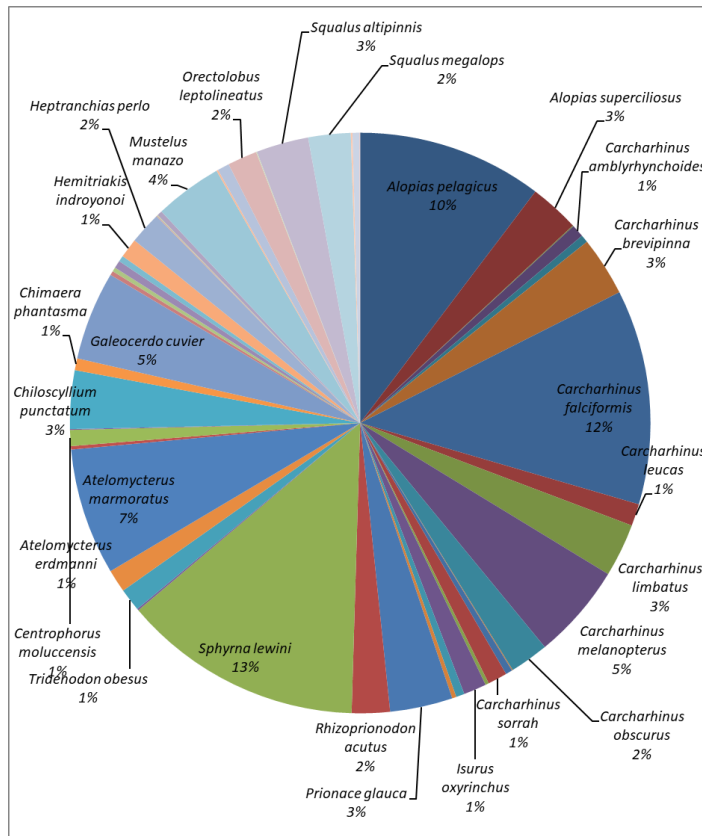
Grafik 15. Komposisi Spesies Pari di Brondong



- Komposisi Spesies Hiu dan Pari di Muncar

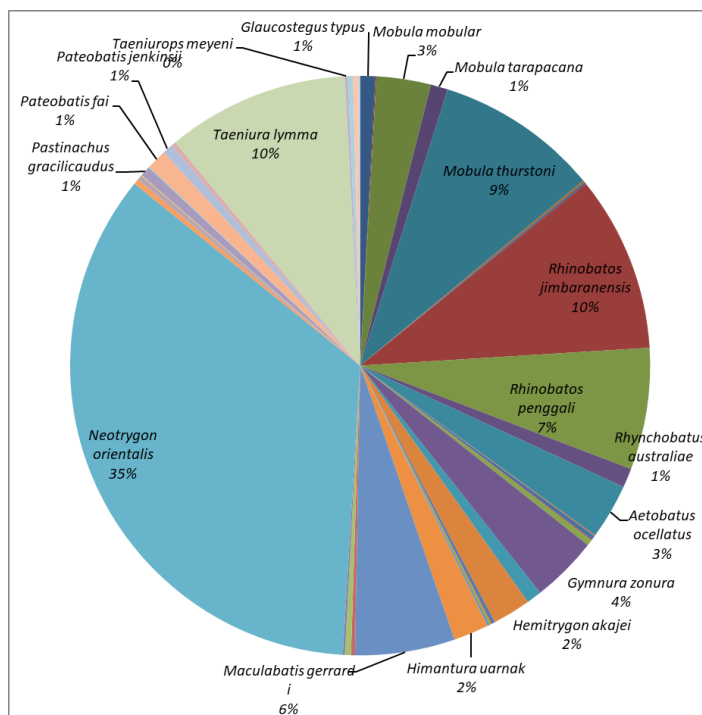
Pendataan yang dilakukan dari bulan Februari – Desember 2023 di Muncar mencatat 3.212 individu yang terdiri dari 2.124 individu hiu dan 1.782 individu pari. Jenis hiu yang didaratkan di Muncar terdiri dari 1.385 atau 65,21% hiu Apendiks CITES dan 739 atau 34,79% hiu Non Apendiks CITES seperti yang disajikan dalam grafik.

Grafik 16. Komposisi Spesies Hiu di Muncar



Jenis pari yang didaratkan di Muncar terdiri dari 568 atau 31,91% pari Apendiks CITES dan 1.214 atau 68,09% pari Non Apendiks CITES seperti yang disajikan dalam grafik.

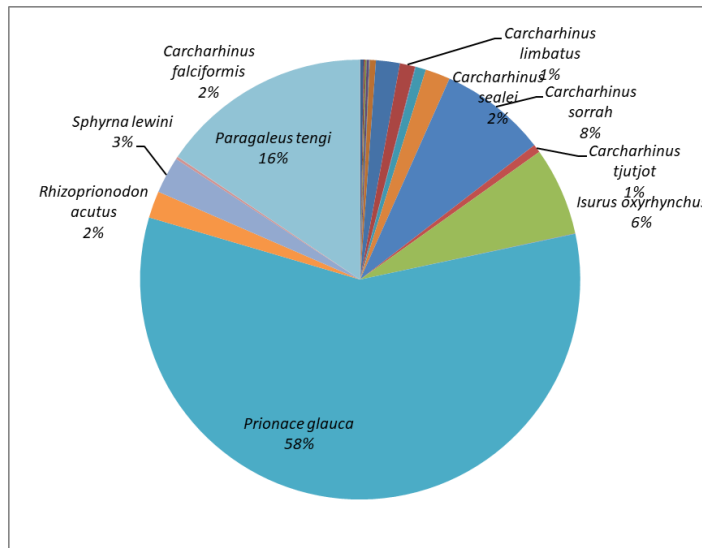
Grafik 17. Komposisi Spesies Pari di Muncar



- Komposisi Spesies Hiu dan Pari di Benoa

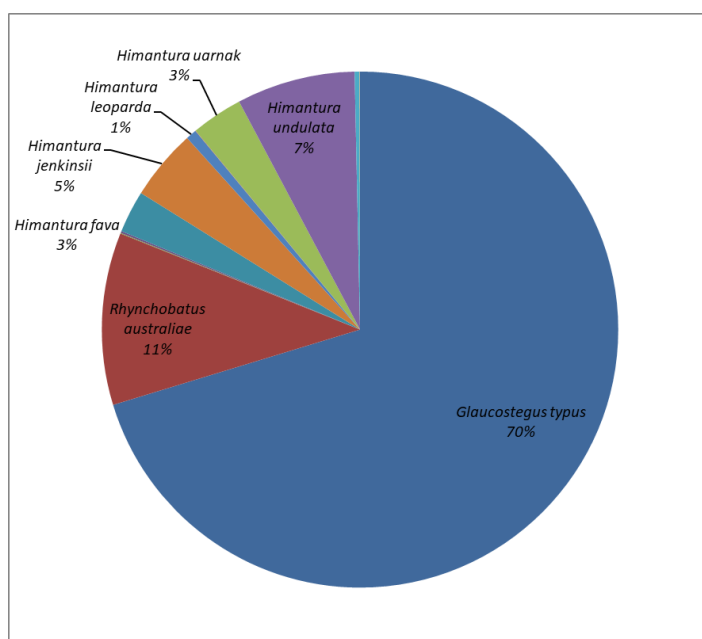
Pendataan yang dilakukan dari bulan Februari – Desember 2023 di Benoa mencatat 39.830 individu yang terdiri dari 35.371 individu hiu dan 4.459 individu pari. Jenis hiu yang didaratkan di Benoa terdiri dari 29.860 atau 84,42% hiu Apendiks CITES dan 5.511 atau 15,58% hiu Non Apendiks CITES seperti yang disajikan dalam grafik.

Grafik 18. Komposisi Spesies Hiu di Benoa



Jenis pari yang didaratkan di Benoa terdiri dari 3.617 atau 81,12% pari Apendiks CITES dan 842 atau 18,88% pari Non Apendiks CITES seperti yang disajikan dalam grafik.

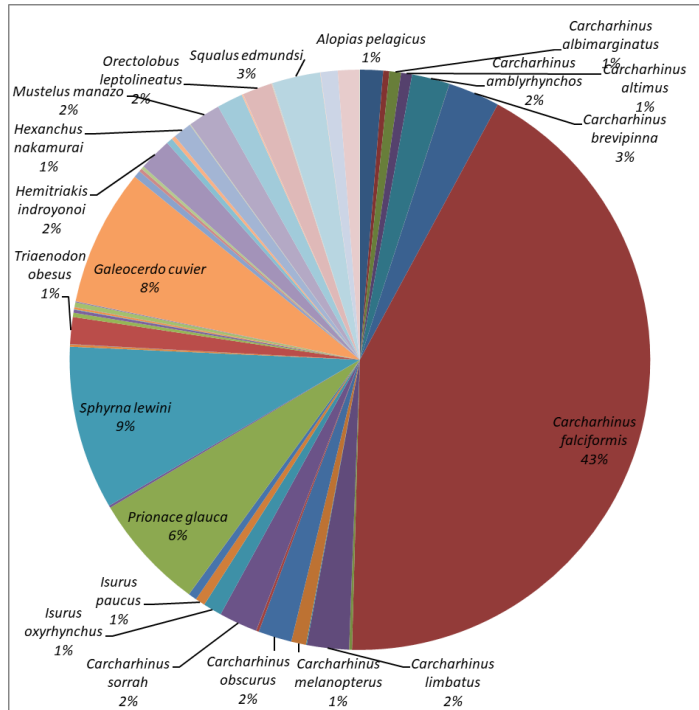
Grafik 19. Komposisi Spesies Pari di Benoa



- Komposisi Spesies Hiu dan Pari di Tj Luar

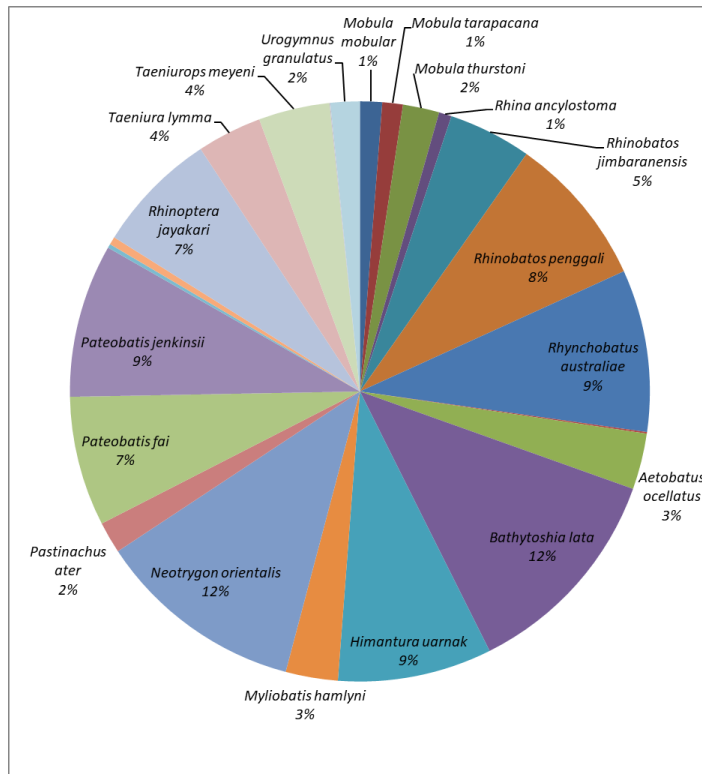
Pendataan yang dilakukan dari bulan Februari – Desember 2023 di Tanjung Luar mencatat 21.692 individu yang terdiri dari 19.423 individu hiu dan 2.269 individu pari. Jenis hiu yang didaratkan di Tanjung Luar terdiri dari 15.026 atau 77,36% hiu Apendiks CITES dan 4.397 atau 22,64% hiu Non Apendiks CITES seperti yang disajikan dalam grafik.

Grafik 20. Komposisi Spesies Hiu di Tj. Luar



Jenis pari yang didaratkan di Tanjung Luar terdiri dari 620 atau 27,32% pari Apendiks CITES dan 1.649 atau 72,68% pari Non Apendiks CITES seperti yang disajikan dalam grafik.

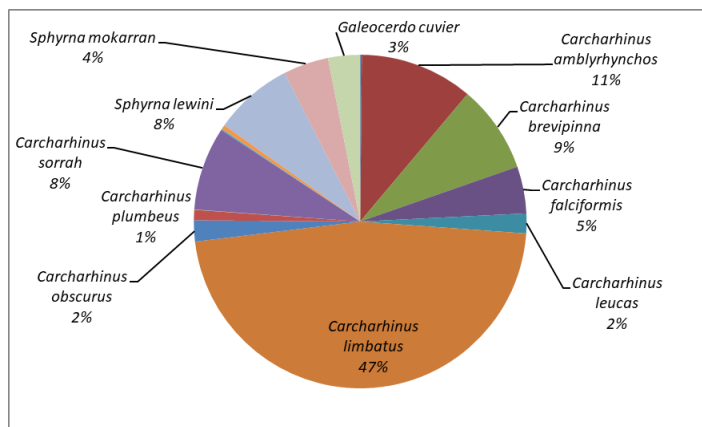
Grafik 21. Komposisi Spesies Pari di Tj. Luar



- Komposisi Spesies Hiu dan Pari di Kupang

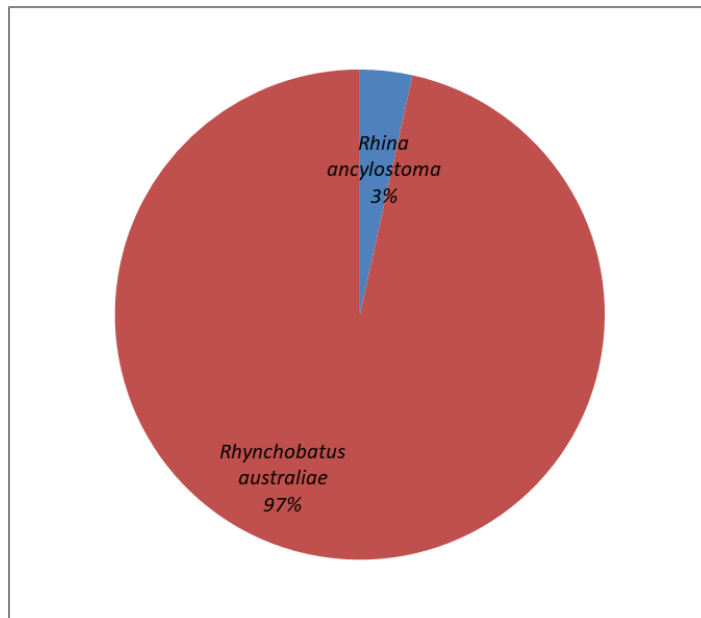
Pendataan yang dilakukan dari bulan Maret – November 2023 di Kupang mencatat 3.212 individu yang terdiri dari 3.183 individu hiu dan 29 individu pari. Jenis hiu yang didaratkan di Kupang terdiri dari 3.084 atau 96,89% hiu Apendiks CITES dan 99 atau 3,11% hiu Non Apendiks CITES seperti yang disajikan dalam grafik.

Grafik 22. Komposisi Spesies Hiu di Kupang



Jenis pari yang didaratkan di Kupang terdiri dari 29 individu yang semuanya merupakan pari Apendiks CITES seperti yang disajikan dalam grafik.

Grafik 23. Komposisi Spesies Pari di Kupang



2. Pendataan Sebaran Penyu : pendataan sebaran penyu di Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT dengan Kelompok Masyarakat yang dijadikan mitra dengan rekapitulasi data hasil pendataan sebaran penyu sebagai berikut.

- Peta Sebaran Penyu yang ditemukan

Gambar 4. Peta Sebaran Penyu yang ditemukan bersama mitra



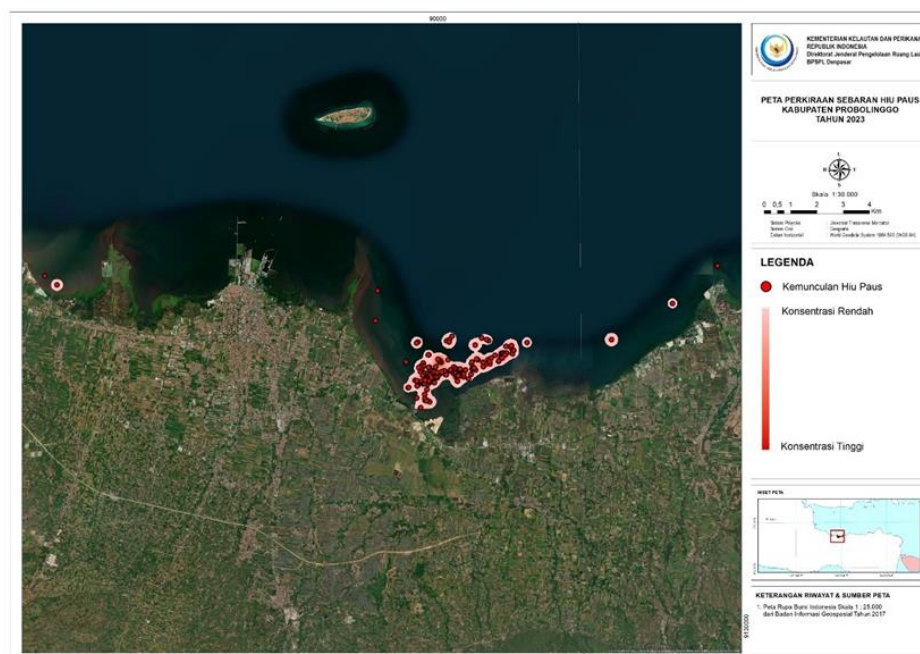
- Musim Peneluran Penyu

Tabel 21. Musim Peneluran Penyu

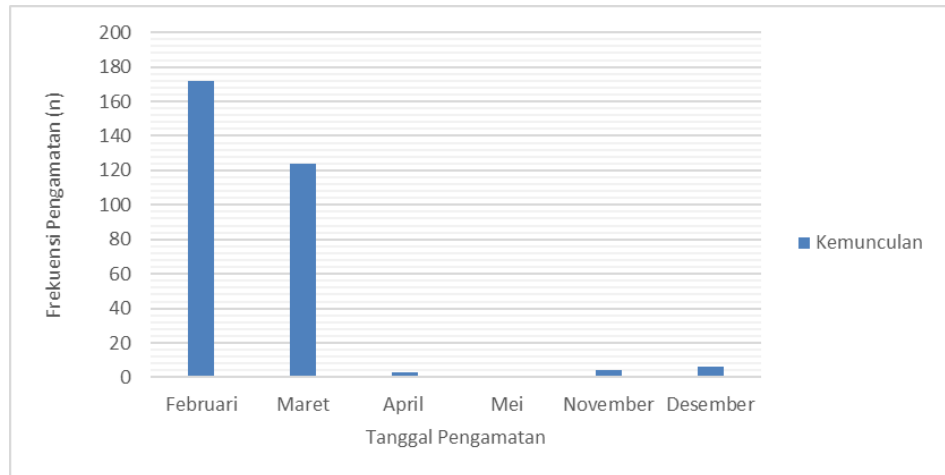
Provinsi	Jenis Penyu	Jumlah Sarang yang Ditemukan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Java Timur	Penyu Lekang	1	3	2	21	62	55	34	9	1			
	Penyu Pipih						1						
	Penyu Sisik	2	1		2	6	5	3					
Bali	Tidak diketahui		1										
	Penyu Hijau				2								
	Penyu Lekang	5	6	39	119	351	377	170	32	3	1	2	
NTB	Penyu Sisik	7	2										
	Penyu Hijau					1							
	Penyu Lekang		1	2	4	8	1						
NTT	Penyu Sisik				4	2							
	Tidak diketahui	2	1	2	2	9	1	4	2	3	2	1	
	Penyu Lekang					1							
	Tidak diketahui	3	14	22	24	10	1						

- Monitoring Hiu Paus : monitoring populasi hiu paus selama tahun 2023 di perairan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dengan rekapitulasi data hasil monitoring hiu paus sebagai berikut.
 - Peta prediksi sebaran, grafik frekuensi, dan diagram frekuensi kemunculan Hiu Paus Tahun 2023 di Probolinggo

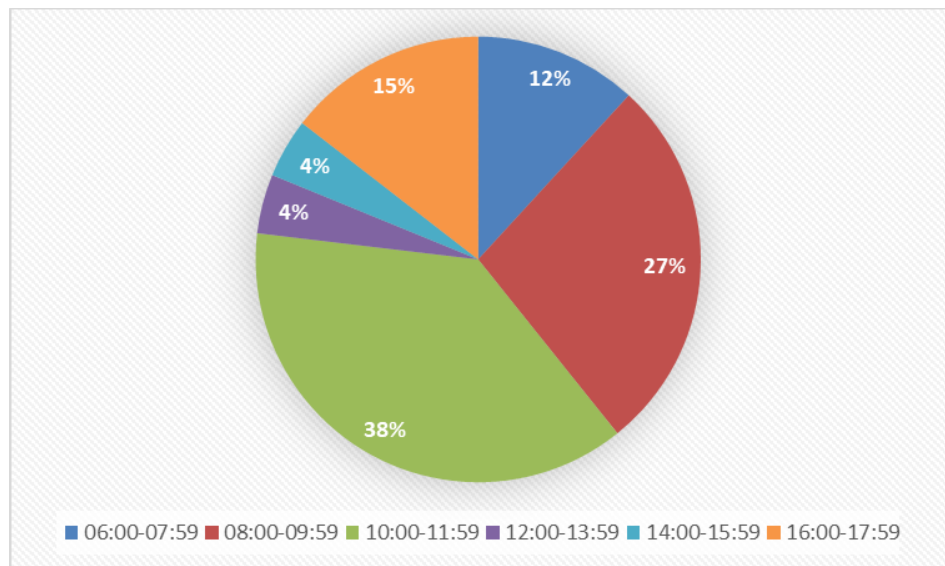
Gambar 5. Peta prediksi sebaran kemunculan Hiu Paus Tahun 2023 di Probolinggo



Grafik 24. Grafik Frekuensi Kemunculan Hiu Paus Tahun 2023 di Probolinggo

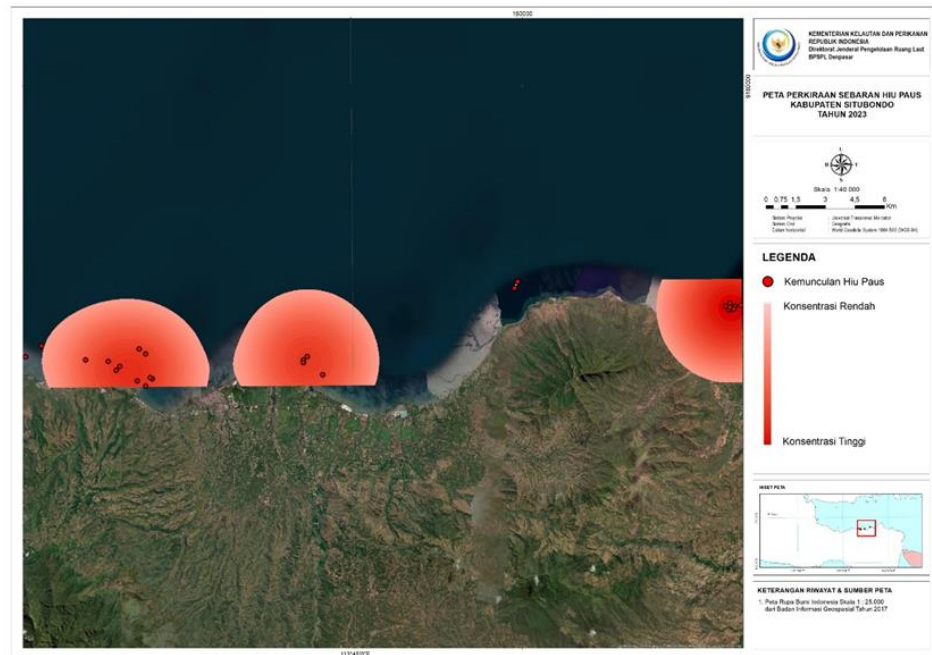


Grafik 25. Diagram frekuensi kemunculan Hiu Paus per periode waktu di Probolinggo

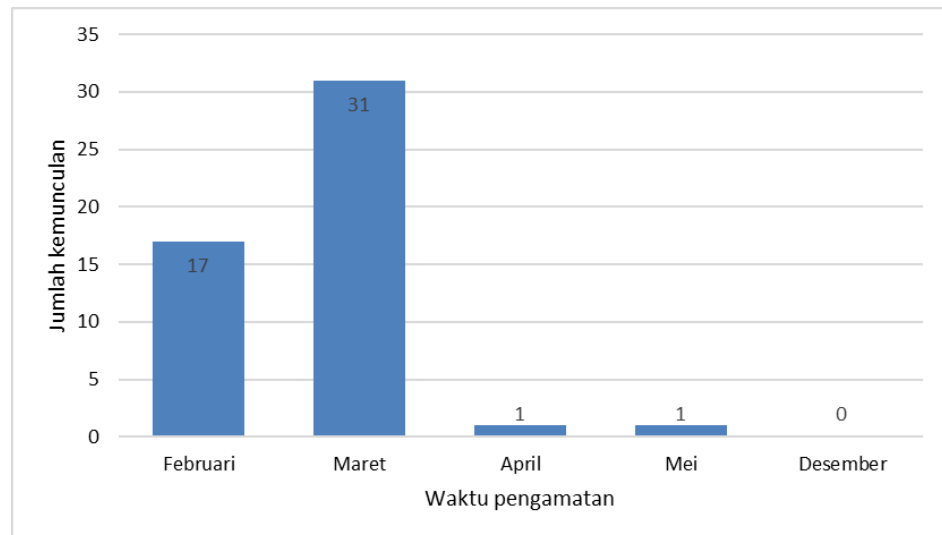


- Peta prediksi sebaran, grafik frekuensi, dan diagram frekuensi kemunculan Hiu Paus Tahun 2023 di Situbondo

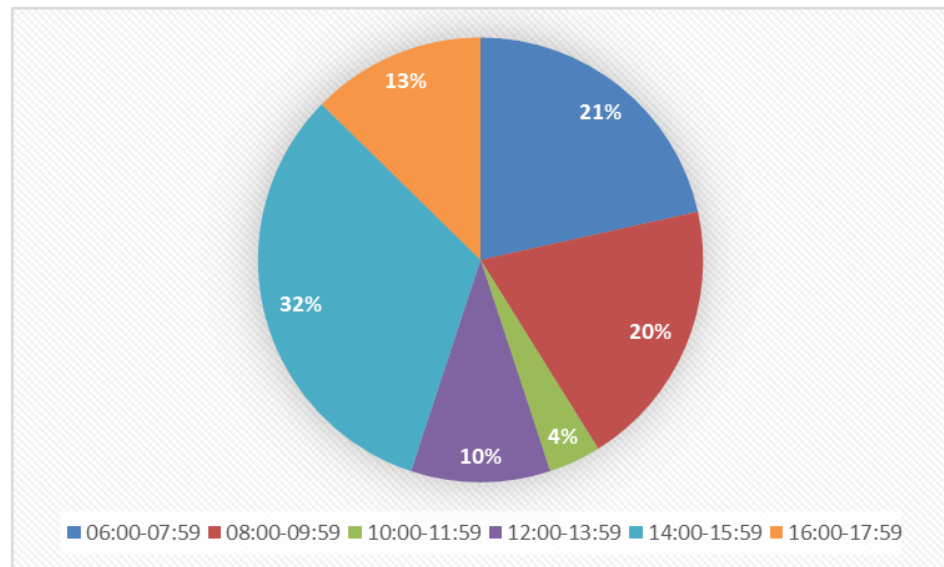
Gambar 6. Peta prediksi sebaran kemunculan Hiu Paus Tahun 2023 di Situbondo



Grafik 26. Grafik Frekuensi Kemunculan Hiu Paus Tahun 2023 di Situbondo

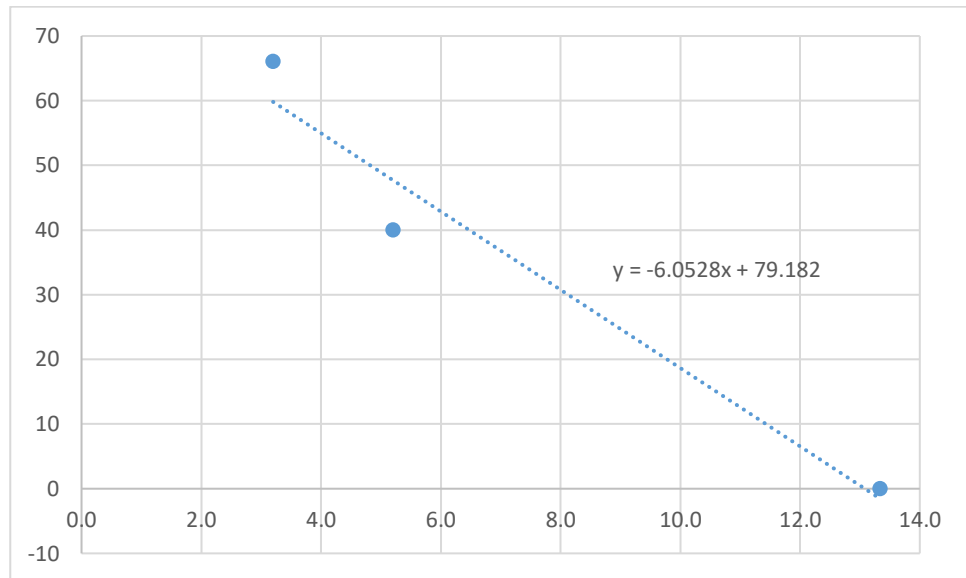


Grafik 27. Diagram frekuensi kemunculan Hiu Paus per periode waktu di Situbondo

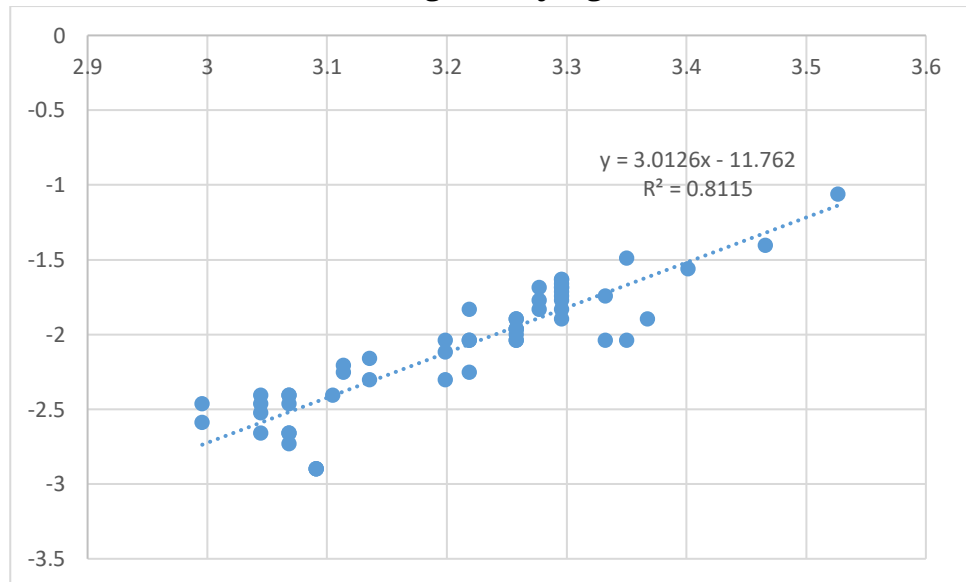


4. Monitoring populasi BCF survey : survei BCF Tahap I di Kendari & Perairan Gilimanuk pada Triwulan I dan tahap II yang dilaksanakan di Perairan Bali Utara pada Triwulan II. Dari hasil survei ditemukan *P. kaudermi* atau Ikan Capungan Banggai di teluk semi tertutup tepatnya di Teluk Gilimanuk. Substrat dasar teluk terdiri dari pasir, pecahan karang, dan bebatuan. Berdasarkan hasil survei, tercatat bahwa Ikan Capungan Banggai ditemukan pada perairan dangkal dengan kisaran kedalaman antara 3-7 m. Dari 15 titik pengamatan didapatkan total BCF sebanyak 6.216 ekor dengan kepadatan ikan 12,4 ekor per m². Tingkat kepadatan populasi BCF di Teluk Gilimanuk meningkat dibandingkan penelitian sebelumnya sebesar 0,76 individu/m² menjadi 12,4 individu/m² dan juga lebih tinggi daripada habitat aslinya yang hanya 0,5 individu/m².
5. Monitoring Populasi Belida : monitoring populasi Belida di Waduk Bening, Widas, Kabupaten Madiun, Jawa Timur dengan data hasil monitoring belida tersebut sebagai berikut.

Grafik 28. Grafik Populasi Belida di Titik Inlet Waduk Bening



Grafik 29. Grafik Hubungan Panjang dan Berat Ikan Belida



6. Rehabilitasi Populasi habitat kritis jenis ikan dilindungi/terancam punah : Rehabilitasi karang transplantasi di Pantai Elak-Elak TWP Gita Nada dengan tahapan/kegiatan-kegiatan pendukung sebagai berikut:


- Perencanaan dan Studi media transplantasi,
- koordinasi dengan pihak terkait dalam instalasi media transplantasi
- Pengadaan Media Transplantasi Karang
- Penurunan Media Transplantasi dan Penataannya di Bawah Laut
- Perawatan Media Transplantasi Karang

- Pemenuhan Dokumen Persetujuan Lingkungan terkait keberadaan media transplantasi tersebut
7. Respon Cepat Penanganan Biota dilindungi/terancam punah
Kejadian respon cepat penanganan biota laut dilindungi yang dilakukan oleh BPSPL Denpasar di masing-masing wilayah kerja hingga Triwulan IV 2023 yaitu:






Tabel 22. Rekap kejadian respon cepat BPSPL Denpasar hingga Triwulan IV

Bulan	Wilayah Kerja	Jumlah Kejadian
Juli	Jawa Timur	1
	Bali	-
	Nusa Tenggara Barat	-
	Nusa Tenggara Timur	-
Agustus	Jawa Timur	3
	Bali	-
	Nusa Tenggara Barat	-
	Nusa Tenggara Timur	1
September	Jawa Timur	1
	Bali	1
	Nusa Tenggara Barat	-
	Nusa Tenggara Timur	-

Tabel 23. Kegiatan Pendukung IKU 4

No.	Kegiatan	Dokumentasi
1.	Monitoring pendaratan Hiu dan Pari Appendix CITES	

		 <p>8.73714052S 115.20610428E 314° NW 87 Jalan Raya Pelabuhan Benoa Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali Altitude: 62.4m Senin, 04 September 2023</p>
2.	<p>Pendataan sebaran penyu di Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT dengan Kelompok Masyarakat yang dijadikan mitra</p>	 <p>05.05.2023 09:19:30 -8.2437062 S 114.2034918 E ±3.79m Jalan Gumuk Kantong Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur</p>  <p>8 Jun 2023 08:21:35 8.96410843S 116.7274777E 391° NW Altitude: 54.2m @BPSPLDPS_NTB</p>
3.	<p>Monitoring populasi hiu paus di perairan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur</p>	 <p>5 Des 2023 16.30.58 7.72582S 113.68253E No.37 Jalan Jokotole Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Jawa Timur</p>

4.	Survei BCF Tahap I di Kendari & Perairan Gilimanuk pada Triwulan I dan tahap II yang dilaksanakan di Perairan Bali Utara pada Triwulan II	
5.	Monitoring populasi Belida di Waduk Bening, Widias, Kabupaten Madiun, Jawa Timur	
6.	Rehabilitasi karang transplantasi di Pantai Elak-Elak TWP Gita Nada	 
7.	Respon Cepat Penanganan Biota dilindungi/terancam punah	

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Adapun tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pendukung IKU 4 adalah :

- Pendataan hiu-pari oleh enumerator : Melanjutkan kegiatan monitoring pendaratan hiu-pari pada tahun 2024.
- Pendataan sebaran penyu : Melanjutkan kegiatan pendataan sebaran penyu dengan membimbing kelompok masyarakat dalam pengumpulan data secara aktif agar tercapai kebutuhan data secara ideal.
- Monitoring populasi hiu paus : melanjutkan kegiatan monitoring Hiu-Paus pada tahun 2024.
- Monitoring Populasi BCF : Mensosialisasikan data hasil survei BCF yang telah dilakukan BPSPL Denpasar.
- Monitoring Populasi Belida : Mensosialisasikan data hasil monitoring Belida yang telah dilakukan BPSPL Denpasar.
- Rehabilitasi Populasi habitat kritis jenis ikan dilindungi/terancam punah : pemeliharaan (perawatan) dan penanaman karang sulaman hingga seluruh media tertata dan tertanami dengan baik, pengadaan media transplantasi tambahan berupa patung penyu dan blok MARS, serta penguatan kapasitas dan kompetensi kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) Elak-Elak dan sekitarnya dengan pelatihan.
- Respon Cepat Penanganan Biota dilindungi / terancam punah : Penugasan personil secara konsisten sesuai jadwal piket respon cepat yang sudah dibuat bila ada kejadian yang memerlukan penanganan/respon cepat dan jika anggaran memungkinkan diadakan bimtek/pelatihan penanganan biota terdampar bagi para pegawai yang belum mendapatkan bimtek/pelatihan supaya mengetahui dasar-dasar penanganannya.

H. Realisasi Anggaran

Tabel 24. Realisasi Anggaran IKU 4

No.	IKU	Kegiatan Pendukung	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
4		Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah	498.400.000	498.111.706	99,94

Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyardartahuan dan Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi Di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	Rehabilitasi Populasi habitat kritis jenis ikan dilindungi /terancam punah	101.600.000	101.556.715	99,96
	Respon Cepat Penanganan Biota dilindungi/terancam punah	100.000.000	99.345.440	99,35

IKU 5. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)

Upaya pemanfaatan jenis ikan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan atau jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya melalui:

- a. Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan atau look alike species seperti hiu, pari, softcoral, arwana, dan teripang,
- b. Pendataan potensi jenis ikan yang dilindungi dan/atau CITES yang dimanfaatkan yaitu hiu, pari, arwana, dan teripang.

Target jenis pemanfaatan adalah Hiu dan Pari di wilayah kerja BPSPL Denpasar yaitu Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Terdapat 3 kegiatan pendukung untuk pemenuhan IKU 6 BPSPL Denpasar yaitu Penyediaan Data Potensi dan Status Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES dan/atau Look Alike Species; Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan Appendiks CITES; dan Penyediaan Sarana Prasarana Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara Menginventarisasi dan menjumlahkan jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk appendix cites, dan/atau look alike spesies dan pendataan potensi jenis ikan yang dilindungi dan/atau CITES yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

Tabel 25. Capaian IKU 5 BPSPL Denpasar TW IV

SK 5	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar							
IKU 5	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)							
Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023						Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2022 (%)	Target PK 2023	% Realisasi Thd PK	Target 2023	% Capaian Thd Renstra
7	5	7	140 atau 120 (kinerjaku)	-	5	140	6	116,67

A. Capaian IKU Triwulan IV Tahun 2023

Pada triwulan IV, target IKU 5 jenis telah tercapai 6 jenis (120%) meliputi jenis hiu, pari, softcoral, arwana, teripang, BCF, dan clarion angelfish.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV 2022 dan Triwulan IV 2023

Target IKU 2022 maupun 2023 tercapai 7 sehingga tidak terdapat peningkatan atau penurunan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV dengan Renstra BPSPL Denpasar

Target jenis ikan tahun 2023 pada renstra 2020-2024 adalah 6 jenis atau tercapai 116,67%.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator ini adalah secara bertahap telah dilakukan hal-hal berikut, yaitu untuk kegiatan Penyediaan Data Potensi dan Status Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES dan/atau Look Alike Species telah dilakukan Rekapitulasi data survei Lapangan di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Untuk kegiatan Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan Appendiks CITES telah dilakukan verifikasi Jenis Ikan Dilindungi/ tidak Dilindungi dan Appendiks CITES yang Diatur Peredarannya, Penerbitan Dokumen SAJI dan Rekomendasi, Verifikasi Lapangan SIPJI, Survei Stok Bulanan, dan Verifikasi Stok Hasil Pengambilan Alam.

b. Analisis Kegagalan

Terdapat faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini ataupun dalam Pendataan, Penyadartahuan dan Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi, yaitu pada kegiatan Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan Appendiks CITES kerap terjadi

kendala pada sistem SAJI sehingga proses verifikasi dan penerbitan dokumen peredaran kerap terinterupsi.

c. Solusi

Solusi yang dapat diberikan untuk menyelesaikan permasalahan pada kegiatan Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan Appendiks CITES adalah koordinasi dengan pusat terkait sistem SAJI ketika terjadi kendala pada sistem SAJI

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

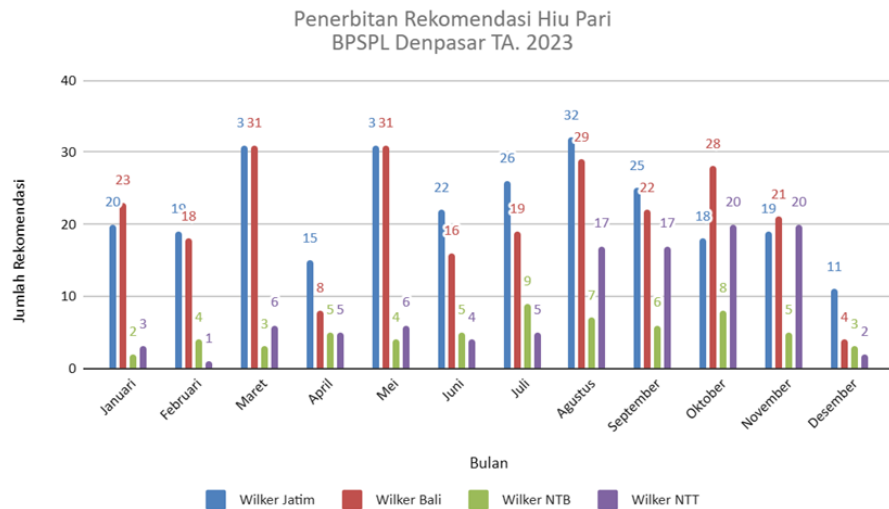
Efisiensi penggunaan sumber daya meliputi penggunaan anggaran dan pelibatan Dinas terkait, NGO, Enumerator, dan masyarakat untuk mendukung kegiatan pada lokasi yang ditentukan.

F. Kegiatan Pendukung

Dalam pencapaian indikator kinerja hingga Triwulan IV tahun 2023 ini, kegiatan yang telah dilakukan adalah :

1. Pengumpulan data potensi di Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT. Data yang terkumpul kemudian dimasukkan ke dalam dashboard data base data potensi dan pemanfaatan jenis ikan yang digunakan untuk memudahkan dalam analisis dan penampilan secara spasial. Dashboard tersebut menampilkan pelaku usaha pada daerah tertentu, provinsi atau kabupaten, produksi jenis ikannya, asal dan tujuan produksi ikan tersebut. Data Spreadsheet yang digunakan untuk menginput data tersebut melalui tautan docs.google.com/spreadsheets/d/1v-m_7WVvOuVK9WjS9crjBCkf1mwA5b1coZxSOVGuBGc. Sementara tampilan dashboard data base dapat dilihat melalui tautan https://lookerstudio.google.com/reporting/0f786e08-ee1c-4799-85ba-16a990da2870/page/p_rzstu8ut4c. Data yang diinput dalam spreadsheet adalah data dari hasil pengolahan data potensi jenis ikan pada tahun 2022 dan tahun 2023
2. Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan Appendiks CITES:
 - Penerbitan Rekomendasi Look Alike (Jenis Hiu dan Pari)
Kegiatan pelayanan penerbitan Surat Penerbitan Rekomendasi untuk jenis Look Alike pada bulan Januari hingga Desember 2023, total terdapat 215 rekomendasi yang telah diterbitkan dengan rincian setiap bulan berturut-turut sebagai berikut.

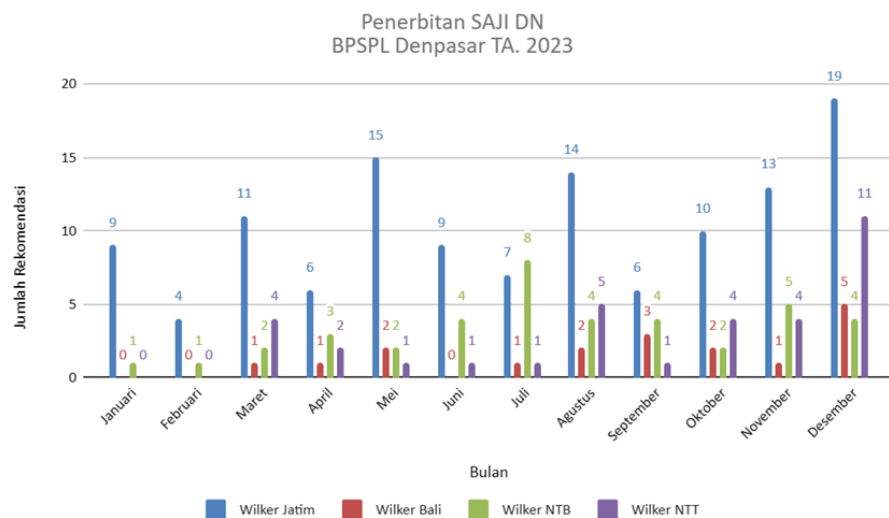
Grafik 30. Jumlah Rekomendasi Hiu dan Pari Bulanan hingga Triwulan IV



Bulan Desember menjadi bulan terbanyak dalam penerbitan dengan wilayah kerja Jawa Timur mendominasi kegiatan ini selama kurun satu tahun.

- Penerbitan SAJI DN Jenis Hiu dan Pari Appendiks
Selain untuk jenis Look Alike, BPSPL Denpasar juga menerbitkan untuk SAJI DN jenis Ikan Hiu dan Pari yang masuk kedalam Appendiks CITES. Adapun total SAJI DN terbit adalah 686 SAJI DN dengan rincian setiap bulan sebagai berikut.

Grafik 31. Jumlah SAJI DN Hiu dan Pari Bulanan hingga Triwulan IV

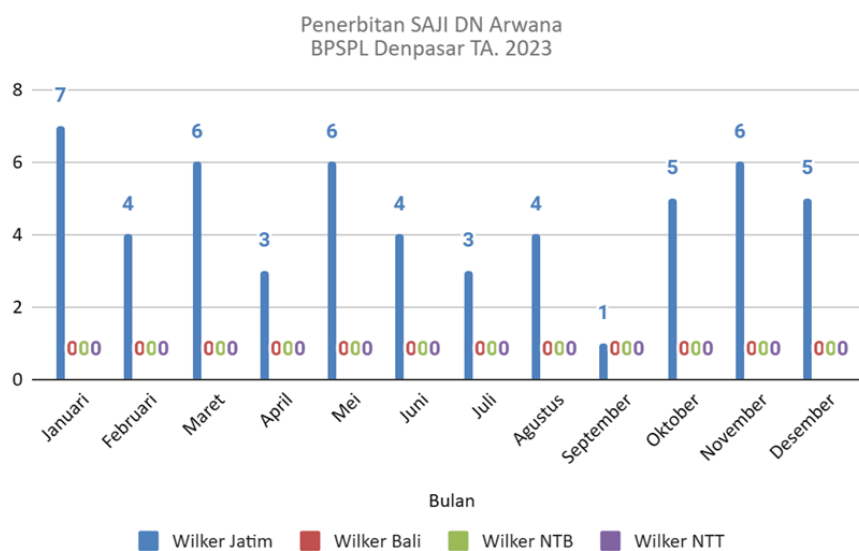


Dari total rekomendasi, bulan Agustus mendominasi dalam kegiatan menerbitkan SAJI DN untuk jenis Hiu dan Pari dengan wilker Jawa Timur yang mendominasi dengan total 32 SAJI DN.

- Penerbitan SAJI DN Arwana

Sejak tahun 2022, BPSPL telah menerbitkan SAJI atau Surat Angkut Jenis Ikan DN untuk Arwana. Adapun total SAJI Arwana Tahun 2023 adalah 54 SAJI DN dengan rincian per bulan berturut-turut sebagai berikut.

Grafik 32. Jumlah SAJI DN Arwana Bulanan hingga Triwulan IV



- Penerbitan SAJI DN Selain Arwana

Selain SAJI DN untuk Arwana dan Hiu dan Pari Appendiks CITES, BPSPL Denpasar menerbitkan SAJI DN untuk jenis lain yaitu jenis BCF dan Sidat dengan total 161 SAJI DN.

- Penerbitan Rekomendasi Karang Hias

Pelayanan penerbitan Rekomendasi Jenis Karang Hias selama Tahun 2023 berjumlah 368 Rekomendasi. Adapun bulan yang mendominasi adalah Agustus dengan total 1.547 Rekomendasi. Dari semua Wilayah Kerja, Bali menjadi Wilayah Kerja yang mendominasi dalam penerbitan Rekomendasi ini dengan total keseluruhan adalah 1.370 Rekomendasi dan yang lainnya sesuai grafik di bawah.

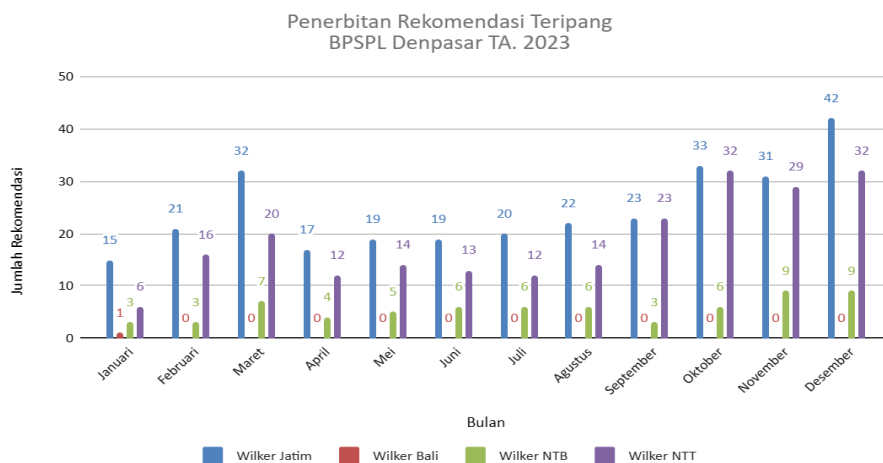
Grafik 33. Jumlah Rekomendasi Karang Hias Bulanan hingga Triwulan IV



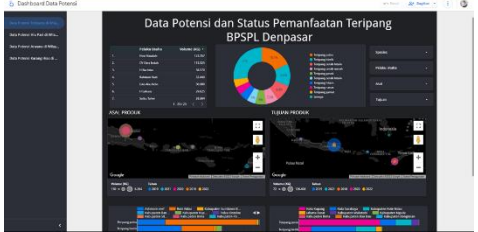
- Penerbitan Rekomendasi Teripang

Penerbitan Rekomendasi selain Look Alike (Hiu dan Pari) dan Karang Hias, adalah jenis Teripang. Total Rekomendasi Teripang terbit pada Tahun 2023 adalah 585 Rekomendasi dengan rincian setiap bulan sebagaimana terlihat dalam grafik dibawah ini.

Grafik 34. Jumlah Rekomendasi Teripang Bulanan hingga Triwulan IV



Tabel 26. Kegiatan Pendukung IKU 5

No.	Kegiatan	Dokumentasi
1.	Rekapitulasi data survei Lapangan di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur	
2.	Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan Appendiks CITES	

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Adapun tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pendukung IKU 6 adalah :

- Penyediaan Data Potensi dan Status Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES dan/atau Look Alike Species: Tabulasi hasil pengumpulan data tahun 2024 dan Input data ke spreadsheet data base.
- Melanjutkan kegiatan Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan Appendiks CITES

H. Realisasi Anggaran

Tabel 27. Realisasi Anggaran IKU 5

No.	IKU		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
6	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan Di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	Penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES	100.000.000	99.948.492	99,95
		Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan Appendiks CITES	1.302.000.000	1.300.539.837	99,89

IKU 6. Nilai PNB P BPSPL Denpasar (Rp.000)

Penerimaan Negara Bukan Pajak BPSPL Denpasar adalah seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa kegiatan pengelolaan ruang laut, meliputi Pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya

Teknik menghitung PNB P BPSPL Denpasar dilakukan menggunakan rumus berikut:

$$PNBP_{BPSPL\ Denpasar} = SAJI\ DN + Rekomendasi\ DN + Rekomendasi\ LN + Denda$$

Dimana:

Saji DN = Pungutan atas dokumen Saji DN 1) + pungutan perdagangan + pungutan pengambilan 2)

Surat Rekomendasi = pungutan atas dokumen rekomendasi + pungutan perdagangan

Denda dikenakan atas pengangkutan jenis ikan yang melebihi volume pada dokumen angkut

keterangan :

1) untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dikenakan tarif 25%

2) dikenakan untuk pengangkutan jenis ikan yang berasal pengambilan dari alam berdasarkan kuota yang dimiliki

Formulasi penghitungan pungutan :

Pungutan pengambilan = jumlah individu x Tarif PNB P x harga patokan jenis ikan

Pungutan perdagangan = volume x Tarif PNB P x harga patokan jenis ikan

Denda = Tarif PNB P x jumlah produk yang tidak sesuai dengan permohonan

Tabel 28. Capaian IKU 6 BPSPL Denpasar TW IV

SK 6	Meningkatnya Nilai PNB P BPSPL Denpasar							
IKU 6	Nilai PNB P BPSPL Denpasar (Rp.000)							
Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023						Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2022 (%)	Target PK 2023	% Realisasi Thd PK	Target 2023	% Capaian Thd Renstra
2.593.347,144	850.000	3.037.033,914	357,30 atau 120 (kinerjaku)	155,03	850.000	357,30	-	-

A. Capaian IKU Triwulan IV Tahun 2023

Pada triwulan IV, target IKU tercapai melebihi target, dari target Rp.850.000.000,- tercapai Rp.3.037.033.914,- (357,30% atau 120% pada kinerjaku).

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV 2022 dan Triwulan IV 2023

Pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 IKU sama-sama memiliki capaian yang melebihi target. Secara kuantitatif terdapat peningkatan terhadap tahun 2022 sebesar 155,03 %. Peningkatan PNBPN terjadi karena jenis / spesies yang dilayani surat izin angkut perdagangan oleh UPT BPSPL Denpasar juga bertambah.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV dengan Renstra BPSPL Denpasar

Tidak terdapat target IKU Penerimaan PNBPN berdasarkan Renstra 2020-2024, sehingga capaian tidak dapat dibandingkan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator ini adalah secara terus menerus telah dilakukan penarikan PNBPN dan penginputan nilai PNBPN yang diperoleh sehingga dapat mencapai atau melebihi target pada akhir tahun.

b. Analisis Kegagalan

Tidak terdapat faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini.

c. Solusi

Tidak diperlukan solusi karena tidak ada permasalahan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi sumber daya dan anggaran yang dilakukan adalah dengan menugaskan pegawai di wilayah kerja untuk melakukan input PNBPN.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung adalah melakukan penginputan PNBPN melalui aplikasi E-SAJI. Sejak tanggal 18 September 2021 BPSPL Denpasar telah melakukan penarikan PNBPN terhadap produk pemanfaatan jenis ikan..

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Adapun tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pendukung IKU 8 adalah Melanjutkan kegiatan penarikan PNBPN terhadap produk pemanfaatan jenis ikan pada bulan berikutnya.

H. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung IKU 6 Nilai PNBPN BPSPL Denpasar (Rp.000).

IK 7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai) adalah Nilai Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 29. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

No.	Indikator	Bobot Penilaian (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Devisiasi RPD (Halaman III DIPA)	10
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi Penyampaian SPM	5
8	Capaian Output	25

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
2. Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ;
3. Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau
4. Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Tabel 30. Capaian IK 7 BPSPL Denpasar TW IV

SK 7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar							
IK 7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPL Denpasar (Nilai)							
Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023						Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2022 (%)	Target PK 2023	% Realisasi Thd PK	Target 2023	% Capaian Thd Renstra
95,21	93,75	89,95	95,95	-5,91	93,75	95,95	90	99,94

A. Capaian IK Triwulan IV Tahun 2023

Pada akhir tahun 2023 (triwulan IV), target IK tidak tercapai 100%. Setelah perubahan Perjanjian Kinerja, target IKPA meningkat sebanyak 4,75 poin sehingga nilai IKPA yang telah dicapai tidak dapat memenuhi target yang baru.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV 2022 dan Triwulan IV 2023

Capaian tahun 2022 adalah 95,21 sedangkan tahun 2023 adalah 95,95 sehingga terdapat penurunan sebesar 5,91 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian menurun karena Deviasi Halaman III DIPA cukup tinggi (perencanaan realisasi anggaran kurang baik dibandingkan perencanaan realisasi tahun sebelumnya) dan Penyelesaian Tagihan sempat tertunda (karena terdapat miskomunikasi / kelalaian yang baru terjadi pada tahun 2023).

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV dengan Renstra BPSPL Denpasar

Target nilai IKPA tahun 2023 pada renstra 2020-2024 adalah 90 atau tercapai 99,94%.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Selama tahun telah dilaksanakan usaha untuk pemenuhan kriteria-kriteria yang menjadi penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran secara tepat waktu dan Rekonsiliasi serta Penyusunan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan Rutin Lain.

b. Analisis Kegagalan

Pada IK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Denpasar tidak mencapai target karena Deviasi Halaman III DIPA cukup tinggi (perencanaan realisasi anggaran kurang tepat) dan Penyelesaian Tagihan sempat tertunda (karena terdapat miskomunikasi saat penyelesaian tagihan).

c. Solusi

Permasalahan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan IK pada tahun berikut agar tidak terjadi kesalahan yang sama akan dibuat perencanaan realisasi anggaran yang lebih matang melalui diskusi kinerja dan komunikasi yang lebih siap dan baik dalam penyelesaian tagihan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan menunjuk penanggung jawab untuk penginputan sehingga dapat meminimalisir kesalahan.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja ini adalah dengan melaksanakan kriteria-kriteria penilaian IKPA sesuai dengan ketentuan, Monitoring terhadap capaian kinerja dapat dilakukan melalui aplikasi OM SPAN pada Modul PA, serta Rekonsiliasi serta Penyusunan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan Rutin Lain.

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Melakukan upaya monitoring secara rutin atas pencapaian indikator kinerja.

H. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung IK 7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPL Denpasar (Nilai).

IK 8. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga. Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah. Pada Level Satuan Kerja, cakupan evaluasi kinerja mencakup Aspek Implementasi. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- Sangat Baik, apabila NKA > 90;
- Baik, apabila NKA >80 - 90;
- Cukup, apabila NKA >60 - 80;
- Kurang, apabila NKA >50 – 60;
- Sangat Kurang, apabila ≤ 50.

Tabel 31. Capaian IK 8 BPSPL Denpasar TW IV

SK 7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar							
IK 8	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)							
Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023						Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2022 (%)	Target PK 2023	% Realisasi Thd PK	Target 2023	% Capaian Thd Renstra
88,62	82	87,39	106,57	-1,52	82	106,57	88	99,31

A. Capaian IK Triwulan IV Tahun 2023

Pada tahun 2023, target IK Kinerja Anggaran tercapai 106,57% (dari target nilai 82 tercapai 87,39).

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV 2022 dan Triwulan IV 2023

Capaian tahun 2022 adalah 88,62 sedangkan tahun 2023 adalah 87,39

sehingga terdapat penurunan sebesar 1,52% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terjadi karena PAGU tahun 2023 lebih besar dari PAGU tahun 2022 sehingga beban kerja lebih berat.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV dengan Renstra BPSPL Denpasar

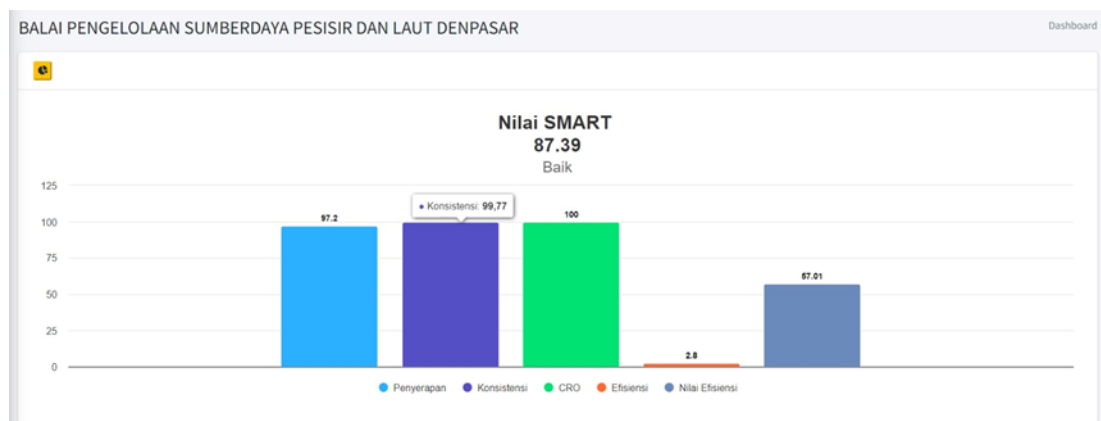
Target nilai kinerja anggaran tahun 2023 pada renstra 2020-2024 adalah 88 atau tercapai 99,31%.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan disebabkan oleh adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu dan dilakukan monitoring secara berkala. Dari aplikasi SMART diketahui perolehan NKA sebesar 87,39 sebagaimana terlampir pada gambar di bawah. Terhitung nilai NKA 87,39 dari perhitungan akumulasi penyerapan sebesar 97,2; konsistensi sebesar 99,77; CRO sebesar 100; efisiensi sebesar 2,8; dan nilai efisiensi sebesar 57,01.

Gambar 7. Nilai NKA dari aplikasi SMART



b. Analisis Kegagalan

Tidak terdapat faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini.

c. Solusi

Tidak diperlukan solusi karena tidak ada permasalahan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dengan melakukan koordinasi antar semua penanggungjawab kegiatan di semua seksi.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja ini adalah :

1. Kegiatan dalam rangka Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Semester I 2023, melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait penyelenggaraan pengelolaan BMN, melaksanakan kegiatan Inventarisasi BMN dan serah terima aset Eks BPPN serta pelaksanaan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN
2. Kegiatan dalam rangka penataan, layanan, dan pengelolaan persuratan, tata usaha dan kearsipan
3. Kegiatan dalam rangka penyelenggaraan layanan kerumahtanggaan diantaranya berupa kegiatan pemenuhan sarana dan prasana rumah tangga untuk menunjang TUSI BPSPL Denpasar, kegiatan pendampingan pelaksanaan OASEKIM, dan melaksanakan kegiatan serah terima Gedung bangunan Eks BPPN.
4. Pembayaran gaji dan tunjangan dilaksanakan sesuai ketentuan serta penambahan anggaran belanja gaji dan tunjangan TA.2023 dengan bertambahnya pegawai PPPK.
5. Operasional dan pemeliharaan kantor berupa pembayaran pengadaan pakaian dinas pegawai, kebutuhan sehari-hari perkantoran, jamuan tamu, honorarium petugas kebersihan, satpam/sopir, pramubakti, petugas outsourcing, pengiriman pos, honorarium pengelola keuangan, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin, langganan listrik, telepon dan PDAM.

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Melakukan monitoring secara rutin terhadap pencapaian indikator kinerja.

H. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung IKU 8 Nilai Kinerja Anggaran BPSPL Denpasar.

IK 9. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai)

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Nilai kinerja RB DJPRL diperoleh dari Indeks RB hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terhadap 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Manajemen perubahan: pola pikir dan budaya kerja aparatur, Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi;
2. peraturan perundang-undangan: regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif;
3. Organisasi: yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing);
4. Tata laksana: sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance;
5. SDM Aparatur: yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, professional, berkinerja tinggi, dan sejahtera;
6. Akuntabilitas: meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
7. Pengawasan: meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas kkn;
8. Pelayanan publik: pelayanan prima yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Tabel 32. Capaian IK 9 BPSPL Denpasar TW IV

SK 7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar							
IK 9	Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Nilai)							
Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023					Renstra 2020-2024		
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2022 (%)	Target PK 2023	% Realisasi Thd PK	Target 2023	% Capaian Thd Renstra
87,57	75	87,57	116,76	0	75	116,76	78	112,27

A. Capaian IK Triwulan IV Tahun 2023

Pada triwulan IV, target IK WBK tercapai 116,76% (dari target nilai 75 tercapai 87,57).

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV 2022 dan Triwulan IV 2023

Capaian tahun 2022 adalah 87,57 demikian pula pada tahun 2023

adalah 87,57 sehingga tidak terdapat kenaikan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV dengan Renstra BPSPL Denpasar

Target nilai WBK tahun 2023 pada renstra 2020-2024 adalah 78 atau tercapai 112,27%.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan sejauh ini mengalami lebih banyak keberhasilan karena kerja sama yang baik dari koordinator-koordinator kegiatan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan WBK secara bertahap.

b. Analisis Kegagalan

Tidak terdapat faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini.

c. Solusi

Tidak diperlukan solusi karena tidak ada permasalahan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dengan melakukan koordinasi antar semua penanggungjawab kegiatan di semua seksi

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja ini adalah :

1. Melaksanakan evaluasi WBK
2. SKM triwulanan telah berjalan melalui aplikasi susan
3. Pemeriksaan dan tindak lanjut Yanblik telah dilaksanakan
4. Ikut serta dalam perayaan Hari Anti Korupsi (HAKORDIA) 2023 KKP
5. Melaksanakan rekapitulasi Lapor 2023

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Melanjutkan pendokumentasian dokumen kelengkapan WBK dengan lebih baik.

H. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung IK 9 Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Nilai).

IK 10. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai tersebut diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin.

- Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai.
- Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir.
- Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku kerja.
- Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi: Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Tabel 33. Capaian IK 10 BPSPL Denpasar TW IV

SK 7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar							
IK 10	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)							
Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023						Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2022 (%)	Target PK 2023	% Realisasi Thd PK	Target 2023	% Capaian Thd Renstra
85,16	85	90,43	106,39	6,35	85	106,39	75	120,57

A. Capaian IK Triwulan IV Tahun 2023

Pada triwulan IV, target IK sudah tercapai dengan nilai 90,43 atau 106,39% dari target.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV 2022 dan Triwulan IV 2023

Capaian tahun 2022 adalah 85,16 sedangkan tahun 2023 adalah 90,43 sehingga terdapat kenaikan sebesar 6,35% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan terjadi karena pada tahun 2023 koordinasi antara pegawai dan koordinator lebih baik dalam pengeloaan pegawai dan telah melaksanakan perbaikan dari evaluasi IK pada tahun 2022.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV dengan Renstra BPSPL Denpasar

Target IP ASN tahun 2023 pada renstra 2020-2024 adalah 75 atau tercapai 120,57%.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan sejauh ini mengalami lebih banyak keberhasilan karena pelaksanaan kegiatan manajemen SDM secara rutin yang baik oleh koordinator kegiatan.

b. Analisis Kegagalan

Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti dan kegiatan berjalan secara lancar.

c. Solusi

Tidak ada permasalahan yang perlu diselesaikan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Penggunaan anggaran untuk pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, magang dan sebagainya, selain itu juga melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi melalui daring agar para peserta yang tidak dapat hadir luring dapat melalui daring.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja ini adalah :

1. Mendorong pencapaian nilai IP ASN. Nilai IP ASN BPSPL Denpasar pada akhir tahun 2024 adalah 90,43.
2. Mengelola Pengisian Kinerja Triwulan IV dan tahunan pada Aplikasi e-Kinerja BKN
3. Melakukan proses Penyelesaian Data Anomali pada Aplikasi SI ASN

4. Mengusulkan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN
 5. Menyiapkan Usulan dan Dokumen Kelengkapan Calon peserta pelatihan dan uji kompetensi Jabatan Fungsional Perencana
 6. Penyampaian surat terkait usulan kebutuhan Pelatihan Aparatur Tahun 2024
 7. Penyampaian surat terkait usulan tes TPA dan TOEFL a.n Yudisthio Wahyudi
 8. Penyampaian surat terkait usulan kenaikan pangkat a.n Ina Cahyaningtyas
 9. Penyampaian surat terkait usulan pemberhentian Jabatan Fungsional a.n Rodo Lasniroha
 10. Penyampaian usulan Pemberhentian BPJS Kesehatan PPNPN yang sudah menjadi pegawai melalui Outsourcing dan memperpanjang BPJS Kesehatan PPNPN yang terdaftar di BKN
 11. Penyampaian surat terkait Monitoring presensi pegawai BPSPL Denpasar semester I Tahun 2023
 12. Partisipasi ASN BPSPL Denpasar dalam Pelatihan MOOC PINTAR
 13. Menyampaikan Data Penyelenggara Negara Wajib Laport LHKPN Tahun 2023
 14. Pelaksanaan kegiatan Team Building bagi pegawai BPSPL Denpasar
- G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya
- Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya adalah melanjutkan pengadministrasian kepegawaian dengan tertib dan mendorong setiap pegawai untuk meningkatkan nilai IP ASN individu pada aspek kompetensi dengan mengikuti workshop, bimtek, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan segera mengupdate data peningkatan kompetensi yang telah diikuti pada aplikasi epegawai
- H. Realisasi Anggaran

Tabel 34. Realisasi Anggaran IK 10

No.	IKU		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
12	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar	Layanan Manajemen SDM	210.000.000	82.558.564	39,31

IK 11. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)

Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

1. Perencanaan kinerja (30%)
2. Pengukuran kinerja (30%)
3. Pelaporan kinerja (15%), dan
4. Evaluasi kinerja (25%)

Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim Sekretariat Ditjen PRL. Kategori nilai PM SAKIP yaitu :

Tabel 35. Kategori nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis

Predikat	Nilai	Interpretasi
		teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 36. Capaian IK 11 BPSPL Denpasar TW IV

SK 7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar							
IK 11	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)							
Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023						Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2022 (%)	Target PK 2023	% Realisasi Thd PK	Target 2023	% Capaian Thd Renstra
-	75	84,2	112,27	-	75	112,27	-	-

A. Capaian IK Triwulan IV Tahun 2023

Pada triwulan IV, target IK Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar tercapai 112,27% (dari target nilai 75 tercapai 84,2).

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV 2022 dan Triwulan IV 2023

Tidak terdapat target IK Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar pada tahun 2022, sehingga capaian tidak dapat dibandingkan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV dengan Renstra BPSPL Denpasar

Tidak terdapat target IK Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar berdasarkan Renstra 2020-2024, sehingga capaian tidak dapat dibandingkan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan sejauh ini mengalami lebih banyak keberhasilan karena dalam pelaksanaannya pada kegiatan layanan pemantauan dan evaluasi penyiapan dan penyampaian dokumen pencapaian kinerja & pelaporan dilakukan dengan tepat waktu. Sedangkan untuk kegiatan layanan Perencanaan dan Penganggaran penyusunan dokumen penganggaran PNB dan Anggaran tahun 2024 berhasil dilaksanakan dengan selalu mematuhi penjadwalan dari Sekretariat Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut.

b. Analisis Kegagalan

Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti dan kegiatan berjalan secara lancar.

c. Solusi

Tidak ada permasalahan yang perlu diselesaikan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dengan cara membuat email khusus

untuk pengumpulan dokumen dan laporan. Selain itu para pegawai diwajibkan untuk mengumpulkan triwulan dan laporan akhir kegiatan.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja ini adalah :

1. Revisi DIPA guna memutakhirkan Halaman III DIPA (RPD) Triwulan I, II, III, dan IV
2. Revisi POK dalam rangka mengakomodir kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan
3. Revisi Penambahan Belanja Pegawai dalam rangka mengakomodir kebutuhan anggaran Belanja Pegawai
4. Penyusunan, Reviu, dan finalisasi Dokumen Revisi Anggaran Penggunaan Dana PNBSP Satker Lingkup Ditjen PRL Tahun 2023.
5. Penyusunan dan Reviu Dokumen Perencanaan Anggaran TA 2024.
6. Verifikasi kinerja Triwulan I, II, III, dan IV
7. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I, II, III, dan IV
8. Evaluasi rencana aksi, monitoring, rapat, dan evaluasi kegiatan
9. Pengisian aplikasi emonev Bappenas
10. Penyusunan draft PK BPSPL Denpasar TA 2023 perubahan kedua

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Rencana aksi triwulan berikutnya adalah

1. Melanjutkan kegiatan Penganggaran berupa Penyusunan Anggaran TA 2025 dan Revisi DIPA untuk penghapusan/tagging blokir, penambahan/pengurangan anggaran, pergeseran anggaran yang membutuhkan persetujuan level atas atau Revisi POK untuk mengakomodir kebutuhan anggaran kegiatan internal.
2. Melanjutkan kegiatan penyiapan dan penyampaian dokumen pencapaian kinerja & pelaporan dilakukan dengan tepat waktu.

H. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung IK 1.1 Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai).

IK 12. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)

Dokumen pendukung laporan SPIP yang disiapkan oleh Direktorat adalah:

- a. pengendalian kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- b. pengendalian penyusunan anggaran;
- c. pengendalian pengadaan barang/jasa;
- d. pengendalian Barang Milik Negara (BMN);
- e. pemantauan Manajemen Resiko; dan/atau
- f. pengendalian penyerapan anggaran.

Teknik Menghitung untuk Setdit dan UPT adalah Menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun. Sedangkan untuk Direktorat Menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen pendukung laporan SPIP yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Sekretariat PRL.

Tabel 37. Capaian IK 12 BPSPL Denpasar TW IV

SK 7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar							
IK 12	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)							
Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023						Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2022 (%)	Target PK 2023	% Realisasi Thd PK	Target 2023	% Capaian Thd Renstra
4	4	4	100	-	4	100	-	-

A. Capaian IK Triwulan IV Tahun 2023

Pada triwulan IV, target IK tercapai 100% (4 dari 4 target telah tercapai).

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV 2022 dan Triwulan IV 2023

Pada triwulan IV 2022 dan triwulan IV 2023 target laporan SPIP sama-sama tercapai 4 dokumen dari target 4 dokumen laporan (tercapai 100%).

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV dengan Renstra BPSPL Denpasar

Capaian triwulan IV tidak dapat dibandingkan dengan Renstra BPSPL Denpasar karena tidak terdapat IK tersebut pada Renstra.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan sejauh ini berhasil melakukan persiapan penyusunan laporan SPIP dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan membuat draft laporan SPIP.

b. Analisis Kegagalan

Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti dan kegiatan berjalan secara lancar.

c. Solusi

Tidak ada permasalahan yang perlu diselesaikan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan menunjuk penanggung jawab pelaporan SPIP.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung dalam rangka pencapaian indikator ini adalah membuat draf laporan pengendalian berkala dan rutin laporan SPIP.

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Rencana Aksi untuk Triwulan berikutnya adalah melanjutkan pengumpulan bahan laporan SPIP dan membuat draf laporan pengendalian berkala dan rutin laporan SPIP.

H. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung IK 12 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen).

IK 13. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Denpasar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 2 komponen, yaitu Komponen Dokumen, dan Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi Bitrix24.

Tabel 38. Capaian IK 13 BPSPL Denpasar TW IV

SK 7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar							
IK 13	Persentase Unit Kerja BPSPL Denpasar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)							
Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023						Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2022 (%)	Target PK 2023	% Realisasi Thd PK	Target 2023	% Capaian Thd Renstra
100	92	133,30	144,90 atau 120 (kinerjaku)	38,72	92	144,90	88	151,48

A. Capaian IK Triwulan IV Tahun 2023

Sampai dengan triwulan IV, dibebankan target IK sebesar 92% dengan realisasi 133,30% sehingga tercapai 144,90 atau 120 (berdasarkan aplikasi kinerjaku) dari target.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV 2022 dan Triwulan IV 2023
Capaian tahun 2022 adalah 100 sedangkan capaian tahun 2023 adalah 133,30% sehingga terdapat kenaikan sebesar 33,30% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan terjadi karena pejabat yang berwenang pada tahun 2023 melakukan postingan pada aplikasi yang lebih banyak daripada tahun 2022.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV dengan Renstra BPSPL Denpasar
Jika dibandingkan dengan Renstra BPSPL Denpasar capaian hingga akhir tahun 2023 adalah 151,48%.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
- a. Analisis Keberhasilan
Pada Triwulan IV IK tercapai melebihi target dengan presentase sebesar 133,3%. Namun secara keseluruhan hingga Triwulan IV (capaian tahunan 2023) IK tidak tercapai karena pada Triwulan III IK tidak tercapai sama sekali (capaian 0%) sehingga rerata capaian hingga Triwulan IV (capaian tahunan 2023) adalah 83,325% (di bawah target yaitu 92%)
 - b. Analisis Kegagalan
IK gagal dicapai pada Triwulan III karena pejabat struktural tidak mengupdate berita ke situs bitrix.
 - c. Solusi
Untuk mencegah kegagalan pencapaian IK di Triwulan berikut terulang kembali, perlu diidentifikasi penyebab pejabat struktural tidak mengupdate berita ke situs bitrix, agar dapat menjadi antisipasi di Triwulan berikut.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya
Setiap subkoordinator seksi memiliki aplikasi Bitrix yang kemudian diisi.
- F. Kegiatan Pendukung
Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja ini adalah melakukan publikasi bulanan di sosial media.
- G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Rencana aksi tindak lanjut pada triwulan selanjutnya adalah melanjutkan publikasi bulanan di sosial media.

H. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung IK 13 Persentase Unit Kerja BPSPL Denpasar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%).

IK 14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Denpasar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Denpasar adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan IV Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh BPSPL Denpasar.

Tabel 39. Capaian IK 14 BPSPL Denpasar TW IV

SK 7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar							
IK 14	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Denpasar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)							
Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023						Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2022 (%)	Target PK 2023	% Realisasi Thd PK	Target 2023	% Capaian Thd Renstra
100	75	100	133,33 atau 120 (kinerjaku)	-	75	133,33	75	133,33

A. Capaian IK Triwulan IV Tahun 2023

Pada triwulan IV, target IK telah tercapai dengan persentase capaian 133,33% atau 120% sesuai aplikasi kinerjaku.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV 2022 dan Triwulan IV 2023

Capaian triwulan IV 2021 maupun triwulan IV 2022 tercapai 100 sehingga tidak terdapat peningkatan atau penurunan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV dengan Renstra BPSPL Denpasar

Target persentase tindak lanjut hasil pengawasan tahun 2023 pada renstra 2020-2024 adalah 75% atau tercapai 133,33%.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan atas capaian indikator kinerja ini adalah telah dilakukan tindaklanjuti surat dari Inpektur III KKP yang berkaitan dengan evaluasi atau audit pada BPSPL Denpasar dengan melengkapi dokumen data dukung untuk tindaklanjut temuan.

b. Analisis Kegagalan

Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti dan kegiatan berjalan secara lancar.

c. Solusi

Tidak ada permasalahan yang perlu diselesaikan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Dalam penyelesaian tersebut tidak menggunakan anggaran

F. Kegiatan Pendukung

Dalam pencapaian indikator kinerja hingga Triwulan IV tahun 2023 ini, kegiatan yang telah dilakukan adalah:

1. Melakukan tindaklanjuti surat dari Inpektur III KKP, Nomor : T.164/ITJ.3/HP.460/IV/2023 tanggal 15 April 2023 Perihal Hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2023 pada BPSPL Denpasar dengan melengkapi dokumen data dukung untuk tindaklanjut rekomendasi Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2023 pada BPSPL Denpasar. Dari hasil tindaklanjut menghasilkan Berita Acara Tindaklanjut nomor NOMOR - 2465.02.10/ITJ/PL.420/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 perihal perihal Hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2023 pada BPSPL Denpasar.
2. Melakukan tindaklanjuti surat dari Inpektur III KKP, Nomor : T.385 /ITJ.3/HP.110/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Perihal Laporan Hasil Audit Kinerja TA 2022 - 2023 pada BPSPL Denpasar dengan melengkapi dokumen data dukung untuk tindaklanjut rekomendasi Audit Kinerja TA 2022 - 2023 pada BPSPL Denpasar. Dari hasil tindaklanjut menghasilkan Berita Acara Tindaklanjut nomor NOMOR - 2604.21.12/ITJ/PL.420/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Laporan Hasil Audit Kinerja TA 2022 - 2023 pada BPSPL Denpasar.
3. Melakukan tindaklanjuti surat dari Inpektur III KKP, Nomor : T.477/ITJ.3/HP.430/IX/2023 tanggal 14 September 2023 Perihal Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023

pada BPSPL Denpasar dengan melengkapi dokumen data dukung untuk tindaklanjut rekomendasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 pada BPSPL Denpasar. Dari hasil tindaklanjut menghasilkan Berita Acara Tindaklanjut nomor NOMOR - 2709.20.12/ITJ/PL.420/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 perihal Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 pada BPSPL Denpasar.

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Melakukan tindaklanjut jika terdapat temuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai rekomedasi dengan status tuntas 100%.

H. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung IK 14 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Denpasar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%).

IK 15. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)

Temuan LHP BPK BPSPL Denpasar yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK BPSPL Denpasar Tahun 2022. Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK SETJEN merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK BPSPL Denpasar dapat dihitung menggunakan rumus: (Jmlh tindaklanjut / Jmlh temuan) x 100%.

Tabel 40. Capaian IK 15 BPSPL Denpasar TW IV

SK 7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar							
IK 15	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)							
Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023						Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2022 (%)	Target PK 2023	% Realisasi Thd PK	Target 2023	% Capaian Thd Renstra
100	100	100	100	-	100	100	100	100

A. Capaian IK Triwulan IV Tahun 2023

Pada tahun 2023 tidak terdapat pemeriksaan BPK sehingga sesuai dengan manual IKU apabila tidak dilakukan pemeriksaan oleh BPK capaiannya adalah 100%.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV 2022 dan Triwulan IV 2023
Target IK 2022 maupun 2023 tercapai 100 sehingga tidak terdapat peningkatan atau penurunan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV dengan Renstra BPSPL Denpasar
Target persentase penyelesaian temuan LHP BPK tahun 2023 pada renstra 2020-2024 adalah 100% atau tercapai 100%.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan
IK tercapai karena tidak terdapat temuan yang harus ditindaklanjuti.
 - b. Analisis Kegagalan
Belum dapat dilakukan analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini, karena belum terdapat temuan yang harus ditindaklanjuti.
 - c. Solusi
Melakukan tindaklanjut jika terdapat temuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya
Terdapat penanggung jawab penyelesaian temuan BPK
- F. Kegiatan Pendukung
Tidak ada kegiatan pendukung pada IK tersebut.
- G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya
Melakukan tindaklanjut jika terdapat temuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- H. Realisasi Anggaran
Tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung IK 15 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%).

IK 16. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Denpasar (%)

Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah adalah ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain: (a) memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; (b) memiliki anggaran besar; mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; (c) mendukung pencapaian prioritas nasional; (d) merupakan arahan direktif presiden; dan pertimbangan lainnya. Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan fokus pengukuran pemanfaatannya. Jenis bantuan yang akan dinilai tingkat efektivitasnya adalah Bantuan KOMPAK. Nilai efektivitas pada Unit Kerja menggunakan hasil penilaian Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang telah dibahas Bersama UPT dan Direktorat Lingkup DJPRL.

Teknik Menghitung:

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

Keterangan:

PT = Pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya atau beroperasinya bantuan pemerintah sesuai target

IG = Integrasi yang diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan atau penerima memahami hak dan kewajibannya setelah menerima bantuan pemerintah

AT = Adaptasi yang diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan atau kemampuan penerima bantuan pemerintah untuk mengembangkan usahanya atau kegiatan kelautan dan perikanan

Tabel 41. Capaian IK 16 BPSPL Denpasar TW IV

SK 7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar								
IK 16	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Denpasar (%)								
Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023						Renstra 2020-2024		
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2022 (%)	Target PK 2023	% Realisasi Thd PK	Target 2023	% Capaian Thd Renstra	
	90,25	77,5	93,33	120,43 atau 120 (kinerjaku)	4,11	77,5	120,43	72,5	128,73

A. Capaian IK Triwulan IV Tahun 2023

Pada triwulan IV, target IK telah tercapai dengan penilaian 93,33 (120,43 % atau 120 % sesuai aplikasi kinerjaku).

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV 2022 dan Triwulan IV 2023

Capaian tahun 2022 adalah 90,25 sedangkan tahun 2023 adalah 93,33 sehingga terdapat kenaikan sebesar 4,11% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan terjadi karena dalam pelaksanaan evaluasi efektivitas pada tahun 2023 dilakukan lebih baik berdasarkan hasil perbaikan dari tahun 2022.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV dengan Renstra BPSPL Denpasar

Target tingkat efektivitas tahun 2023 pada renstra 2020-2024 adalah 72,5% atau tercapai 128,73%.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

c. Analisis Keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan sejauh ini mengalami lebih banyak keberhasilan karena dalam pelaksanaannya BPSPL Denpasar hingga Triwulan IV ini berhasil melakukan monev KOMPAK terhadap tiga kelompok yang menerima bantuan pada tahun 2022.

d. Analisis Kegagalan

Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti dan kegiatan berjalan secara lancar.

d. Solusi

Tidak ada permasalahan yang perlu diselesaikan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi sumber daya dan anggaran yang dilakukan adalah dengan menugaskan pegawai di wilayah kerja untuk mendampingi penilaian dan melakukan monitoring evaluasi bantuan.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja hingga Triwulan IV ini adalah monitoring dan evaluasi bantuan pemerintah 2022 di Yayasan Mina Gora Lestari, Pokmaswas Desa Sulengwaseng, dan Kelompok Pecinta Karang Nuansa Pulau dengan hasil sebagai berikut:

- Monitoring dan evaluasi bantuan tahun 2022 Yayasan Mina Gora Lestari, di Kabupaten Karangasem, Bali dengan nilai KKE 85. Kelompok memiliki kendala pemanfaatan sarana & prasarana belum maksimal dalam rangka meningkatkan pendapatan kelompok dan kapasitas SDM belum merata.
- Monitoring dan evaluasi bantuan tahun 2022 Pokmaswas Desa Sulengwaseng, Kabupaten Flores Timur, NTT dengan nilai KKE 100. Kelompok dianggap tidak memiliki kendala.
- Monitoring dan evaluasi bantuan tahun 2022 Kelompok Pecinta Karang Nuansa Pulau, Kabupaten Klungkung, Bali dengan nilai KKE 95. Kelompok memiliki kendala berupa minim peralatan untuk menunjang penanaman terumbu karang dan Kapasitas SDM belum merata.

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Melanjutkan monitoring dan evaluasi pada Tahun 2024.

H. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung IK 16 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Denpasar (%).

3.2 Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Lain

Perbandingan realisasi capaian kinerja BPSPL Denpasar dengan BPSPL Pontianak hingga Triwulan IV Tahun 2023.

Tabel 42. Target dan Realisasi BPSPL Denpasar Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA		BPSPL Denpasar s.d. Triwulan IV 2023			BPSPL Pontianak s.d. Triwulan IV 2023		
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	3	3	100	3	3	100

INDIKATOR KINERJA		BPSPL Denpasar s.d. Triwulan IV 2023			BPSPL Pontianak s.d. Triwulan IV 2023		
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
2	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Daerah)	1	1	100	1	2	120
3	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kelompok)	2	2	100	3	3	100
4	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	6	9	120	7	10	120
5	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	5	7	120	3	6	120
6	Nilai PNBPN BPSPL Denpasar (Rp.000)	850.000	3.037.033,914	120	900.000	2.374.620,820	120
7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	93,75	89,95	95,95	93,75	93,03	99,23
8	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	82	87,39	106,57	82	85,85	104,70
9	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai)	75	87,57	116,76	75	90,81	120
10	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)	85	90,43	106,39	83	90,84	109,45
11	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	75	84,2	112,27	75	88,20	117,60
12	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	4	4	100,00	4	4	100,00
13	Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Denpasar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92	133,30	120	184	244,40	120,00

INDIKATOR KINERJA		BPSPL Denpasar s.d. Triwulan IV 2023			BPSPL Pontianak s.d. Triwulan IV 2023		
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
14	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Denpasar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75	100	120,00	75	100	120,00
15	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)	100	100	100	100	100	100
16	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Denpasar (%)	77,5	93,33	120	77,5	100	120

Dari hasil perbandingan terhadap 8 Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Denpasar yang memiliki target hingga Triwulan IV terhadap capaian kinerja BPSPL Pontianak terhadap capaian 8 Indikator Kinerja Kegiatan yang sama dapat disimpulkan bahwa pada 7 indikator kinerja (Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar; Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Denpasar; Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar; Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar; dan Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar) memiliki capaian lebih rendah dan pada 1 indikator (Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Denpasar) memiliki capaian lebih tinggi sedangkan pada indikator yang lainnya memiliki capaian yang sama.

3.3 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2023 ini BPSPL Denpasar didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-032.07.2.477419/2023 sebesar Rp14.073.397.000,00 (Empat Belas Miliar Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri dari rupiah murni sebesar Rp12.548.397.000,00 dengan blokir sejumlah Rp375.000.000,00 yang berasal dari blokir Kode 2 dan PNBK sebesar Rp1.525.000.000,00.

Hingga akhir Triwulan IV tahun 2023, realisasi anggaran BPSPL Denpasar adalah Rp13.678.925.611,00 (Tiga Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah) dengan persentase penyerapan 99,86%. Adapun realisasi

anggaran BPSPL Denpasar secara rinci disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 43. Realisasi Anggaran BPSPL Denpasar Triwulan IV Tahun 2023

<i>Kode</i>	<i>Uraian Kegiatan</i>	<i>Pagu (Rp)</i>	<i>Jumlah Realisasi (Rp)</i>	<i>Presentase (%)</i>
Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar		14.073.397.000 <i>(diblokir 375.000.000)</i>	13.678.925.611	99,86
Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut				
2362.PBW.001	<i>Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut</i>	25.000.000	24.977.495	99,91
2362.QEH.001	<i>Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi</i>	300.000.000	298.342.548	99,45
2362.RAL.001	<i>Sarana Pendukung Penyelenggaraan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut</i>	73.000.000	71.250.000	97,60
2362.REA.003	<i>Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan Secara Berkelanjutan</i>	375.000.000 <i>(diblokir keseluruhan)</i>	-	-
2362.REB.001	<i>Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan</i>	700.000.000	699.013.861	99,86
2362.REB.002	<i>Keanekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pemanfaatannya secara Berkelanjutan</i>	1.402.000.000	1.400.488.329	99,89
2362.UBA.001	<i>Pemerintah daerah yang difasilitasi penyusunan usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</i>	100.000.000	99.999.399	100,00
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				

2365.PBW.001	<i>Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/ Terluar</i>	55.000.000	54.799.402	99,64
Perencanaan Ruang Laut				
2366.PBT.009	<i>Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut</i>	1.550.000.000	1.544.847.394	99,67
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut				
2367.EBA.956	<i>Layanan BMN</i>	75.000.000	74.859.444	99,81
2367.EBA.958	<i>Layanan Hubungan Masyarakat</i>	25.000.000	24.939.746	99,76
2367.EBA.960	<i>Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal</i>	10.000.000	10.000.000	100
2367.EBA.962	<i>Layanan Umum</i>	100.000.000	99.937.258	99,94
2367.EBA.994	<i>Layanan Perkantoran</i>	8.743.397.000	8.735.711.039	99,91
2367.EBC.954	<i>Layanan Manajemen SDM</i>	210.000.000	209.938.901	99,97
2367.EBD.952	<i>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</i>	70.000.000	69.985.706	99,98
2367.EBD.953	<i>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</i>	85.000.000	84.995.123	99,99
2367.EBD.955	<i>Layanan Manajemen Keuangan</i>	175.000.000	174.839.966	99,91

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Capaian kinerja IKU BPSPL Denpasar hingga triwulan IV tahun 2023 dinilai baik jika dilihat dari penilaian di aplikasi kinerjaku yaitu sebesar 109,95% dengan uraian sebagai berikut :

1. IKU 1 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Dokumen) (100%)
2. IKU 2 Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Daerah) (100%)
3. IKU 3 Bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kelompok) (100%)
4. IKU 4 Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan dan Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi Di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis) (120%)
5. IKU 5 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis) (120%)
6. IKU 6 Nilai PNPB BPSPL Denpasar (Rp.000) (120%)
7. IKU 7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPL Denpasar (Nilai) (95,95%)
8. IK 8 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai) (106,57%)
9. IK 9 Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Nilai) (116,76%)
10. IK 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks) (106,39%)
11. IK 11 Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai) (112,27%)
12. IK 12 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen) (100 %)
13. IK 13 Persentase Unit Kerja BPSPL Denpasar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%) (120%)
14. IK 14 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Denpasar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%) (120%)
15. IK 15 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%) (100%)
16. IK 16 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Denpasar (%) (120%)

Capaian kinerja BPSPL Denpasar seluruhnya mendukung capaian Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

4.2 Rekomendasi

Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi capaian kinerja pada triwulan selanjutnya, yaitu:

1. Melakukan rapat evaluasi kegiatan dan memperbarui capaian setiap bulan beserta perencanaan Halaman III DIPA agar tepat dari segi realisasi
2. Meningkatkan intensitas dan disiplin dalam melakukan posting-an pada aplikasi bitrix.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar Tahun 2023



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridinjenprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 **BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)** **DENPASAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Permana Yudiarso
Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Victor Gustaaf Manoppo
Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya
Pesisir dan Laut Denpasar


Permana Yudiarso

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
DENPASAR**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	1. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	3
2.	Terwujudnya Kawasan Konservasi yang Ditetapkan di Tingkat Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	2. Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Daerah)	1
3.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	3. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kelompok)	2
		4. Kelompok masyarakat di kawasan konservasi daerah pada wilayah kerja BPSPL Denpasar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)	1
4.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	5. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	6
5.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	6. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	5

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
6.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran	7.	Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di wilayah kerja BPSPL Denpasar (kawasan)	2
7.	Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Denpasar	8.	Nilai PNBP BPSPL Denpasar (Rp.000)	850.000
8.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar	9.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	89
		10.	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	82
		11.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai)	75
		12.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)	85
		13.	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	75
		14.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	4
		15.	Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Denpasar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92
		16.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Denpasar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		17.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)	100
		18.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Denpasar (%)	77,5

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	800.000.000
2.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	2.900.000.000
3.	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	500.000.000
4.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	55.000.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	9.235.340.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar		13.490.340.000

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya
Pesisir dan Laut Denpasar



Permana Yudiarso

2. Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar Tahun 2023 Perubahan Pertama



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridirenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
DENPASAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Getreda Melsina Hehanussa
Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Victor Gustaaf Manoppo
Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Agustus 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya
Pesisir dan Laut Denpasar


Getreda Melsina Hehanussa

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
DENPASAR**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	1. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	3
2.	Terwujudnya Kawasan Konservasi yang Ditetapkan di Tingkat Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	2. Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Daerah)	1
3.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	3. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kelompok)	2
		4. Kelompok masyarakat di kawasan konservasi daerah pada wilayah kerja BPSPL Denpasar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencarian Baru (Kelompok)	1
4.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	5. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	6
5.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	6. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	5

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
6.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran	7.	Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di wilayah kerja BPSPL Denpasar (kawasan)	2
7.	Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Denpasar	8.	Nilai PNBP BPSPL Denpasar (Rp.000)	850.000
8.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar	9.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	89
		10.	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	82
		11.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai)	75
		12.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)	85
		13.	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	75
		14.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	4
		15.	Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Denpasar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92
		16.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Denpasar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		17.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)	100
		18.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Denpasar (%)	77,5

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	800.000.000
2.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	2.900.000.000
3.	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	500.000.000
4.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	55.000.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	9.235.340.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar		13.490.340.000

Jakarta, 2 Agustus 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya
Pesisir dan Laut Denpasar



Getreda Melsina Hehanussa

3. Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar Tahun 2023 Perubahan Kedua



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sesordirienpri@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
DENPASAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Getreda Melsina Hehanussa
Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Victor Gustaaf Manoppo
Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 November 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut

Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya
Pesisir dan Laut Denpasar

Getreda Melsina Hehanussa

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
DENPASAR**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	1. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	3
2.	Terwujudnya Kawasan Konservasi yang Ditetapkan di Tingkat Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	2. Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Daerah)	1
3.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	3. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kelompok)	2
4.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	4. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	6
5.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	5. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	5
6.	Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Denpasar	6. Nilai PNBP BPSPL Denpasar (Rp.000)	850.000
7.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar	7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	93,75

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	8. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	82
	9. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai)	75
	10. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)	85
	11. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	75
	12. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	4
	13. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Denpasar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92
	14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Denpasar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
	15. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)	100
	16. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Denpasar (%)	77,5

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	1.550.000.000
2.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	2.975.000.000
3.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	55.000.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	9.493.397.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar		13.490.340.000

Jakarta 30 November 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya
Pesisir dan Laut Denpasar



Getreda Melsina Hehanussa

4. BAP dan BAST KOMPAK Triwulan II



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
DENPASAR**

JALAN BY PASS PROF IDA BAGUS MANTRA KM 16.7, PERING, GIANYAR 80581
TELEPON (0361) 4794821, FAKSIMILE (0361) 4794822
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bpspl.denpasar@kkp.go.id

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
BANTUAN KONSERVASI TAHUN 2023**

NOMOR 2435/BPSPL.4/PRL.440/VI/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (27-06-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Permana Yudiarso, S.T., M.T.
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar
Alamat : Jalan By Pass Prof. Ida Bagus Mantra Km. 16.7, Pering, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.

bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Kuasa Pengguna Barang, berkedudukan di Jalan Medan Medeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. Nama : Sardianto
Jabatan : Ketua Kelompok Konservasi Penyu Segoro Lestari
Alamat : Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur
untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan hasil pengadaan Bantuan Konservasi dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar kepada **PIHAK KEDUA**,

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

2. **PIHAK KEDUA** telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang dari **PIHAK KESATU**.
3. **PIHAK KEDUA** menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang hasil penyerahan dari **PIHAK KESATU** sesuai Petunjuk Teknis.
4. **PIHAK KEDUA** bersedia untuk mengalihkan Bantuan Konservasi yang diterima atas persetujuan **PIHAK KESATU** kepada penerima lain, jika tidak sanggup memelihara, mengelola, dan memanfaatkan Bantuan Konservasi.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Kuasa Pengguna Barang,



Permana, S.T., M.T.
NIP. 19790305 200312 1 004

PIHAK KEDUA
Ketua Kelompok Konservasi
Penyu Segoro Lestari,



Sardianto

**LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN
BANTUAN KONSERVASI TAHUN 2023**

Nomor : 2435/BPSPL.4/PRL.440/VI/2023
Tanggal : 27 Juni 2023

DAFTAR BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN

No	Nama Barang/ Merk/Spesifikasi	Volume	Satuan	Harga Perolehan (Rp)
1	Gazebo Kayu	1	Unit	Rp. 11.658.000,00
2	Bak Fiber	2	Unit	Rp. 7.125.000,00
3	Motor ATV	1	Unit	Rp. 22.500.000,00
4	Printer	1	Unit	Rp. 3.097.500,00
5	Proyektor	1	Unit	Rp. 6.765.000,00
6	Layar Proyektor	1	Unit	Rp. 1.084.500,00
7	TOA Pengeras Suara	1	Unit	Rp. 745.000,00
8	Alat Speaker Portable	1	Unit	Rp. 3.564.000,00
9	Laptop	1	Unit	Rp. 11.065.000,00
10	Pail Ember 25 Kg	15	Unit	Rp. 670.035,00
11	Keranjang Rabbit	4	Unit	Rp. 422.512,00
12	Mesin Pompa Air	1	Unit	Rp. 4.695.000,00
13	Papan Mading	1	Unit	Rp. 1.850.000,00
14	Papan Nama Bantuan	1	Unit	Rp. 1.900.000,00
15	Tandon Air Profil Tank	1	Unit	Rp. 1.100.000,00

16	Handphone	1	Unit	Rp. 1.998.000,00
17	Tenda	10	Unit	Rp. 11.500.000,00
18	Senter Kepala	12	Unit	Rp. 4.188.000,00
TOTAL HARGA PEROLEHAN				Rp 95.927.547,00

PIHAK KESATU
Kuasa Pengguna Barang,



Sardianto, S.T., M.T.
 NIP. 197405200312 1 004

PIHAK KEDUA
Ketua Kelompok Konservasi
Penyu Segoro Lestari,



Sardianto

Lampiran
Nomor : 2435/BPSPL.4/PRL.440/V1/2023
Tanggal : 27 Juni 2023









**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
DENPASAR**

JALAN BY PASS PROF IDA BAGUS MANTRA KM 16.7, PERING, GIANYAR 80581
TELEPON (0361) 4794821, FAKSIMILE (0361) 4794822
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bpspl.denpasar@kkp.go.id

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
BANTUAN KONSERVASI TAHUN 2023**

NOMOR 2435/BPSPL.4/PRL.440/VI/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (27-06-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Permana Yudiarso, S.T., M.T.
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar
Alamat : Jalan By Pass Prof. Ida Bagus Mantra Km. 16.7, Pering, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.

bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Kuasa Pengguna Barang, berkedudukan di Jalan Medan Medeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. Nama : Sardianto
Jabatan : Ketua Kelompok Konservasi Penyu Segoro Lestari
Alamat : Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur
untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan hasil pengadaan Bantuan Konservasi dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar kepada **PIHAK KEDUA**,

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

2. **PIHAK KEDUA** telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang dari **PIHAK KESATU**.
3. **PIHAK KEDUA** menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang hasil penyerahan dari **PIHAK KESATU** sesuai Petunjuk Teknis.
4. **PIHAK KEDUA** bersedia untuk mengalihkan Bantuan Konservasi yang diterima atas persetujuan **PIHAK KESATU** kepada penerima lain, jika tidak sanggup memelihara, mengelola, dan memanfaatkan Bantuan Konservasi.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Kuasa Pengguna Barang,



Permana Hanowo, S.T., M.T.
NIP. 19790305 200312 1 004

PIHAK KEDUA
Ketua Kelompok Konservasi
Penyu Segoro Lestari,



Sardianto

**LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN
BANTUAN KONSERVASI TAHUN 2023**

Nomor : 2435/BPSPL.4/PRL.440/VI/2023
Tanggal : 27 Juni 2023

DAFTAR BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN

No	Nama Barang/ Merk/Spesifikasi	Volume	Satuan	Harga Perolehan (Rp)
1	Gazebo Kayu	1	Unit	Rp. 11.658.000,00
2	Bak Fiber	2	Unit	Rp. 7.125.000,00
3	Motor ATV	1	Unit	Rp. 22.500.000,00
4	Printer	1	Unit	Rp. 3.097.500,00
5	Proyektor	1	Unit	Rp. 6.765.000,00
6	Layar Proyektor	1	Unit	Rp. 1.084.500,00
7	TOA Pengeras Suara	1	Unit	Rp. 745.000,00
8	Alat Speaker Portable	1	Unit	Rp. 3.564.000,00
9	Laptop	1	Unit	Rp. 11.065.000,00
10	Pail Ember 25 Kg	15	Unit	Rp. 670.035,00
11	Keranjang Rabbit	4	Unit	Rp. 422.512,00
12	Mesin Pompa Air	1	Unit	Rp. 4.695.000,00
13	Papan Mading	1	Unit	Rp. 1.850.000,00
14	Papan Nama Bantuan	1	Unit	Rp. 1.900.000,00
15	Tandon Air Profil Tank	1	Unit	Rp. 1.100.000,00

Lampiran

Nomor : 2435/BPSPL.4/PRL.440/V1/2023

Tanggal : 27 Juni 2023









**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
DENPASAR**

JALAN BY PASS PROF IDA BAGUS MANTRA KM 16.7, PERING, GIANYAR 80581
TELEPON (0361) 4794821, FAKSIMILE (0361) 4794822
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bpspl.denpasar@kkp.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KONSERVASI TAHUN 2023**

NOMOR 2434/BPSPL.4/PRL.440/VI/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (27-06-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Permana Yudianto, S.T., M.T.
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar
Alamat : Jalan By Pass Prof. Ida Bagus Mantra Km. 16.7, Pering, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.

bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Kuasa Pengguna Barang, berkedudukan di Jalan Medan Medeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. Nama : Sardianto
Jabatan : Ketua Kelompok Konservasi Penyu Segoro Lestari
Alamat : Desa Serang, Kecamatan Pangungrejo, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur
untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan hasil pengadaan Bantuan Konservasi dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

2. **PIHAK KEDUA** telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang dari **PIHAK KESATU**.
3. **PIHAK KEDUA** menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang hasil penyerahan dari **PIHAK KESATU** sesuai Petunjuk Teknis.
4. **PIHAK KEDUA** bersedia untuk mengalihkan Bantuan Konservasi yang diterima atas persetujuan **PIHAK KESATU** kepada penerima lain, jika tidak sanggup memelihara, mengelola, dan memanfaatkan Bantuan Konservasi.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Kuasa Pengguna Barang,



Permana Kucharso, S.T., M.T.
NIP. 19790305 200312 1 004

PIHAK KEDUA
Ketua Kelompok Konservasi
Penyu Segoro Lestari,



Sardianto

**LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KONSERVASI TAHUN 2023**

Nomor : 2434/BPSPL.4/PRL.440/VI/2023
Tanggal : 27 Juni 2023

DAFTAR BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN

No	Nama Barang/ Merk/Spesifikasi	Volume	Satuan	Harga Perolehan (Rp)
1	Gazebo Kayu	1	Unit	Rp. 11.658.000,00
2	Bak Fiber	2	Unit	Rp. 7.125.000,00
3	Motor ATV	1	Unit	Rp. 22.500.000,00
4	Printer	1	Unit	Rp. 3.097.500,00
5	Proyektor	1	Unit	Rp. 6.765.000,00
6	Layar Proyektor	1	Unit	Rp. 1.084.500,00
7	TOA Pengeras Suara	1	Unit	Rp. 745.000,00
8	Alat Speaker Portable	1	Unit	Rp. 3.564.000,00
9	Laptop	1	Unit	Rp. 11.065.000,00
10	Pail Ember 25 Kg	15	Unit	Rp. 670.035,00
11	Keranjang Rabbit	4	Unit	Rp. 422.512,00
12	Mesin Pompa Air	1	Unit	Rp. 4.695.000,00
13	Papan Mading	1	Unit	Rp. 1.850.000,00
14	Papan Nama Bantuan	1	Unit	Rp. 1.900.000,00
15	Tandon Air Profil Tank	1	Unit	Rp. 1.100.000,00

16	Handphone	1	Unit	Rp. 1.998.000,00
17	Tenda	10	Unit	Rp. 11.500.000,00
18	Senter Kepala	12	Unit	Rp. 4.188.000,00
TOTAL HARGA PEROLEHAN				Rp 95.927.547,00

PIHAK KESATU
 Kuasa Pengguna Barang,



Permana Yudharso, S.T., M.T.
 NIP. 19790305 200312 1 004

PIHAK KEDUA
 Ketua Kelompok Konservasi
 Penvu Segoro Lestari,



Sardianto

Lampiran
Nomor : 2434/BPSPL.4/PRL.440/VI/2023
Tanggal : 27 Juni 2023









**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
DENPASAR**

JALAN BY PASS PROF IDA BAGUS MANTRA KM 16.7, PERING, GIANYAR 80581
TELEPON (0361) 4794821, FAKSIMILE (0361) 4794822
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bpspl.denpasar@kkp.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KONSERVASI TAHUN 2023**

NOMOR 2434/BPSPL.4/PRL.440/VI/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (27-06-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Permana Yudianto, S.T., M.T.
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar
Alamat : Jalan By Pass Prof. Ida Bagus Mantra Km. 16.7, Pering, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.

bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Kuasa Pengguna Barang, berkedudukan di Jalan Medan Medeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. Nama : Sardianto
Jabatan : Ketua Kelompok Konservasi Penyu Segoro Lestari
Alamat : Desa Serang, Kecamatan Pangungrejo, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur
untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan hasil pengadaan Bantuan Konservasi dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

2. **PIHAK KEDUA** telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang dari **PIHAK KESATU**.
3. **PIHAK KEDUA** menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang hasil penyerahan dari **PIHAK KESATU** sesuai Petunjuk Teknis.
4. **PIHAK KEDUA** bersedia untuk mengalihkan Bantuan Konservasi yang diterima atas persetujuan **PIHAK KESATU** kepada penerima lain, jika tidak sanggup memelihara, mengelola, dan memanfaatkan Bantuan Konservasi.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Kuasa Pengguna Barang,



Permana Panarso, S.T., M.T.
NIP. 19790305 200312 1 004

PIHAK KEDUA
Ketua Kelompok Konservasi
Penyu Segoro Lestari,



Sardianto

**LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KONSERVASI TAHUN 2023**

Nomor : 2434/BPSPL.4/PRL.440/VI/2023
Tanggal : 27 Juni 2023

DAFTAR BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN

No	Nama Barang/ Merk/Spesifikasi	Volume	Satuan	Harga Perolehan (Rp)
1	Gazebo Kayu	1	Unit	Rp. 11.658.000,00
2	Bak Fiber	2	Unit	Rp. 7.125.000,00
3	Motor ATV	1	Unit	Rp. 22.500.000,00
4	Printer	1	Unit	Rp. 3.097.500,00
5	Proyektor	1	Unit	Rp. 6.765.000,00
6	Layar Proyektor	1	Unit	Rp. 1.084.500,00
7	TOA Pengeras Suara	1	Unit	Rp. 745.000,00
8	Alat Speaker Portable	1	Unit	Rp. 3.564.000,00
9	Laptop	1	Unit	Rp. 11.065.000,00
10	Pail Ember 25 Kg	15	Unit	Rp. 670.035,00
11	Keranjang Rabbit	4	Unit	Rp. 422.512,00
12	Mesin Pompa Air	1	Unit	Rp. 4.695.000,00
13	Papan Mading	1	Unit	Rp. 1.850.000,00
14	Papan Nama Bantuan	1	Unit	Rp. 1.900.000,00
15	Tandon Air Profil Tank	1	Unit	Rp. 1.100.000,00

16	Handphone	1	Unit	Rp. 1.998.000,00
17	Tenda	10	Unit	Rp. 11.500.000,00
18	Senter Kepala	12	Unit	Rp. 4.188.000,00
TOTAL HARGA PEROLEHAN				Rp 95.927.547,00

PIHAK KESATU
Kuasa Pengguna Barang,



Permana, S.T., M.T.
NIP. 19790305 200312 1 004

PIHAK KEDUA
Ketua Kelompok Konservasi
Penyu Segoro Lestari




Sardianto





5. BAP dan BAST KOMPAK Triwulan III



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
DENPASAR

JALAN BY PASS PROF IDA BAGUS MANTRA KM 16.7, PERING, GIANYAR 80581
TELEPON (0361) 4794821, FAKSIMILE (0361) 4794822
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bpspl.denpasar@kkp.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENYALURAN BANTUAN KONSERVASI TAHUN 2023
NOMOR BA.1701/BPSPL.4/PL.450/IX/2023

Pada hari ini Jum'at, tanggal Lima Belas, bulan September, tahun 2023, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Getreda Melsina Hehanussa, S.Pi, M.Si
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar
Alamat : Jalan By Pass Prof. Ida Bagus Mantra Km. 16.7, Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.

bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Kuasa Pengguna Barang, berkedudukan di Jalan Medan Medeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama : Gede Wiadnyana
Jabatan : Ketua POKMASWAS Penimbangan Lestari
Alamat : Banjar Galiran, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali

untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan hasil pengadaan Bantuan Pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

2. **PIHAK KEDUA** telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang dari **PIHAK KESATU**.
3. **PIHAK KEDUA** menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang hasil penyerahan dari **PIHAK KESATU** sesuai Petunjuk Teknis.
4. **PIHAK KEDUA** bersedia mengalihkan Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan **PIHAK KESATU** kepada penerima lain, jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Kuasa Pengguna Barang,
Balai Pengelolaan Sumber Daya
Perikanan Laut Denpasar



Poetia Marsina Hehanussa, S.Pi, M.Si
NIP. 19750303 200212 2 003

PIHAK KEDUA
Ketua POKMASWAS
Penimbangan Lestari

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gede Wiadnyana', is written over a faint circular stamp.

Gede Wiadnyana

LAMPIRAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KONSERVASI TAHUN 2023

Nomor : BA.1701/BPSPL.4/PL.450/IX/2023
 Tanggal : 15 September 2023

DAFTAR BARANG YANG DISERAHTERIMAKAN

No	Nama Barang/ Merk/Spesifikasi	Volume	Satuan	Harga Perolehan (Rp)
1	CRESSI Bcd Set Scuba Size: M (1), L (1)	2	Set	Rp 35.936.000,00
2	SCUBAPRO Masker Trinidad	3	Pcs	Rp 3.381.000,00
3	SCUBAPRO Snorkel Trinidad	3	Pcs	Rp 2.031.000,00
4	SCUBAPRO Fins Open Heel Go Sport, Size: 9 (3 set)	3	Set	Rp 7.269.000,00
5	SCUBAPRO Booties Delta Tall High Cut, Size: 42 (3 set)	3	Set	Rp 3.888.000,00
6	MARES Wetsuit Fullsuit One, Size: L (3 pcs)	3	Pcs	Rp 8.454.000,00
7	MARES Belt Stainless Steel Black	4	Pcs	Rp 1.716.000,00
8	AMSCUD Diving Weight	20	Pcs	Rp 4.060.000,00
9	SUUNTO Dive Computer Zoop	1	Unit	Rp 5.635.000,00
10	OLYMPUS Camera TG6	1	Unit	Rp 8.614.000,00
11	OLYMPUS Housing PT059	1	Unit	Rp 7.585.000,00

12	SUBLUE Underwater Scooter White Sharks	1	Unit	Rp 13.911.000,00
TOTAL HARGA PEROLEHAN				Rp 102.480.000,00

PIHAK KESATU

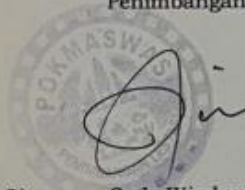
Kuasa Pengguna Barang,
Balai Pengelolaan Sumber Daya
Perikanan dan Laut Denpasar



Welsina Hehanussa, S.Pi, M.Si
NIP. 19750303 200212 2 003

PIHAK KEDUA

Ketua POKMASWAS
Penimbangan Lestari



Gede Wiadnyana

Lampiran
Nomor : BA.1701/BPSPL.4/PL.450/IX/2023
Tanggal : 15 September 2023







KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
DENPASAR

JALAN BY PASS PROF IDA BAGUS MANTRA KM 16.7, PERING, GIANYAR 80581
TELEPON (0361) 4794821, FAKSIMILE (0361) 4794822
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bpspl.denpasar@kkp.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENYALURAN BANTUAN KONSERVASI TAHUN 2023
NOMOR BA.1701/BPSPL.4/PL.450/IX/2023

Pada hari ini Jum'at, tanggal Lima Belas, bulan September, tahun 2023, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Getreda Melsina Hehanussa, S.Pi, M.Si
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar
Alamat : Jalan By Pass Prof. Ida Bagus Mantra Km. 16.7, Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.
bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Kuasa Pengguna Barang, berkedudukan di Jalan Medan Medeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama : Gede Wiadnyana
Jabatan : Ketua POKMASWAS Penimbangan Lestari
Alamat : Banjar Galiran, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali
untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan hasil pengadaan Bantuan Pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

2. **PIHAK KEDUA** telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang dari **PIHAK KESATU**.
3. **PIHAK KEDUA** menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang hasil penyerahan dari **PIHAK KESATU** sesuai Petunjuk Teknis.
4. **PIHAK KEDUA** bersedia mengalihkan Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan **PIHAK KESATU** kepada penerima lain, jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Barang,
Balai Pengelolaan Sumber Daya
Perikanan Laut Denpasar



Wahana Hehanussa, S.Pi, M.Si
NIP. 19750303 200212 2 003

PIHAK KEDUA

Ketua POKMASWAS
Penimbangan Lestari



Gede Wiadnyana

LAMPIRAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KONSERVASI TAHUN 2023

Nomor : BA.1701/BPSPL.4/PL.450/IX/2023
 Tanggal : 15 September 2023

DAFTAR BARANG YANG DISERAHTERIMAKAN

No	Nama Barang/ Merk/Spesifikasi	Volume	Satuan	Harga Perolehan (Rp)
1	CRESSI Bcd Set Scuba Size: M (1), L (1)	2	Set	Rp 35.936.000,00
2	SCUBAPRO Masker Trinidad	3	Pcs	Rp 3.381.000,00
3	SCUBAPRO Snorkel Trinidad	3	Pcs	Rp 2.031.000,00
4	SCUBAPRO Fins Open Heel Go Sport, Size: 9 (3 set)	3	Set	Rp 7.269.000,00
5	SCUBAPRO Booties Delta Tall High Cut, Size: 42 (3 set)	3	Set	Rp 3.888.000,00
6	MARES Wetsuit Fullsuit One, Size: L (3 pcs)	3	Pcs	Rp 8.454.000,00
7	MARES Belt Stainless Steel Black	4	Pcs	Rp 1.716.000,00
8	AMSCUD Diving Weight	20	Pcs	Rp 4.060.000,00
9	SUUNTO Dive Computer Zoop	1	Unit	Rp 5.635.000,00
10	OLYMPUS Camera TG6	1	Unit	Rp 8.614.000,00
11	OLYMPUS Housing PT059	1	Unit	Rp 7.585.000,00

12	SUBLUE Underwater Scooter White Sharks	1	Unit	Rp 13.911.000,00
TOTAL HARGA PEROLEHAN				Rp 102.480.000,00

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Barang,
Balai Pengelolaan Sumber Daya
Perikanan dan Laut Denpasar



Gede Wiadnyana Hehanussa, S.Pi, M.Si
NIP. 19750303 200212 2 003

PIHAK KEDUA

Ketua POKMASWAS
Penimbangan Lestari



Gede Wiadnyana

Lampiran
Nomor : BA.1701/BPSPL.4/PL.450/IX/2023
Tanggal : 15 September 2023







KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
DENPASAR

JALAN BY PASS PROF IDA BAGUS MANTRA KM 16.7, PERING, GIANYAR 80581
TELEPON (0361) 4794821, FAKSIMILE (0361) 4794822
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bpspl.denpasar@kkp.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
PENYALURAN BANTUAN KONSERVASI TAHUN 2023
NOMOR BA.1700/BPSPL.4/PL.450/IX/2023

Pada hari ini Jum'at, tanggal Lima Belas, bulan September, tahun 2023, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Getreda Melsina Hehanussa, S.Pi, M.Si
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar
Alamat : Jalan By Pass Prof. Ida Bagus Mantra Km. 16.7, Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.
bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Kuasa Pengguna Barang, berkedudukan di Jalan Medan Medeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama : Gede Wiadnyana
Jabatan : Ketua POKMASWAS Penimbangan Lestari
Alamat : Banjar Galiran, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali
untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** melakukan pemeriksaan hasil pengadaan Bantuan Pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar bersama **PIHAK KEDUA**, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

2. **PIHAK KEDUA** telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang dari **PIHAK KESATU**.
3. **PIHAK KEDUA** menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang hasil penyerahan dari **PIHAK KESATU** sesuai Petunjuk Teknis.
4. **PIHAK KEDUA** bersedia mengalihkan Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan **PIHAK KESATU** kepada penerima lain, jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Barang,
Balai Pengelolaan Sumber Daya
Perikanan Laut Denpasar



Gesdir M. Sina Hehanussa, S.Pi, M.Si
NIP. 19750303 200212 2 003

PIHAK KEDUA

Ketua POKMASWAS
Penimbangan Lestari



Gede Wiadnyana

LAMPIRAN
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
BANTUAN KONSERVASI TAHUN 2023

Nomor : BA.1700/BPSPL.4/PL.450/IX/2023
Tanggal : 15 September 2023

DAFTAR BARANG YANG DIPERIKSA

No	Nama Barang/ Merk/Spesifikasi	Volume	Satuan	Harga Perolehan (Rp)
1	CRESSI Bcd Set Scuba Size: M (1), L (1)	2	Set	Rp 35.936.000,00
2	SCUBAPRO Masker Trinidad	3	Pcs	Rp 3.381.000,00
3	SCUBAPRO Snorkel Trinidad	3	Pcs	Rp 2.031.000,00
4	SCUBAPRO Fins Open Heel Go Sport, Size: 9 (3 set)	3	Set	Rp 7.269.000,00
5	SCUBAPRO Booties Delta Tall High Cut, Size: 42 (3 set)	3	Set	Rp 3.888.000,00
6	MARES Wetsuit Fullsuit One, Size: L (3 pcs)	3	Pcs	Rp 8.454.000,00
7	MARES Belt Stainless Steel Black	4	Pcs	Rp 1.716.000,00
8	AMSCUD Diving Weight	20	Pcs	Rp 4.060.000,00
9	SUUNTO Dive Computer Zoop	1	Unit	Rp 5.635.000,00
10	OLYMPUS Camera TG6	1	Unit	Rp 8.614.000,00
11	OLYMPUS Housing PT059	1	Unit	Rp 7.585.000,00

12	SUBLUE Underwater Scooter White Sharks	1	Unit	Rp 13.911.000,00
TOTAL HARGA PEROLEHAN				Rp 102.480.000,00

PIHAK KESATU
 Kuasa Pengguna Barang,
 Balai Pengelolaan Sumber Daya
 Perikanan Laut Denpasar



Gede Wiadnyana, S.Pi, M.Si
 NIP. 19750303 200212 2 003

PIHAK KEDUA
 Ketua POKMASWAS
 Perimbangan Lestari



Gede Wiadnyana

Lampiran
Nomor : BA.1700/BPSPL.4/PL.450/IX/2023
Tanggal : 15 September 2023







KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
DENPASAR

JALAN BY PASS PROF IDA BAGUS MANTRA KM 16.7, PERING, GIANYAR 80581
TELEPON (0361) 4794821, FAKSIMILE (0361) 4794822
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bpspl.denpasar@kkp.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
PENYALURAN BANTUAN KONSERVASI TAHUN 2023
NOMOR BA.1700/BPSPL.4/PL.450/IX/2023

Pada hari ini Jum'at, tanggal Lima Belas, bulan September, tahun 2023, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Getreda Melsina Hehanussa, S.Pi, M.Si
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar
Alamat : Jalan By Pass Prof. Ida Bagus Mantra Km. 16.7, Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.
bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Kuasa Pengguna Barang, berkedudukan di Jalan Medan Medeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama : Gede Wiadnyana
Jabatan : Ketua POKMASWAS Penimbangan Lestari
Alamat : Banjar Galiran, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali
untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** melakukan pemeriksaan hasil pengadaan Bantuan Pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar bersama **PIHAK KEDUA**, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

2. **PIHAK KEDUA** telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang dari **PIHAK KESATU**.
3. **PIHAK KEDUA** menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang hasil penyerahan dari **PIHAK KESATU** sesuai Petunjuk Teknis.
4. **PIHAK KEDUA** bersedia mengalihkan Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan **PIHAK KESATU** kepada penerima lain, jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Barang,
Balai Pengelolaan Sumber Daya
Perikanan dan Laut Denpasar



Gede Meloma Hehanussa, S.Pi, M.Si
NIP. 19750303 200212 2 003

PIHAK KEDUA

Ketua POKMASWAS
Penimbangan Lestari



Gede Wiadnyana

LAMPIRAN
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
BANTUAN KONSERVASI TAHUN 2023

Nomor : BA.1700/BPSPL.4/PL.450/IX/2023
 Tanggal : 15 September 2023

DAFTAR BARANG YANG DIPERIKSA

No	Nama Barang/ Merk/Spesifikasi	Volume	Satuan	Harga Perolehan (Rp)
1	CRESSI Bcd Set Scuba Size: M (1), L (1)	2	Set	Rp 35.936.000,00
2	SCUBAPRO Masker Trinidad	3	Pcs	Rp 3.381.000,00
3	SCUBAPRO Snorkel Trinidad	3	Pcs	Rp 2.031.000,00
4	SCUBAPRO Fins Open Heel Go Sport, Size: 9 (3 set)	3	Set	Rp 7.269.000,00
5	SCUBAPRO Booties Delta Tall High Cut, Size: 42 (3 set)	3	Set	Rp 3.888.000,00
6	MARES Wetsuit Fullsuit One, Size: L (3 pcs)	3	Pcs	Rp 8.454.000,00
7	MARES Belt Stainless Steel Black	4	Pcs	Rp 1.716.000,00
8	AMSCUD Diving Weight	20	Pcs	Rp 4.060.000,00
9	SUUNTO Dive Computer Zoop	1	Unit	Rp 5.635.000,00
10	OLYMPUS Camera TG6	1	Unit	Rp 8.614.000,00
11	OLYMPUS Housing PT059	1	Unit	Rp 7.585.000,00

12	SUBLUE Underwater Scooter White Sharks	1	Unit	Rp 13.911.000,00
TOTAL HARGA PEROLEHAN				Rp 102.480.000,00

PIHAK KESATU
 Kuasa Pengguna Barang,
 Balai Pengelolaan Sumber Daya
 Pesisir dan Laut Denpasar



[Signature]
 Dede Melsina Hehanussa, S.Pi, M.Si
 NIP. 19750303 200212 2 003

PIHAK KEDUA
 Ketua POKMASWAS
 Penimbangan Lestari



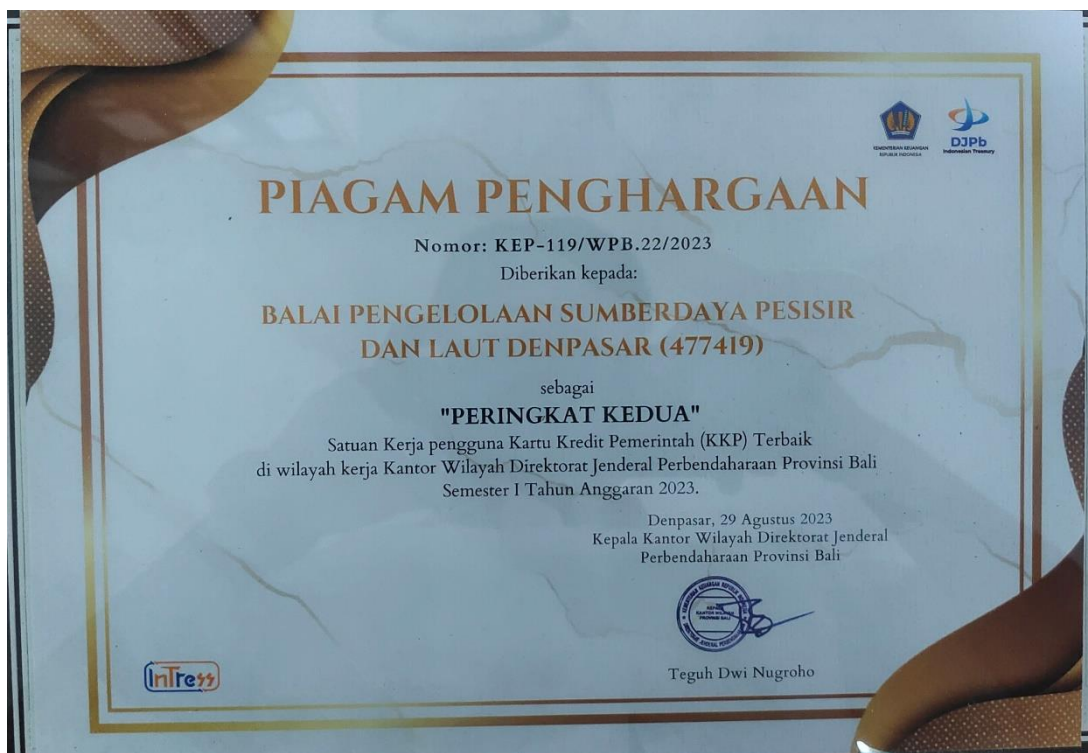
[Signature]
 Gede Wradnyana

Lampiran
Nomor : BA.1700/BPSPL.4/PL.450/IX/2023
Tanggal : 15 September 2023





6. Piagam Penghargaan





An artistic illustration of an underwater scene. The top half shows a light blue sky with white clouds and bubbles. The bottom half is a dark blue ocean floor with green seaweed and pink coral. The text is centered at the bottom.

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun Anggaran 2023